

**STRATEGI INTERVENSI PEMERINTAH DAERAH
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN
BEKASI PROVINSI JAWA BARAT**

USULAN PENELITIAN TESIS

**Diajukan guna memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan
Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara**



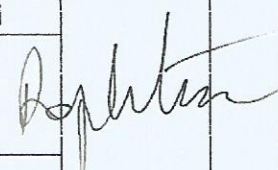
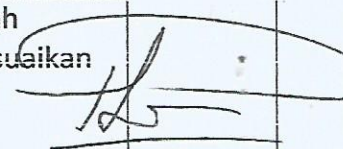
**Diajukan Oleh :
DEDI WIDJAYA
NPM. 20651010225**

**PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI ILMU PEMERINTAHAN ABDI NEGARA**

2022

LEMBAR KOREKSI HASIL SIDANG KOMPREHENSIF PENELITIAN TESIS

Nama	: DEDY WIJAYA
NPM	: 20651010225
Angkatan/Kelas	: XII/ B
Program Studi	: MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
Judul	: STRATEGI INTERVENSI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT
Tanggal SUP	: 03 OKTOBER 2023

NO	Dosen Penguji	Halaman Perbaikan	Saran Pembimbing/Penguji	Status Perbaikan	Paraf
1.	Dr. Drs. Rajanner P. Simarmata.,M.Si		Perbaikan Abstrak 4 paragraf	Sudah diperbaiki	
		33	Rujukan Peraturan PerUndang-Undangan terbaru tentang Pemerintah Daerah	Sudah dirubah	
		146	Perbaiki kesimpulan sesuai analisis Asoca	Sudah dipebaiki	
2.	Dr. Drs. Rosidi.,M.Si	79	Tambahkan tahapan analisis ASOCA	Sudah ditambahkan	
		135	Gunakan rumusan ASOCA dalam menjawab rumusan masalah	Sudah disesuaikan	
2.	Dr. Drs. Rosidi.,M.Si		Perbaiki Abstrak	Sudah diperbaiki	
			Biodata	Sudah dibuat	

Persetujuan oleh tim Pengujij

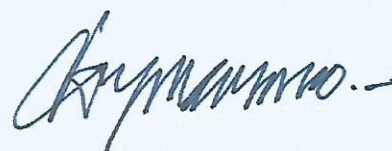
Ketua Pengujji



Dr. Sofyan Safari Hamim,M.Si

Tanggal

Anggota I



Dr. Sumarsono, MDM

Tanggal

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Tesis : STRATEGI INTERVENSI PEMERINTAH
DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI
KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT

Oleh : DEDY WIJAYA

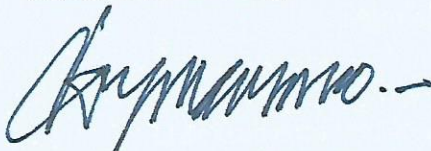
NPM : 20651010225

Tempat dan Tgl Lahir : Jakarta, 05 Juni 1974

TESIS

Diajukan untuk dipertahankan dihadapan Tim Dosen Penguji
Sidang Tesis

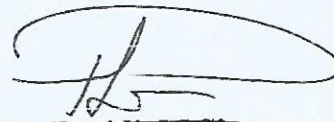
Dosen Pembimbing I



Dr. Sumarsono, MDM

Tanggal :

Dosen Pembimbing II



Dr. Rosidi, M.Si

Tanggal :

Program Pascasarjana
Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan
Abdi Negara
A.n Ketua,
Wakil Ketua



Dr. Sofyan Safari Hamim, M.Si

Tanggal :

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Permasalahan	17
1.2.1. Identifikasi Masalah	17
1.2.2. Pembatasan Masalah	18
1.2.3. Rumusan Masalah	18
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	19
1.3.1. Maksud Penelitian	19
1.3.2. Tujuan Penelitian	19
1.4. Kegunaan Penelitian	20
1.4.1. Kegunaan Teoritis	20
1.4.2. Kegunaan Praktis	20
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1. Kajian Pustaka	21
2.1.1. Ilmu Pemerintahan	21
2.1.2. Teori Otonomi Daerah	28
2.1.3. Teori Desentralisasi	31
2.1.4. Teori Strategi.....	43
2.1.5. Pengelolaan Sampah	53
2.2. Hasil Penelitian Sebelumnya.....	60

2.3. Kerangka Pemikiran.....	68
------------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian.....	72
3.2. Kerangka Konsep Penelitian.....	74
3.3. Data yang Diperlukan.....	75
3.4. Informan dan Cara Menentukannya.....	77
3.5. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	79
3.5.1. Teknik Pengumpulan Data.....	79
3.5.2. Instrumen Penelitian.....	82
3.6. Teknik Analisis Data.....	83
3.7. Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	91
3.7.1. Lokasi penelitian.....	91
3.7.2. Jadwal Penelitian.....	91

DAFTAR PUSTAKA.....	92
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.1.	Pertumbuhan Penduduk dan Peningkatan Jumlah Sampah Kabupaten Bekasi 2016-2020.....	15
Tabel 2.1.	Matriks Analisis ASOCA	52
Tabel 3.1.	Kerangka Konsep Penelitian	74
Tabel 3.2.	Informan Penelitian	79
Tabel 3.3.	Daftar Pertanyaan dan skor Litmus Test.....	87
Tabel 3.4.	Susunan Proiritas Langkah-langkah Strategi Intervensi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat	89
Tabel 3.5.	Jadwal Penelitian	91

DAFTAR GAMBAR

	Judul Gambar	Hal
Gambar 2.1.	Hirarki Pengelolaan Sampah	57
Gambar 2.2.	Limbah Terbentuk	59
Gambar 2.3.	Kerangka Pemikiran	71
Gambar 3.1.	Matrik ASOCA	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dinamika dan perubahan merupakan sebuah keniscayaan yang akan terjadi sepanjang zaman dan selama manusia masih terus ada di muka bumi, baik yang secara natural maupun yang terdapat campur tangan manusia didalamnya. Perubahan-perubahan ini meliputi seluruh hal yang ada dan terdapat di alam jagad raya ini, baik yang terdapat pada fisik dan mental manusia maupun juga segala hal yang ada disekitar lingkungan tempat tinggalnya manusia tersebut.

Beberapa dekade terakhir ini, isu-isu strategis tentang eksistensi manusia di bumi ini menjadi polemik yang terus diperbincangkan. Menjadi hangat ketika isu- isu manusia atau masyarakat dikaitkan dengan keberlanjutan hajat hidup manusia tersebut di alam semesta ini. Paling mencolok dan menjadi tajuk utama perbincangan yaitu kaitannya dengan pertumbuhan dan penambahan jumlah penduduk bumi. Merupakan masalah serius yang perlu ditangani, dikarenakan bertambah dan meledaknya jumlah penduduk akan mengakibatkan bermunculan masalah-masalah sosial baru yang timbul dan hadir di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Masalah-masalah sosial tersebut hadir seiring dengan semakin banyaknya kepentingan-kepentingan pribadi dari masing-masing masyarakat, sehingga menyebabkan banyak benturan kepentingan-kepentingan (*conflict of interests*) masyarakat tersebut.

Di masa sekarang, masyarakat cenderung ingin tinggal di daerah perkotaan, sehingga banyak kegiatan urbanisasi yang dilakukan oleh masyarakat, dikeranakan

keinginan mereka untuk mencari penghidupan yang lebih baik dan layak dari pada saat tinggal di desa. Kaum urban tersebut secara bertahap dan signifikan mulai memenuhi wilayah daerah perkotaan, sehingga berimplikasi kepada mulai padatnya wilayah pemukiman di kota-kota tersebut. Hal ini lambat laun akan mengakibatkan adanya masalah kepadatan penduduk dan keterbatasan lahan tempat tinggal di suatu daerah perkotaan.

Dewasa ini pertumbuhan penduduk khususnya di kota berjalan dengan pesat sekitar 25%, dan pada tahun 2022 diperkirakan jumlahnya meningkat menjadi 35% atau sebanyak 60 juta jiwa. Pesatnya pertumbuhan penduduk di kota-kota besar di Indonesia selain membawa keuntungan dengan tumbuh dan berkembangnya kota-kota menjadi pusat kegiatan ekonomi, industri, sosial dan budaya juga membawa dampak terhadap meningkatnya biaya sosial, sehingga pada akhirnya kawasan perkotaan akan sampai pada tingkat skala disekonomi (kemunduran ekonomi). Hal ini merupakan akibat terjadinya kemerosotan kualitas lingkungan hidup perkotaan berupa kebisingan, kemacetan lalu lintas, pencemaran air, udara dan tanah yang disebabkan oleh limbah industri dan rumah tangga yaitu berupa sampah (Nugroho, 2022).

Kualitas lingkungan di wilayah perkotaan berbeda dengan lingkungan pedesaan, jumlah penduduk yang lebih padat, akan menghasilkan kualitas lingkungan yang kumuh udara yang kurang baik disebabkan meningkatkannya jumlah kendaraan bermotor yang menyebabkan emisi udara dan polusi, maupun menghasilkan berbagai macam limbah baik limbah industri maupun limbah rumah tangga. Tantangan menciptakan kualitas lingkungan yang bersih di wilayah

perkotaan merupakan harapan bagi semua orang baik pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat. Pepatah lawas mengatakan kebersihan sebagian dari iman, artinya manusia juga dapat mengukur kualitas hidup yang baik dari menjaga kebersihan diri maupun kebersihan wilayah sekitarnya yang merupakan interaksi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Namun dalam praktek dan kenyataan saat ini, sedikit sekali perhatian masyarakat terkait menjaga kebersihan lingkungan dan kualitas kebersihan disebabkan perilaku buruk membuang sampah sembarangan dan tidak meningkatnya konsumsi sampah yang dihasilkan oleh manusia.

Sampah merupakan permasalahan global, baik dalam skala nasional maupun internasional. Permasalahan produksi sampah yang meningkat menjadi topik khusus yang selalu menjadi arus utama pemberitaan media-media di wilayah perkotaan. Permasalahan persampahan selalu menimbulkan efek domino bagi munculnya permasalahan-permasalahan baru bagi seluruh masyarakat perkotaan.

Sampah adalah sebagai sisa kegiatan manusia sehari-hari dan/atau proses alam yang berbentuk padat (Undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah). Pertumbuhan penduduk dan aktivitas sosial ekonomi di suatu wilayah mempunyai keterkaitan terhadap meningkatnya jumlah dan jenis sampah. Berbagai aktifitas sosial ekonomi di masyarakat, memunculkan sejumlah sampah non konvensional yang pada gilirannya akan bermuara pada ancaman terhadap keberlanjutan penanganan masalah persampahan. Dalam Statistik Persampahan 2015 Kementerian Negara Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa 36 % merupakan sampah di kota besar dan metropolitan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia menilai persoalan sampah sudah meresahkan. Indonesia bahkan masuk dalam peringkat kedua di dunia sebagai penghasil sampah plastik ke laut setelah Tiongkok. Berdasarkan data Jambeck (2015), Indonesia berada di peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik ke laut yang mencapai sebesar 187,2 juta ton setelah Cina yang mencapai 262,9 juta ton. Berada di urutan ketiga adalah Filipina yang menghasilkan sampah plastik ke laut mencapai 83,4 juta ton, diikuti Vietnam yang mencapai 55,9 juta ton, dan Sri Lanka yang mencapai 14,6 juta ton per tahun (CNN Indonesia:2017). Karena sifatnya yang merupakan barang residu, sampah sering menjadi barang tidak berarti bagi manusia, sehingga menyebabkan sikap acuh tak acuh terhadap keberadaan sampah tersebut. Masyarakat sering membuang sampah sembarangan, seolah-olah mereka tidak memiliki salah apapun. Padahal membuang sampah tidak pada tempatnya merupakan perbuatan tidak menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan.

Sampah bermanfaat jika dimanfaatkan dengan baik dan merugikan jika dibiarkan tanpa ada pengelolaan yang baik. Dampak negatif dari pengelolaan sampah yang tidak tepat akan menyebabkan beberapa kerugian dan bencana. Pengelolaan yang buruk mengakibatkan pencemaran baik pencemaran udara, air di dalam dan atas permukaan tanah, serta munculnya berbagai macam wabah penyakit yang mengancam kesehatan masyarakat. Pola hidup kurang sehat dengan terbiasa membuang sampah yang tidak tepat pada tempatnya, kedepan akan menyebabkan kerugian yang fatal bagi lingkungan sekitarnya.

Permasalahan persampahan merupakan problematika yang sulit terpecahkan dan dicarikan solusi penanganannya. Khususnya bagi kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan dan lain-lain, hampir setiap kota mempunyai permasalahan antara lain permasalahan sampah yang sering menjadi masalah yang cukup pelik bagi kota-kota besar. Tidak terkecuali bagi Kabupaten Bekasi sebagai salah satu kota besar di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk lebih dari 3.805.200 jiwa (BPS, 2020).

Memandang urgensi pengelolaan sampah sebagai salah satu permasalahan penting lingkungan, menjadikan hal ini sebagai perhatian dari pemerintah. Maka melalui fungsi pengaturan atau regulator yang dimiliki oleh pemerintah, sehingga menjadi penting untuk diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Adanya aturan tersebut merupakan suatu bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah berdasarkan problematika pertumbuhan penduduk, pola perilaku konsumtif masyarakat yang menyebabkan peningkatan produksi sampah yang berasal dari aktivitas keseharian masyarakat, serta ancaman yang ditimbulkan akibat adanya sampah itu sendiri. Sebab secara sadar ataupun tidak, setiap hari kita menghasilkan berbagai macam jenis sampah dan Sampah rumah tangga merupakan salah satu jenis sampah yang paling banyak dihasilkan oleh setiap orang, hal ini berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk di perkotaan yang sangat pesat.

Permasalahan-permasalahan umum daerah perkotaan pada umumnya pada persoalan meluasnya permukiman kumuh, menumpuknya sampah, terbatasnya fasilitas umum seperti prasarana air minum dan ruang terbuka hijau, pedagang kaki lima, transportasi, pencemaran udara, meningkatnya kriminalitas dan berbagai

masalah kependudukan yang lain. Namun, masalah pelik yang sulit dipecahkan adalah masalah sampah, mengingat volume sampah yang cenderung terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan permukiman serta keterbatasan lahan untuk pembuangan akhir.

Menindak lanjuti problematika pengelolaan sampah belum optimal, maka pada tahun 2012 kembali Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagai aturan turunan dan teknis mengenai pengelolaan sampah. Dalam peraturan ini didefinisikan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Dalam upaya pemerintah secara lintas sektoral kementerian, pengelolaan persampahan diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 21/PRT/M/2006 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP) dimana pada pasal 2 menyatakan bahwa KSNP-SPP digunakan sebagai pedoman untuk pengaturan, penyelenggaraan, dan pengembangan sistem pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan, baik di tingkat pusat, maupun daerah sesuai dengan kondisi daerah tersebut.

Kebijakan tersebut mengintruksikan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk mengelola persampahan yang memungkinkan terorganisirnya dengan baik melalui pencapaian pelaksanaan program menjadi ramah lingkungan. Menurut Bappenas (2010) mengungkapkan bahwa permasalahan utama di dalam pengelolaan sampah adalah rendahnya akses terhadap layanan pengelolaan sampah.

Kondisi ini menurut Bappenas disebabkan oleh lima faktor (Suwerda, 2012:3), antara lain yaitu:

1. Masih belum memadai perangkat peraturan yang mendukung pengelolaan sampah;
2. Penanganan sampah belum optimal;
3. Minim pengelolaan layanan persampahan yang kredibel dan profesional;
4. Belum optimal sistem perencanaan pengelolaan sampah;
5. Terbatasnya pendanaan untuk mendukung keseluruhan aspek pengelolaan sampah.

Berbagai sumber sampah yang memberikan kontribusi terhadap timbunan sampah Kabupaten Bekasi antara lain berasal dari permukiman, perkotaan, pasar, layanan kesehatan, fasilitas umum. 60-80% sampah kota berasal dari permukiman atau rumah tangga. Dengan luas wilayah sekitar 1.273,88 km² Kabupaten Bekasi menghadapi permasalahan-permasalahan tekanan penduduk terhadap daya dukung lingkungannya.

Produksi sampah masyarakat Kabupaten Bekasi setiap harinya mencapai 2.000 ton/hari. Tidak berhenti disitu saja, masalah yang pasti dihadapi saat ini dan di masa yang akan datang adalah ketika Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang ada sudah tidak mampu lagi menampung sampah yang diproduksi oleh penduduk Kabupaten Bekasi, sedangkan ketersediaan lahan yang bisa digunakan sebagai TPA semakin menyempit. Maka diperlukan sebuah upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Hal ini senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa “Pertambahan penduduk di

Kabupaten Bekasi sangat pesat. Demikian juga dengan dunia usaha. Mereka bakal menghasilkan sampah dalam jumlah yang luar biasa. Saya yakin, lama kelamaan TPA Burangkeng tidak akan mampu menampung sampah yang dihasilkan warga Kabupaten Bekasi”. Pada kenyataannya, pengelolaan sampah dalam kehidupan sehari-hari belum seperti yang diharapkan. Sampah banyak dijumpai dimana-mana tanpa adanya pengelolaan yang baik dan tepat, baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi sebagai penanggungjawab pengelolaan tersebut. Pengelolaan yang buruk ini mengakibatkan pencemaran lingkungan yaitu pencemaran udara, air di dalam dan atas permukaan, tanah, serta munculnya berbagai macam penyakit yang mengancam kesehatan masyarakat.

Sampah telah menjadi salah satu permasalahan Kabupaten Bekasi yang serius. Pemandangan Kabupaten Bekasi terlihat agak kumuh dan semakin parah akibat tumpukan-tumpukan sampah diberbagai sudut kota dan telah mengganggu kenyamanan lingkungan. Pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi masih secara tradisional, dimana penanganannya sebatas pada mengumpulkan dan menumpuknya pada tempat (lahan) pembuangan akhir (TPA), dan belum melakukan proses pengolahan alternatif misalnya menjadi kompos. Pengolahan lanjut sampah yang ada selama ini masih sebatas pemusnahan melalui mesin pembakar (*incinerator*). Agar perencanaan dapat dioperasionalkan, meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dan secara moral serta etika dapat dipertanggungjawabkan maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi telah melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi

sebagaimana tercantum dalam tabel identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi.

Permasalahan sampah di Kabupaten Bekasi menjadi semakin berat, mengingat makin meningkatnya jumlah penduduk dan makin kompleksnya permasalahan sosial masyarakat yang ada. Dalam konteks manajemen kota, hampir setiap kota mempunyai permasalahan pengelolaan sampah, seperti minimnya lahan pembuangan akhir, budaya masyarakat membuang sampah di sembarang tempat, serta minimnya keterlibatan sektor informal.

Manajemen pengelolaan sampah yang masih terbatas, kurang intens dan tidak *sustainable* cukup meresahkan bagi warga Kabupaten Bekasi dan cukup menyita perhatian dari berbagai kalangan. Pemandangan Kabupaten Bekasi yang terlihat kumuh semakin parah dengan tumpukan-tumpukan sampah disudut-sudut kota yang menambah ketidaknyaman lingkungan. Sampah yang bertumpuk dimana-mana, saat ini bukan saja menjadi beban Pemerintah Kabupaten Bekasi tetapi juga masalah bagi semua warga Kabupaten Bekasi.

Permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia sama halnya dengan yang dialami di Kabupaten Bekasi, masih menggunakan paradigma lama yaitu cara kumpul-angkut-buang. *Source reduction* (reduksi mulai dari sumbernya) atau pemilahan sampah tidak pernah berjalan dengan baik. Meskipun telah ada upaya pengomposan dan daur ulang, tapi masih terbatas. Berkaitan dengan sistem pengelolaan persampahan, dasar pengelolaan mesti mengedepankan pada minimalisasi sampah dari sumbernya dan pemanfaatan sampah sebagai sumber energi alternatif. Penanganan sampah tersebut juga harus didukung oleh tingkat

kesadaran masyarakat yang tinggi mengingat perilaku masyarakat merupakan variabel penting. Kebijakan dalam pengelolaan persampahan memiliki landasan kuat agar sampah yang dihasilkan dapat dikelola dengan baik.

Hal ini sejalan dengan pendapat Yunita Ismail (2019) yang menyatakan bahwa :

The paradigm of waste management that relies on the final approach is time to be abandoned and replaced with a new paradigm. The new paradigm is to view waste as a resource that has economic value and can be utilized in the production process to produce other products. Resources that can be generated such as for energy, compost, fertilizer or industrial materials. Waste management is carried out with a comprehensive approach from upstream, since before the waste is produced from products that have the potential to produce waste, down to the downstream, that is, in the product phase it has been used and produces waste disposed of into the environment.

Melihat segala kenyataan yang telah dan sedang terjadi mengenai masalah persampahan tersebut serta efek-efek samping yang lahir setelahnya, maka menjadi penting untuk terdapat campur tangan dari pemerintah di dalam pengelolaan persampahan tersebut. Pemerintah sebagai *stakeholder* penyelenggaraan pemerintahan di negeri ini diharapkan dapat mengambil perannya dalam upaya pemberian pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan essensi dan tujuan dari adanya pemerintahan.

Berkaitan dengan masalah persampahan tersebut, sampah memberikan ancaman bagi masyarakat baik secara fisik maupun psikis. Sampah juga dapat mengurangi dan mengganggu kenyamanan hidup masyarakat, sehingga aktivitas pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat akan terganggu pula. Maka disinilah kita dapat melihat adanya fungsi pemerintah tersebut yaitu menjamin keberlanjutan pemenuhan kebutuhan masyarakat agar dapat berlangsung secara kondusif, tanpa

adanya gangguan berarti dari efek-efek yang ditimbulkan oleh permasalahan persampahan tersebut.

Berdasarkan landasan tersebut, kebijakan pengelolaan sampah antara lain meliputi pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri, pengelolaan sampah dengan menggunakan *sanitary landfill* yang sesuai dengan ketentuan standar lingkungan, dan pengembangan teknologi tinggi pengolahan sampah untuk sumber energi. Adanya kebijakan tentang pengelolaan sampah tersebut diharapkan menghasilkan tata kelola persampahan yang lebih ramah lingkungan dan bahkan dimanfaatkan lagi oleh masyarakat untuk kegunaan yang lain. Pada intinya, kebijakan publik yang telah dirumuskan merupakan pertimbangan dari berbagai segi dan aspek kajian yang begitu mendalam, sudah tentu menginginkan keteraturan dan pengelolaan yang tepat pada prinsip *Good Governance* dan *Good Government*. Penyelenggara pemerintahan dalam membuat regulasi baik ditingkat pemerintah pusat maupun pada tingkatan pemerintahan daerah harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sebagai mana telah diamanatkan oleh Pancasila dan Undang- Undang Dasar Tahun 1945.

Kebijakan publik dalam pengaturan pengelolaan sampah menjadi salah satu fokus urusan pemerintahan yang menjadi ujung tombak dan perhatian serta memberikan pelayanan prima bagi masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang asri. Terutama konsumsi barang habis pakai yaitu sampah yang dihasilkan dari limbah rumah tangga semakin hari semakin besar, otomatis meningkatkan volume produksi sampah rumah tangga. Belum lagi produksi hasil sampah yang dihasilkan Industri- industri baik kecil, menengah dan besar serta limbah-limbah

pabrik jika tidak di atur melalui regulasi pemerintah yang tepat sudah barang tentu menimbulkan permasalahan besar dikemudian hari, menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat merupakan cita- cita besar bagi setiap daerah.

Melihat kondisi empiris yang sama yang juga dialami oleh Kabupaten Bekasi, maka Pemerintah Kabupaten Bekasi juga diharapkan dapat mengambil tindakan terhadap upaya penyelesaian permasalahan persampahan yang sudah semakin mencemaskan tersebut. Oleh sebab itu, telah dilakukan tindak lanjut berupa penetapan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk kebijakan pengelolaan sampah perkotaan.

Sebagai langkah awal tersebut, maka lahirlah inisiatif kebijakan berupa Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah. Dalam kurun waktu mulai dari penetapan Perbup tersebut hingga sampai saat ini, terdapat kekhawatiran terhadap proses menciptakan lingkungan yang bersih, aman dan tertib tersebut bisa terwujud di Kabupaten Bekasi. Pada tahapan aktualisasi dan implementasi kebijakan tersebut, pada kenyataannya kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi tersebut masih belum dapat dikatakan optimal.

Kebijakan publik sebagaimana tujuannya guna menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat, Kebijakan pengelolaan persampahan di Kabupaten Bekasi ini dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah yang memiliki tujuan bagaimana mengatur dan mengelola persampahan di Kabupaten Bekasi agar tepat, menciptakan lingkungan bersih, nyaman dan sehat serta mampu meningkatkan nilai ekonomis kepada masyarakat.

Kebijakan pengelolaan sampah (Suardi dkk, 2018) menyatakan bahwa :

Waste management is one of the public infrastructure to provide the goods or services, and it resembles the electricity, natural gas, and water sector goods and services. Waste management system usually consist some activity like collection, transportation, pretreatment, processing, and final abatement of residues. Waste must be collected separately based on their types. Waste transport can be to some local or regional pre treatment facility, or directly to some regional or national processing facility, such as a waste incineration plant. In Indonesia, there are TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) as one of final processing facility. Local or regional pre treatment may include compressing, sorting, separation, drying, storage and so on. But this treatment can change based on conditions of the country. Today, waste processing often yields some valuable product, such as electricity, compost or synthetic crude oil.

Kapasitas daya tampung Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang kurang memadai, serta armada angkut yang tidak sebanding dengan volume sampah menyebabkan menumpuknya sampah di berbagai tempat sehingga berakumulasi pada sampah yang menggunung. Pemerintah Kabupaten Bekasi telah berupaya memfasilitasi dan menyediakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi, hanya saja pelaksanaannya belum efektif dan optimal. Hal ini dikarenakan debit sampah yang besar dan terus meningkat yang diproduksi setiap harinya oleh warga masyarakat Kabupaten Bekasi. Volume sampah yang diproduksi bisa mencapai 1.955.712,53 liter/hari atau 1.955,05 m³/hari. Lebih banyak 20% daripada data yang dihimpun dan dilaporkan oleh Bappeda Kabupaten Bekasi. Data tersebut menggambarkan bahwa jumlah penimbunan sampah di Kabupaten Bekasi cukup tinggi dengan klasifikasi sampah organik hanya berjumlah 32,98% dan sampah anorganik berjumlah 67,02%.

Pengelolaan persampahan harusnya tidak hanya menjadi milik pemerintah daerah saja, namun merupakan tanggung jawab bersama dengan butuh kepedulian dari semua pihak baik itu swasta maupun masyarakat. Pengelolaan yang baik oleh

Pemerintah Daerah, namun tanpa adanya kepedulian dari masyarakat akan berakibat pada tidak optimalnya penyelesaian permasalahan sampah tersebut. Masyarakat harus sadar bahwa sampah merupakan hasil buah tangan mereka sendiri. Oleh sebab itu, maka dibutuhkan pengendalian diri dan kontrol dari masing-masing pribadi masyarakat tersebut.

Keterlibatan atau dengan kata lain disebut dengan partisipasi dalam suatu kebijakan merupakan salah satu tolak ukur dan indikator keberhasilan suatu kebijakan tersebut. Partisipasi dalam hal ini dapat menunjukkan bahwa masyarakat tertarik dan berminat untuk ikut serta bersama menyelesaikan permasalahan yang menjadi substansi dari kebijakan tersebut. Berbicara tentang partisipasi masyarakat untuk pengelolaan persampahan di Kabupaten Bekasi, hal tersebut dirasakan masih minim. Adanya upaya pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, tidak diiringi dengan kesadaran dan ketertarikan masyarakat untuk menjaga lingkungan mereka dari masalah penumpukan sampah.

Pada tatanan aktualisasi kebijakan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bekasi, hal yang paling mendasar yaitu menciptakan lingkungan yang Bersih, nyaman, rapi, indah dan Sehat. Pemerintah daerah mengatur pengelolaan sampah dengan harapan seluruh stakeholder bersama-sama dan masyarakat menjaga keberlangsungan kondisi lingkungan yang tertata, bersih dan sehat berkelanjutan. Penguatan peran pemerintah daerah dalam upaya menciptakan lingkungan yang kondusif tentu harus sebanding dan sejalan dengan dukungan yang diperoleh dari masyarakat, semakin besar dukungan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan berbanding lurus dengan hasil terciptanya lingkungan yang bersih, nyaman dan

sehat, sebaliknya semakin kecil dan lemah kesadaran masyarakat dalam menjaga dan menciptakan kondisi lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat akan banyak menimbulkan permasalahan dan gejala- gejala lainnya yang timbul akibat dampak kotor dan kumuh suatu daerah.

Wastes are generated due to human activities because they are considered as useless. These wastes are normally solid and the word waste indicates that the material is useless and unwanted. Still many of these materials can be recycled and thus they became resource for industrial production or energy generation, if managed properly. Waste management has become one of the most significant problems in the world. Municipal solid waste management is an obligatory function per the respective municipal acts that govern function and responsibilities of local bodies in India. It is the responsibility of the local bodies to collect, transport and disposes the waste in an environmentally accepted manner. The quantity and characteristics of solid waste vary to a significant extent and cannot be attributes to specific location. The factors that influence the volume and composition are average level of income, population, social behavior, climate changes, industrial production and market for waste materials.

Salah satu penyebab permasalahan pengelolaan sampah yang tidak kunjung selesai di Kabupaten Bekasi dikarenakan oleh adanya pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup signifikan. Pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan setiap tahunnya semakin hari semakin meningkat, berbanding lurus dengan jumlah pertumbuhan perumahan dan pertumbuhan produksi sampah.

Tabel 1.1
Pertumbuhan Penduduk dan Peningkatan Jumlah
Sampah Kabupaten Bekasi 2016-2020

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Sampah (m ³ /tahun)
1	2016	3.358.700	676.586,5
2	2017	3.466.700	695.857,5
3	2018	3.577.200	701.444,0
4	2019	3.690.000	711.267,0
5	2020	3.805.200	728.475,0

Sumber: Olahan Data Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2020

Dengan demikian perlu adanya upaya dan sistem perencanaan yang baik dalam menghadapi permasalahan pengelolaan sampah, jika pengelolaan sampah baik, maka akan terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat, begitu pula jika pengelolaan sampah buruk, maka akan menciptakan lingkungan yang tercemar, lingkungan kotor, tersebar banyak wabah penyakit serta ancaman bencana.

Esensi dari adanya otonomi daerah dan desentralisasi adalah adanya harapan kepada daerah-daerah untuk mampu berkompetisi dalam mengatur dan mengurus segala kebutuhan masyarakatnya, sehingga permasalahan-permasalahan tersebut langsung dapat disentuh dan ditemukan jalan keluarnya (*problem solving*). Kaitannya dengan pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui peraturan bupati tersebut telah mengamanatkan agar permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi dapat diselesaikan dengan baik secara efektif dan optimal.

Namun pada kenyataannya, masih banyak sekali ditemukan perilaku masyarakat yang masih lemah kesadarannya terkait dalam pengelolaan sampah ini. Hal demikian terjadi, karena masih kurangnya sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat tentang kepedulian kebersihan dan kelestarian lingkungan oleh Pemerintah. Sehingga berdampak kepada kurang proaktifnya masyarakat Kabupaten Bekasi menjaga lingkungan yang bersih, terjadi beberapa daerah kumuh, banjir dan pencemaran lingkungan serta volume sampah yang ada di sungai-sungai di wilayah Kabupaten Bekasi.

Hal tersebut bisa berkorelasi dengan kemampuan sumber daya aparatur pemerintah yang rendah dalam menyampaikan pesan-pesan kebijakan melalui sosialisasi dan edukasi tersebut, sehingga substansi kebijakan hanya dipahami oleh

dan di kalangan pemerintah saja. Sumber daya manusia atau aparatur pemerintahan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan sebuah kebijakan publik. Mereka merupakan aktor utama pelaksana program kebijakan, sehingga secara langsung harus mampu memahami dan menginformasikan pesan-pesan guna pencapaian tujuan dan keberhasilan implementasi kebijakan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah yaitu implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi dalam meningkatkan lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat di Kabupaten Bekasi masih belum efektif dan kurang optimal, itu terlihat masih banyak kendala dan harapan yang belum tercapai dari Implementasi kebijakan pengelolaan sampah tersebut.

Bertitik tolak dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi Intervensi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat”.

1.2. Permasalahan

1.2.1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Pertambahan jumlah pertumbuhan penduduk yang pesat mengakibatkan peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan.
2. Peningkatan volume sampah tidak sebanding dengan daya tampung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang sempit.

3. Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi mulai dari hulu ke hilir yang masih menerapkan konsep 3 R (*Reuse, Reduce, dan Recycle*) tidak berjalan optimal karena faktor kurangnya sarana dan prasarana, sehingga jumlah timbunan sampah di TPA jumlahnya semakin meningkat setiap tahunnya.
4. Belum adanya kerjasama dengan pihak ketiga (Swasta) dan masyarakat secara langsung sehingga membebankan anggaran pemerintah Kabupaten Bekasi.
5. Belum adanya pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam penanganan sampah di Kabupaten Bekasi.
6. Belum adanya sosialisasi yang intens dan keterlibatan masyarakat secara langsung tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat di Kabupaten Bekasi.

1.2.2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, dalam penelitian ini penulis membatasi masalah dengan tujuan untuk membatasi pembahasan pada pokok permasalahan penelitian saja. Penelitian ini hanya difokuskan pembahasan tentang Strategi Intervensi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.

1.2.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi dan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi strategi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana Strategi Intervensi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah yang lebih baik Di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data/informasi terkait dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi, sebagai bahan analisis untuk perumusan strategi intervensi pemerintah daerah Kabupaten Bekasi dalam pengelolaan sampah yang lebih baik.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kondisi strategi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui faktor internal dan eksternal yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.

3. Untuk merumuskan strategi intervensi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pengelolaan sampah yang lebih baik di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis :

1.4.1. Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini akan dapat memberikan sumbangsih dalam aspek teoritis (keilmuan) yaitu bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan, khususnya pada aspek implementasi kebijakan pengelolaan sampah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam rangka pengembangan dan penyusunan Kebijakan Pengelolaan Sampah.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Memberikan masukan model baru bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam rangka pengembangan dan penyusunan Kebijakan Pengelolaan Sampah.
2. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi para peneliti berikutnya dalam bidang pengelolaan sampah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Ilmu Pemerintahan

Pemerintahan lahir dari adanya keinginan dan kebutuhan masyarakat terhadap pola kehidupan yang aman, nyaman, tertib dan teratur. Pada awalnya, konsep pemerintahan muncul dengan tujuan pihak-pihak yang duduk dalam struktur pemerintahan hadir untuk mewakili masyarakat (*public representative*) dalam upaya pencapaian tujuan bersama yaitu mewujudkan keteraturan dan kesejahteraan.

Wasistiono dan Simangunsong mengemukakan bahwa perkembangan pemerintahan yang ada saat ini, tidaklah lepas dari eksistensi organisasi pemerintah yang ditempatkan sebagai organisasi untuk melayani kepentingan publik (organisasi sektor publik). Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa esensi dari adanya pemerintah yang diwujudkan kedalam bentuk organisasi pemerintah, walaupun berubah sistem dan polanya mengikuti dinamika perkembangan zaman namun tetap memiliki tujuan utama untuk memberikan pelayanan kepada publik atau masyarakat.

Senada dengan yang penyampaian pandangan sebelumnya, Hamdi menjelaskan bahwa pemerintah adalah alat atau sarana untuk mencapai tujuan negara. Dengan kata lain pemerintah merupakan lokomotif untuk mencapai tujuan negara, yang mana negara (pemerintah) hadir untuk dapat menciptakan suatu situasi

kondisi lingkungan yang tertib dan kesemuanya itu untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintahan adalah bagian dari peran organisasi pemerintah sebagai pelaksana, badan-badan menjalankan pemerintahan baik secara administrasi maupun politik demi tercapainya kesejahteraan rakyat untuk tujuan mulia sebagai organisasi pemerintah hadir memberikan rasa nyaman dan sentuhan rasa tenang dalam sebuah sistem tata laksana pemerintahan.

Sejalan dengan pandangan diatas, Mac Iver memandang pemerintahan dari sudut pandang ilmu politik bahwa : *“Government is the organization of men under authority.... how men can be governed.”* Pandangan tersebut dapat diartikan bahwa pemerintahan merupakan gambaran orang-orang yang memiliki kekuasaan dan bagaimana mereka menggunakan kekuasaan tersebut. Ilmu pemerintahan menurut pandangan Mac Iver, lebih memberikan tekanan pada ilmu politik, dimana lebih menonjolkan persoalan-persoalan kewenangan. Hadirnya pemerintahan secara fundamental adalah untuk memelihara keamanan (*Basic Security*) dan ketentraman umum (*Public Order*) kesemuanya itu bertujuan untuk mewujudkan rasa aman dan nyaman bagi warga Negara dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari.

Menurut Wilson (1903:572) mengatakan *“Government in last analysis, is organized force, not necessarily or invariably organized armed force, but of a few men, of many men, of community prepared by organization to realize its own purposes with references to the common affairs or the community.”* Pandangan Wilson, pemerintah pada akhir uraiannya adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi

dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud dan tujuan bersama mereka, dengan merujuk kepada urusan kelompok atau urusan umum masyarakat.

Menurut Utrecht (1963:28) secara etimologis pemerintahan dapat pula diartikan sebagai tindakan yang terus-menerus (*continue*) atau kebijaksanaan yang menggunakan suatu rencana maupun akal (*rasio*) dan tata cara tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dikehendaki. Adapula yang mendefinisikan pemerintahan adalah sebagai cara, hal dan sebagainya dalam memerintah, sebagaimana diungkapkan oleh Ndraha (1983: 160) bahwa Ilmu Pemerintahan lahir dan berkembang di Belanda pada awal Abad XX dengan nama *bestuurswetenschap* (artinya sama dengan Ilmu Pemerintahan) dan *bestuurskunde* (artinya sama dengan seni pemerintah). Sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintahan itu suatu ilmu dan seni. Sebagai suatu ilmu, maka pemerintahan telah memenuhi syarat-syarat suatu ilmu, seperti memiliki objek kajian, memiliki metodologi yang ilmiah, sistematis, dan universal. Dikatakan sebagai seni karena ada juga pemimpin pemerintahan/orang-orang yang berada dalam pemerintahan yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan pemerintahan. Mereka ternyata mampu menjalankan roda pemerintahan. Kemampuan ini dapat dikatakan sebagai “seni”. di tahun 1970, dalam perkembangannya dikenal tiga sosok Ilmu Pemerintahan, yaitu Ilmu Pemerintahan, Ilmu-Ilmu Pemerintahan, Ilmu Pemerintahan terapan. Yang dimaksud dengan Ilmu-ilmu Pemerintahan adalah ilmu-ilmu yang mempelajari tentang fenomena-fenomena pemerintahan, seperti manajemen pemerintahan, sosiologi pemerintahan, dan lain-lain. Sedangkan Ilmu Pemerintahan Terapan sama

dengan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan. Ini berkaitan dengan fungsi pemerintah, yaitu pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan.

Dalam perkembangannya sebagai ilmu. Ilmu Pemerintahan yang di pelajari sekarang merupakan pengembangan dari konsep yang berasal dari Negara Belanda, dimana Ilmu pemerintahan dikenal dalam 3 bentuk yakni: *Bestuurnswetenschape* (Ilmu Pemerintahan), *bestuurnswetenschappen* (Ilmu-Ilmu Pemerintahan), dan *Bestuurs kunde* (Ilmu Pemerintahan terapan). Berdasarkan pandangan tersebut sebagai ilmu pemerintahan hadir untuk mengamati gejala-gejala pemerintahan pada segenap aspeknya.

Pandangan diatas bisa diartikan lain, bahwa ilmu pemerintahan hanya melakukan studi terhadap jenis kehidupan sosial yang mempunyai sifat khusus yaitu kehidupan sosial. Sifat khusus tersebut muncul karena kegiatan pekerjaan memerintah di dalam suatu pemerintahan itu memerlukan dukungan berupa kewenangan. Dari pandangan tersebut bahwa pemerintahan dapat diartikan sebagai pemerintahan Negara, pemerintahan yang bercirikan publik, atau pemerintahan umum (*Openbaar Bestuur*). Selain itu, lahir pula pengertian pemerintahan yaitu pemegang kekuasaan politik tersebut, sering disebut pula penguasa (*the authority*) sebagai penyelenggara pemerintahan umum. Pemerintahan umum mengelolah keseluruhan masyarakat yang sangat besar jumlahnya, yaitu yang dikenal sebagai kehidupan bersama yang modern. Dengan demikian, pemerintah dan pemerintahan umum merupakan bagian dari dunia kehidupan sosial. Dalam hubungan dengan masyarakat dalam kelompok maka pemerintah membuat berbagai kebijakan, arahan dan aturan.

H. A Brasz (1975 : 1) mengatakan “*De bestuurswetensschap waaronder her verstaat de wetenschap die zich bezighoudt met de wijze waarop de openbare dienst is ingericht en fungtioneeert, intern en naar tegenover de burgers*”. Atau dapat diterjemahkan bahwa, pemerintahan diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan mempunyai fungsi kedalam dan keluar terhadap warganya. Menurut penulis, pandangan Brasz diatas bahwa konsep pemerintahan sebagai cabang ilmu tentang fungsi lembaga pemerintahan kaitannya adalah kemampuan melindungi masyarakat dan yang terkait dengan kepentingan masyarakat yang harus dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pemerintahan.

Dalam penyelenggaraan kepentingan negara pandangan yang dikemukakan oleh C. F Strong (1960 : 6) sebagai berikut :

“Government in the broader sense, is changed with the maintenance of the peace and security of state with in and with out. It must therefore, have first military power or the control of armed forces, secondly legislative power or the means of making laws, thirdly financial power or the ability to extract sufficient money from the community to defray the cost of defending of state and of enforcing the law it makes on the state behalf.”

Pendapat Strong tersebut menjelaskan bahwa pemerintahan dalam arti luas dengan mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara kedalam dan keluar. Oleh karena itu, pertama, harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan mengendalikan angkatan perang, yang kedua, harus mempunyai kekuatan legislative atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan financial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkoskeberadaan negara dalam

menyelenggarakan peraturan,hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara.

Berdasarkan penjelasan diatas perumusan tersebut dapat di simpulkan bahwa ada dua cara pendekatan yang dipergunakan yaitu pendekatan fungsional yang mempelajari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, dan pendekatan struktural yang menelaah lembaga-lembaga dan orang-orang yang melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Dari kedua pandangan tersebut melahirkan memerintah dan pemerintah.

Selanjutnya Wasistiono dan Simangunsong menjelaskan kembali bahwa ilmu pemerintahan memiliki obyek materia sebagai berikut:

1. Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana organisasi tertinggi suatu Negara, yakni pemerintah berhubungan dengan rakyatnya dalam kaitan hak dan kewajibannya yang seimbang. Pemerintah mempunyai kewajiban dan hak kepada warga Negara, sebaliknya warga Negara mempunyai hak dan kewajiban kepada Negara.
2. Pola hubungan yang dilaksanakan antara pemerintah dengan rakyatnya akan sangat tergantung pada bentuk Negara dan sistem politik yang dianutnya. Pada Negara demokratis dengan asas *good governance*, hubungan antara rakyat dengan pemerintahnya bersifat heterarkish. Antara rakyat, sektor pemerintah, dan sektor swasta berkedudukan wajar dengan fungsi yang berbeda. Pada Negara dengan sistem pemerintahan otoriter, hubungan rakyat dengan pemerintahnya bersifat hirarkhis. Pemerintah dalam posisi superior

menguasai dan memerintah rakyat, pada sisi lain rakyat diposisikan sebagai pihak yang diperintah.

Bahwa pada konsep ilmu pemerintahan sebagai mana dijelaskan diatas Pemerintah sebagai organisasi tertinggi berkaitan erat bagaimana ilmu pemerintahan menjadi sebuah disiplin ilmu yang menyeimbangkan rakyat kaitan antara hak dan kewajibannya. Hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara yang sama-sama memiliki kewajiban dan hak bernegara. Selanjutnya pola hubungan yang dilaksanakan antara pemerintah dengan rakyat menitik beratkan pada bentuk Negara dan sistem politik yang dianutnya, pada Negara demokratis hubungan rakyat dengan pemerintahannya bersifat heterarkhis, dapat dikatakan disini adanya pembagian peran setiap unsur Negara, yaitu pemerintah, pihak swasta dan masyarakat memiliki porsi dan fungsi yang berbeda, sedangkan pada negara dengan sistem otoriter hubungan rakyat dengan pemerintahannya bersifat hirarkhis, yaitu kedudukan pemerintah memiliki komando dan dominan memerintah rakyat.

Hamdi menjelaskan bahwa pemerintah adalah alat atau sarana untuk mencapai tujuan Negara. Dengan kata lain pemerintah merupakan lokomotif untuk mencapai tujuan Negara, yang mana Negara hadir untuk dapat menciptakan suatu situasi kondisi lingkungan yang tertib dan kesemuanya itu untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Sehingga penulis menyimpulkan pemerintahan adalah bagian dari peran organisasi pemerintah sebagai pelaksana, badan-badan menjalankan pemerintahan baik secara administrasi maupun politik demi tercapainya kesejahteraan rakyat untuk tujuan mulia sebagai organisasi

pemerintah hadir memberikan rasa nyaman dan sentuhan rasa tenang dalam sebuah sistem tata laksana pemerintahan.

2.1.2. Teori Otonomi Daerah

Guna pencarian pola dan sistem terbaik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan negara, maka digunakanlah beberapa azas-azas penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dikenal adanya dua sistem pemerintahan yang telah diterapkan polanya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, yaitu sistem sentralisasi dan desentralisasi. Dalam beberapa dekade terakhir ini, telah terdapat beberapa kali penyesuaian sistem pemerintahan yang digunakan oleh pemerintah baik pada tingkat pusat maupun daerah oleh adanya akibat dari dinamika perkembangan zaman. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, dan juga optimalisasi dalam pencapaian tujuan pemerintahan.

Memasuki abad ke-21 ini genderang era demokrasi dan keterbukaan informasi, serta peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat semakin digaungkan, Pemerintah Indonesia juga dituntut untuk adaptif terhadap isu-isu global tersebut. Oleh sebab itu, pemerintahan yang sebelumnya lebih banyak menggunakan pola sentralistik didorong untuk mengubah polanya menjadi desentralistik. Paradigma penyelenggaraan pemerintahan pula bergeser dari semula yang bersifat terpusat berubah menjadi peningkatan dan optimalisasi fungsi pemerintahan daerah. Melalui pola desentralistik inilah mulai dikenal beberapa azas

penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang diantaranya yaitu otonomi daerah, desentralisasi, dan juga tugas pembantuan.

Alasan lain dari adanya penggunaan pola desentralisasi yaitu karena adanya kondisi empiris bahwa proses pembangunan di Indonesia sebelumnya, telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan pembangunan antar wilayah di Indonesia yaitu antara wilayah Indonesia Barat dan Indonesia Timur efek dari adanya permasalahan dikotomi pembangunan. Badrudin (2012:3) menerangkan bahwa penyebab kesenjangan tersebut terjadi dikarenakan adanya ketidakmerataan dalam alokasi investasi antarwilayah yang berpengaruh dalam memicu dan memacu ketidakseimbangan dalam pertumbuhan antar wilayah.

Secara etimologis, kata otonomi berasal dari bahasa latin: *auto* berarti sendiri dan *nomein* berarti peraturan, atau undang-undang. Maka *autonom* berarti mengatur sendiri, atau memerintah sendiri, atau dalam arti luas adalah hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah sendiri. Sedangkan menurut UU No. 23 Tahun 2014, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam prosesnya pula, pada penyelenggaraan pemerintahan daerah di Republik Indonesia dikenal beberapa asas-asas diantaranya yaitu desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan tugas

pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintah dengan memberi kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah merupakan realisasi dari ide desentralisasi. Daerah otonom merupakan wujud nyata dan dianutnya asas dekonsentrasi sebagai makna dari desentralisasi itu sendiri.

Menurut Hamdi (2002:68) otonomi daerah disatu sisi memberi kesempatan yang besar kepada pemerintah dan masyarakat daerah untuk mempunyai kewenangan mengatur dan melayani pemenuhan kebutuhan mereka dalam rangka hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat mempercepat perwujudan kesejahteraan tersebut, melalui peningkatan pelayanan di daerah dan pemberdayaan masyarakat atau adanya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah. Sementara upaya peningkatan daya saing diharapkan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan keistimewaan atau kekhususan serta potensi daerah dan keanekaragaman yang dimiliki oleh daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mardiasmo (2002:59) selanjutnya menjelaskan tentang tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan hidup demokrasi, keadilan, pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha- usaha yang sejauh

mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, yaitu:

1. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut dapat diterangkan bahwa otonomi daerah merupakan kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom berupa kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.3. Teori Desentralisasi

Seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika perubahan pranata kehidupan sosial masyarakat, maka berimplikasi pula kepada pergeseran pola ketatanegaraan di Indonesia. Desentralisasi yang juga timbul dari adanya tuntutan suatu gejala sosio politik, memiliki keterkaitan erat dengan administrasi, keuangan, dan politik pemerintahan tersebut. Dalam era sekarang ini desentralisasi seakan telah menjadi kebutuhan yang didasarkan pada alasan-alasan administrasi praktis.

Haris (2007 : 52) menjelaskan bahwa desentralisasi sebenarnya adalah

istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan. Desentralisasi menyangkut dengan pendelegasian kekuasaan (kewenangan) kepada tingkatan yang lebih rendah dalam suatu hirarki teritorial. Desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan, karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia. Sebagaimana telah dijelaskan dalam ketentuan umum UU No. 23 Tahun 2014 bahwa desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Kaho (1997 : 12) tujuan adanya desentralisasi adalah, (a) mengurangi bertumpuknya pekerjaan di Pusat Pemerintahan, (b) dalam menghadapi masalah yang amat mendesak yang membutuhkan tindakan yang cepat, daerah tidak perlu menunggu instruksi lagi dari Pemerintah Pusat, (c) dapat mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk karena setiap keputusan dapat segera dilaksanakan, (d) dalam sistem desentralisasi, dapat diadakan pembedaan dan pengkhususan yang berguna bagi kepentingan tertentu. Khususnya desentralisasi teritorial, dapat lebih mudah menyesuaikan diri kepada kebutuhan dan kebutuhan khusus daerah, (e) mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari Pemerintah Pusat, (f) dari segi psikologis, desentralisasi dapat lebih memberikan kepuasan bagi daerah-daerah karena sifatnya yang lebih langsung.

Desentralisasi terbagi dalam beberapa bentuk kegiatan utama yaitu desentralisasi politik (*devolusi*) dan desentralisasi administrasi (*dekonsentrasi*).

Devolusi menurut Rondinelli dan Cheema (1983) adalah penyerahan tugas-tugas dan fungsi-fungsi kepada sub nasional dari pemerintah yang mempunyai tingkat otonomi tertentu dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi tersebut. Konsekuensi dari devolusi adalah pemerintah pusat membentuk unit-unit pemerintah di luar pemerintah pusat dengan menyerahkan sebagian fungsi tertentu kepada unit-unit untuk dilaksanakan secara mandiri. Sedangkan dekonsentrasi kembali menurut mereka adalah penyerahan tugas-tugas dan fungsi-fungsi dalam administrasi pemerintah pusat kepada unit-unit di daerah.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, bahwa desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah. Haris (2007 : 39) menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Kewenangan otonomi daerah ini dapat dibedakan menjadi 2 yaitu otonomi luas dan otonomi terbatas. Kewenangan Otonomi luas menurut Haris adalah kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Otonomi untuk daerah Propinsi diberikan secara terbatas yang meliputi kewenangan lintas kabupaten dan kota, dan kewenangan yang tidak atau belum

dilaksanakan oleh daerah Kabupaten dan daerah Kota, serta kewenangan bidang pemerintahan lainnya. Pemerintah provinsi secara administratif juga merupakan perpanjangan tangan dari Presiden (pemerintah pusat). Sedangkan dalam Pelaksanaan otonomi yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan kota. Kewenangan Otonomi luas bagi kabupaten dan kota adalah kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Secara konstitusional pemberian otonomi daerah dilakukan dengan mengacu kepada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 di bidang ketatanegaraan, pemerintah Republik Indonesia melaksanakan pembagian daerah-daerah dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Oleh karena itu, pemerintah beberapa kali membentuk Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah. Perubahan-perubahan terlihat karena masing-masing undang-undang menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi waktu terjadinya.

Adanya resistensi terhadap gaya sentralistis dan sekaligus eksploitatif Jakarta (Pemerintah Pusat), serta ketidakpuasan masyarakat di daerah-daerah, ditambah dengan krisis ekonomi yang membuat kemampuan finansial Pemerintahan Pusat melemah membuat Pemerintah Pusat tidak ada pilihan lain kecuali mencoba merebut hati masyarakat di daerah. Hasilnya, Pemerintah Pusat bersedia untuk mendesentralisasikan kewenangannya sebagaimana pada saat itu

ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Terbitnya undang-undang tersebut yaitu dimaksudkan agar mendorong Pemerintah Daerah untuk dapat lebih leluasa dalam memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan optimalisasi peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan representative rakyat di badan legislatif diharapkan dapat benar-benar mewakili suara dan mengamankan kepentingan rakyatnya.

Hamdi (2002:6) menjelaskan bahwa desentralisasi umumnya dipahami bersisi ganda, yakni: meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi pemerintahan nasional dan mengaktualisasikan representasi lokalitas. Hal ini menggambarkan tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan desentralisasi bukan hanya semata berorientasi pada administrasi pemerintahan dalam hal kemudahan pelayanan publik dan memperpendek rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, namun lebih jauh desentralisasi dimaksudkan untuk merepresentasikan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di daerah sebagai identitas asal usulnya. Identitas lokal yang beragam merupakan ciri khas pelaksanaan desentralisasi di Indonesia, sehingga dalam pelaksanaannya desentralisasi di Indonesia harus didesain lebih representatif dan solutif bagi kebutuhan daerah, kepentingan strategis nasional dan keutuhan negara bangsa.

Rondinelli & Cheema (1983) mengatakan sebagai berikut:

...."is the transfer or delegating of planning, decision making or management authority from the central government and its agencies to field

organizations, subordinate units of government, semi-autonomous public corporations, area wide or regional authorities, functional authorities, or non governmental organizations“.

.....”adalah pengalihan atau pendelegasian perencanaan, pengambilan keputusan atau wewenang pengelolaan dari pemerintah pusat dan agensinya ke organisasi lapangan, unit sub-ordinasi pemerintah, koalisi pemerintah semi otonom, otoritas daerah luas atau regional, otoritas fungsional, atau organisasi non-pemerintah”

Terkait dengan konsep penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang menggunakan asas desentralisasi dan otonomi daerah, maka dari penjelasan tersebut dapat ditarik pokok pikiran yang menjelaskan bahwa desentralisasi adalah pelimpahan (*transfer*) kewenangan (*power*) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan juga dari Pemerintah Daerah kepada unit-unit kerja birokrasi yang lebih rendah (dibawah) dalam struktur pemerintahan. Pelimpahan kewenangan tersebut dilaksanakan guna berfungsi secara optimal pemerintahan yaitu dalam fungsi regulasi, fungsi pembangunan, fungsi pelayanan dan fungsi pemberdayaan.

Dalam hal desentralisasi ini, Imawan (2005:40) menjelaskan ”Desentralisasi menghasilkan pemerintahan lokal (*local government*), sebagaimana disana terjadi “*a ‘superior’ government assigns responsibility, authority, or function to ‘lower’ government units that is assumed to have some degree of authority*”. Hal terpenting dari pendapat ini adalah bahwa desentralisasi adalah pembagian kewenangan, sebagaimana fungsi yang memiliki atau menerima wewenang dapat menjalankan roda pemerintahan.

Tekanan demokratisasi dunia sekarang ini menunjuk pada *trend* baru yaitu isu pemerintahan daerah. Alasannya bahwa tidak ada satu pemerintah dari suatu negara yang luas akan mampu secara efektif membuat *public policies* di segala

bidang ataupun mampu melaksanakan kebijakan-kebijakan secara efektif dan efisien di seluruh wilayah negara itu. Demikian halnya di dalam manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pola-pola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik menjadi kurang aktual, sehingga perlu pendekatan desentralistik.

Cheema, Nellis, & Rondinelli (1983:23) menjabarkan bahwa: *“factor to influence the implementation of decentralization policy in developing countries are: 1) environment conditions, 2) inter-organization relationship, 3) available resource and the characteristics of implementing agencies”*. Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan desentralisasi terutama di negara-negara berkembang yaitu: kondisi lingkungan, hubungan dalam organisasi, ketersediaan sumber daya dan karakteristik agen implementasi kebijakan (implementator).

Konsep desentralisasi merujuk pada mekanisme formal dan informal dan aturan yang mengalokasikan wewenang dan sumber daya kebawah diantara berbagai tingkat pemerintah (Aminah, 2014:35). Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa Desentralisasi selalu terkait dengan pemerintah lokal dalam merespon kebutuhan rakyat. Konsep desentralisasi ini lebih mengarah pada pelaksanaan administrasi pemerintahan semata, dimana pelimpahan kewenangan secara administratif dikaitkan dengan kewenangan pemerintah lokal mengelola sumber daya yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk kepentingan daerah, seperti pemenuhan kebutuhan masyarakat di daerah.

Mekanisme yang terbangun dalam pelaksanaan desentralisasi merujuk pada koridor yang dipakai, dimana koridor formal lebih mengarah pada pelaksanaan desentralisasi yang memperhatikan hubungan hirarkis antara tingkatan

pemerintahan, koridor informal merujuk pada aspirasi berbagai stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan desentralisasi, dimana lewat berbagai aspirasi ini akan dirumuskan sebagai kewenangan yang akan dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Koridor aturan mengarah pada berbagai kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah ditingkat bawahnya lewat berbagai peraturan perundang-undangan.

Batasan desentralisasi menurut United Nations (Kertapraja, 2015:62) dijelaskan bahwa “*Decentralization refers to the transfer of authority away from the national capital whether by deconcentration (i.e. delegation) to field offices or by devolution to lokal authorities or lokal bodies*”. Definisi dari United Nations ini mengangkat 2 (dua) sisi desentralisasi yang diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah tingkat bawahnya, yaitu dekonsentrasi, dimana kewenangan dari pemerintah didelegasikan kepada pejabat-pejabatnya di daerah dan devolusi dimana kewenangan didelegasikan kepada perangkat otonomi di daerah.

Jadi, secara teoritis desentralisasi dapat diartikan sebagai aksi pemindahan (pendelegasian) kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Transfer kewenangan tersebut memiliki dua tujuan, yaitu meningkatkan efisiensi administrasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat pusat dan mengaktualisasikan perwakilan lokal juga.

Senada dengan hal itu, Smith (1985 : 9) mengatakan bahwa *the first purpose as deconcentration and devolution for the second one. The base line of decentralization is bringing government closer to the people. Having been closer to the people, government is expected to be more accountable and more responsive in coping with the locality. Besides, it is also expected that government can provide*

public services that is efficient in its process and is suitable in its substances. Briefly, decentralization will ensure the development of democratic and participative government. Subsequently, decentralization will be focused on the capacity and opportunity of locality in fulfilling its aspiration regarding its own initiatives and actions.

Artinya yaitu bahwa tujuan dari adanya desentralisasi yaitu pertama sebagai dekonsentrasi dan yang kedua adalah devolusi. Garis dasar desentralisasi membuat pemerintah lebih dekat dengan masyarakat. Semakin dekat dengan masyarakat, pemerintah diharapkan lebih bertanggung jawab dan lebih responsif dalam menghadapi wilayah tersebut. Selain itu, diharapkan pemerintah dapat memberikan pelayanan publik yang efisien dalam prosesnya dan sesuai dengan substansinya. Secara singkat, desentralisasi akan menjamin pengembangan pemerintahan yang demokratis dan partisipatif. Selanjutnya, desentralisasi akan difokuskan pada kapasitas dan kesempatan lokal dalam memenuhi aspirasi mengenai inisiatif dan tindakannya sendiri.

Dalam pandangan Hung (Ichimura dan Bahl, 2009 : 228) bahwa *“decentralization is the State holds the power which is not concentrated at the center, but places officials at the lokal level to carry out its tasks”*. Desentralisasi merepresentasikan kekuasaan yang dimiliki negara tidak terpusat pada pemerintah, tapi didelegasikan kepada pemerintah ditingkat lokal untuk menyelesaikan berbagai tugas yang melekat pada kewenangan tersebut. Disini tergambar bahwa delegasi yang diberikan kepada pemerintah lokal dalam konsep pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk membantu pemerintah didalam melakukan berbagai tugas

pelayanan kepada masyarakat lokal yang memang akan sangat sulit jika ditangani sendiri oleh pemerintah dengan konsep sentralistik.

Pemberian otonomi kepada daerah merupakan konsekuensi kebijakan desentralisasi teritorial. Wujudnya berupa hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Manifestasinya berupa penyerahan sebagian urusan pemerintahan dan sumber-sumber pembiayaan kepada pemerintah daerah yang pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Ini berarti bahwa prakarsa dan penentuan prioritas serta pengambilan keputusan sepenuhnya menjadi hak, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah.

Lebih lanjut, Bryant & White (1982:213-214) menyatakan bahwa *“decentralization in reality takes two forms, which are administrative and political”*. Desentralisasi administratif biasanya disebut dekonsentrasi yang berarti delegasi wewenang pelaksanaan kepada tingkat-tingkat lokal. Para pejabat tingkat lokal bekerja dalam batas rencana dan sumber-sumber anggaran, namun mereka memiliki elemen kebijakan dan kekuasaan serta tanggung jawab dalam hal sifat hakikat jasa dan pelayanan pada tingkat lokal. Desentralisasi politik (devolusi) berarti bahwa wewenang pembuatan keputusan dan kontrol tertentu terhadap sumber-sumber daya diberikan pada pejabat-pejabat regional dan lokal.

Penjelasan-penjelasan tentang desentralisasi ini dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia tentunya mengacu pada pemahaman yang tertuang dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia yang senantiasa mengandung makna dan pengertian yang berbeda-beda dalam setiap peraturan

perundangan tersebut, sehingga konsistensi pemahaman terkait desentralisasi terkadang menjadi mainan politik suatu rezim.

Pada hakikatnya desentralisasi merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan bernegara, yaitu memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih demokratis serta pada akhirnya bermuara kepada kesejahteraan sosial masyarakat. Menjadi penting bahwa desentralisasi tersebut dapat berhasil atau gagal terlaksana oleh pemerintah guna meningkatkan efisiensi dan kadar responsivitas publik terhadap kepentingan politis dan sosial masyarakatnya. Kegagalan-kegagalan implementasi desentralisasi terutama biasanya ditunjukkan oleh adanya kemunduran ekonomi, ketidakstabilan politik dan merosotnya pelayanan publik (Sidik, 2001:4).

Dari berbagai perbedaan dalam pemahaman urusan/kewenangan yang diserahkan ke daerah, terdapat beberapa poin yang dapat ditarik dari beberapa pengertian tentang desentralisasi dalam beberapa peraturan perundangan diatas adalah :

1. Adanya pemerintah pusat yang memiliki kekuasaan (dalam artian negara Unitarian);
2. Adanya pemerintah daerah atau daerah otonom yang menerima penyerahan wewenang atau urusan dari pemerintah pusat;
3. Wewenang/urusan yang diserahkan menjadi urusan rumah tangga pemerintah daerah;
4. Wewenang/urusan yang diserahkan sebagai bentuk pengakuan otonomi daerah.

Diharapkan dengan adanya desentralisasi ini akan berdampak positif pada pembangunan di daerah-daerah yang selama ini masih tertinggal, sehingga daerah tersebut dapat mandiri dan secara otomatis berimplikasi terhadap kemajuan pembangunan nasional.

Smith (1985:1-2) menjelaskan bahwa desentralisasi merujuk pada distribusi kekuasaan berdasarkan kewilayahan (*teritorial*). Desentralisasi berkenaan dengan sejauhmana kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*) diserahkan melalui suatu hirarki secara geografis dalam negara. Hal ini menggambarkan bahwa desentralisasi teritorial pada dasarnya merupakan desentralisasi yang merepresentasikan wilayah sebagai batasan didalam penyerahan urusan, dan ini yang kemudian dalam pelaksanaan desentralisasi kita mengenal daerah-daerah otonom atau teritorial otonom yang akan disertai berbagai wewenang dan urusan oleh pemerintah untuk menjadi urusan rumah tangganya. Adapun desentralisasi fungsional menggambarkan penyerahan kekuasaan dalam bentuk urusan berdasarkan fungsi tertentu yang pelaksanaannya dibatasi oleh ruang lingkup fungsi tersebut, seperti urusan pertanahan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

Dengan demikian dapat disimpulkan desentralisasi adalah mencakup sejumlah kriteria yang mengacu kepada siapa dan dimana desentralisasi itu dilaksanakan. Bila desentralisasi dipandang pada tingkatan Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota, maka pengertian “*to a locally elected political body, and deconcentration*” merujuk pada keberadaan Pemerintah Desa. Namun bila soalnya “*to either local government or local representatives of the central government*”, maka desentralisasi tertuju pada keberadaan Kecamatan sebagai organisasi satuan kerja perangkat daerah Kabupaten atau Kota. Dengan demikian pelaksanaan asas desentralisasi dapat mencakup pengertian pelimpahan kewenangan pemerintahan (*political decentralitation*) dan pelimpahan urusan administrasi pemerintahan

(*administrative decentralitation*) yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan yang didekonsetrasikan (*function distribute*). Penyelenggaraan sistem desentralisasi kewenangan pemerintahan ini diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Salah satu fase pembuatan kebijakan publik dan intervensi negara mungkin perlu legitimasi desentralisasi dan partisipasi. Pentingnya perbedaan antara desentralisasi dan otonomi, dengan mempertimbangkan desentralisasi dalam konteks struktur kekuasaan yang lebih luas adalah mungkin untuk melihat otonomi dari pemerintah lokal dan regional sebagai bagian konsekuensi dari keputusan pusat untuk membatasi kewenangan lokal, sebagian dari struktur kekuasaan yang membatasi agenda aksi politik yang sah dan sebagian dari struktur hubungan sosial dimana lembaga Negara dirancang untuk mempertahankan.

2.1.4. Teori Strategi

Pengertian Strategi Strategi berasal dari kata Yunani *strategos*, yang berarti Jenderal. Oleh karena itu kata strategi secara harfiah berarti “Seni dan Jenderal”. Kata ini mengacu pada apa yang merupakan perhatian utama manajemen puncak organisasi. Secara khusus, strategi adalah penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengikat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai. Strategi (Tjiptono, 2000:17) adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, dan eksekusi, sebuah aktivitas dalam kurun

waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema mengidentifikasi faktor pendukungnya sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisiensi dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

Strategi menunjukkan arahan umum yang hendak ditempuh oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Strategi ini merupakan rencana besar dan rencana penting. Setiap organisasi untuk mencapai tujuannya. Strategi ini merupakan rencana besar dan rencana penting. Setiap organisasi yang dikelola secara baik memiliki strategi, walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit. Mengenai definisi strategi berikut ini akan disebutkan beberapa definisi: Menurut Alfred Chandler strategi adalah penetapan sasaran dan arahan tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

Menurut Kenneth Andrew strategi adalah pola sasaran, maksud atau tujuan kebijakan serta rencana. Rencana penting untuk mencapai tujuan itu yang dinyatakan dengan cara seperti menetapkan bisnis yang dianut dan jenis atau akan menjadi apa jenis organisasi tersebut. Menurut Buzzel dan Gale (Wahyudi, 1996:19) strategi adalah kebijakan dan keputusan kunci yang digunakan untuk manajemen, yang memiliki dampak besar pada kinerja keuangan. Kebijakan dan keputusan ini biasanya melibatkan sumber daya yang penting dan tidak dapat diganti dengan mudah. Menurut Konichi Ohine (Wahyudi, 1996:19) strategi bisnis adalah keunggulan bersaing satu-satunya maksud perencanaan memperoleh, seefisien mungkin, kedudukan paling akhir yang dapat dipertahankan dalam menghadapi pesaing-pesaingnya. Jadi, strategi perusahaan merupakan upaya mengubah

kekuatan perusahaan yang sebanding dengan kekuatan pesaing-pesaingnya, dengan cara yang paling efisien.

Menurut Griffin (Anoraga, 2009:339) strategi adalah rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. (*Strategi is a comprehensive plan for accomplishing an organization's goals*). Soedrajat (1994:17) menjelaskan bahwa strategi adalah rencana yang menyeluruh dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Bagi perusahaan, strategi diperlukan tidak hanya untuk memperoleh proses sosial dan manajerial dengan mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain. Strategi merupakan faktor yang paling penting dalam mencapai tujuan perusahaan, keberhasilan suatu usaha tergantung pada kemampuan pemimpin yang busa dalam merumuskan strategi yang digunakan. Strategi perusahaan sangat tergantung dari tujuan perusahaan, keadaan dan lingkungan yang ada. Strategi adalah keseluruhan upaya, dalam rangka mencapai sasaran dan mengarah pengembangan rencana marketing yang terinci (Kotler, 1997:8).

Manajemen strategi terdiri dari tiga tahap, yaitu: perumusan strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi. Perumusan strategi terdiri dari pengembangan misi bisnis, identifikasi faktor eksternal (peluang dan ancaman), menentukan faktor internal (kekuatan dan kelemahan), menyusun tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi yang tepat untuk dilaksanakan. Disamping itu, dari pengertian manajemen strategik tersebut dapat disimpulkan beberapa karakteristiknya sebagai berikut:

1. Wujud manajemen strategik berupa perencanaan yang dituangkan dalam rencanastrategik dan rencana operasional dan program kerja.
2. Rencana Strategik berorientasi pada jangkauan masa depan (jangka panjang), rencana operasional ditetapkan untuk rencana jangka menengah dan programprogram kerja untuk rencana jangka pendek.
3. Visi, Misi, dan Tujuan Strategis organisasi merupakan acuan untuk merumuskan rencanastrategis.
4. Rencana strategis dijabarkan menjadi rencana operasional yang berisi programprogramoperasional dengan sasaran jangka pendek.
5. Penetapan rencana strategis dan rencana operasional harus melibatkan manajemen puncak.

Pelaksanaan strategi yang tertuang dalam program kerja harus dilakukan melalui fungsi-fungsi manajemen yang mencakup pengorganisasian, pelaksanaan (actuating), penganggaran, dan kontrol.Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

Konsep mengenai strategi terus berkembang, di tunjukkan oleh adanya beberapa konsep menurut para ahli mengenai strategi menurut Dirgantoro (2001: 15) dalam bukunya *Manajemen Stratejik. Konsep, Kasus, dan Implementasi*, mengatakan strategi adalah hal menetapkan arah kepada manajemen, dalam arti tentang sumber daya di dalam bisnis dan tentang bagaimana mengidentifikasi

kondisi yang memberikan keuntungan terbaik untuk membantu memenangkan persaingan di dalam pasar. Dengan kata lain, definisi strategi mengandung dua komponen yaitu, *future intentions* atau tujuan jangka panjang dan *competitive advantage* atau bersaing.

Siagian (2004: 16) juga berpendapat bahwa strategi berarti menentukan misi pokok suatu organisasi secara garis besar. Dari uraian tersebut, strategi disimpulkan sebagai suatu tujuan atau misi pokok yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dengan arah jangka panjang dan memiliki sasaran. Strategi adalah sejumlah keputusan dan aksi yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan (*goal*) dan menyesuaikan sumber daya organisasi dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan industrinya. Dengan demikian, beberapa ciri strategi yang utama adalah (1) *goal directed actions* yaitu organisasi dan bagaimana mengimplementasikannya; (2) mempertimbangkan semua kekuatan internal (sumber daya dan kapabilitas), serta memperhatikan peluang dan tantangan (Kuncoro 2005: 12).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, (1995: 859) strategi mempunyai empat pengertian, yaitu :

1. Ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa(-bangsa) untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu d1 perang dan damai;
2. Ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang, dalam kondisi yang menguntungkan: sebagai komandan ia memang menguasai betul seorang perwira di medan perang;
3. Rencana yg cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus;

4. Tempat yg baik menurut siasat perang.

Robert H. Hayes dan Steven C. Wheelwright telah mengidentifikasi lima sifat pokok strategi yaitu:

1. Waktu, pada umumnya kata strategi digunakan untuk melukiskan kegiatan yang meliputi waktu dalam arti yang luas, menyangkut baik waktu yang dicapai untuk melaksanakan kegiatan tersebut maupun waktu yang digunakan untuk mengamati dampaknya.
2. Dampak, meskipun akibat yang ditimbulkan karena mengikuti strategi tertentu belum terlihat jelas sekalipun dalam jangka waktu yang lama, namun dampak akhirnya akan sangat berarti.
3. Pemusatan Upaya, sebuah strategi yang efektif biasanya memerlukan pemusatan kegiatan sempit, upaya, atau perhatian seseorang pada tujuan yang agak.
4. Pola-pola keputusan.
5. Daya meresap, sebuah strategi mencakup spectrum aktivitas yang luas.

Kelima sifat ini jelas menunjukkan bahwa strategi sebuah organisasi merupakan inti yang menjadi pusat dari semua kegiatan utama lainnya dari sebuah organisasi. Strategi bersifat jangka panjang dan mencakup banyak hal. Ia meresapi dan mengendalikan semua tindakan penting organisasi, dan merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi dikemudian hari.

Dalam bagian ini akan membahas tentang berbagai cara penyusunan strategi. Mintzberg (dalam Della Faradilla Juwita, 2014) memberikan tiga cara pembuatan strategi yaitu; 1) cara wiraswasta; 2) cara adaptif; 3) cara perencanaan.

1. Dalam cara wiraswasta, seorang pemimpin yang kuat umumnya pendiri kegiatan usaha yang bersangkutan, mengambil keputusan yang berani dan penuh resiko secara intuitif, yaitu dengan cara mengandalkan pertimbangan pribadi yang dibentuk oleh pengalamannya. Dengan kekuasaannya yang terpusat ditangan eksekutif kepala organisasi wiraswasta dimotivasi terutama oleh satu tujuan tunggal pertumbuhan konstan. Penyusunan strategiditentukan oleh pencarian terhadap peluang baru secara aktif dengan pilihan yang diarahkan oleh rencana pribadi pimpinan untuk

- melakukan serangan.
2. Cara adaptif dikenal sebagai “ilmu melakukan terobosan”. Apabila wiraswastawan/birokrasi menghadapi lingkungannya sebagai kekuatan yang harus ditakhlukan, maka manajer/pimpinan yang adaptif hanya menanggapi setiap situasi yang muncul. Apabila dalam organisasi wiraswasta/birokrasi strategi cenderung terdiri atas lompatan-lompatan besar ke depan untuk menghadapi ketidakpastian, maka organisasi adaptif melangkah secara hati-hati dengan gerakan kecil yang terputus-putus. Apabila seorang manajer/pemimpin terus berusaha mengalahkan pesaingnya, manajer/pemimpin adaptif cenderung mengambil sikap bertahan menghadapi tindakan pesaingnya. Perbedaannya terletak pada alpanya sumber pusat kekuasaan. Karena terperangkap dalam jaringan tuntutan pihak-pihak yang terkait yang saling bertentangan, manajemen tidak selalu dapat menyatakan sasarannya dengan jelas. Ini mungkin akan menghasilkan strategi yang bersifat reaktif dan fragmentatif, yang akhirnya menambah fleksibilitas yang menentukan sebagian besar kemampuan organisasi untuk mengatasi kekakuan.
 3. Cara perencanaan, cara atau model ini memberikan kerangka pedoman dan petunjuk arah yang tegas yang tidak dimiliki oleh kedua cara yang lain. Dalam cara ini, para perencana tingkat puncak mengikuti suatu prosedur yang sistematis yang mengharuskan mereka menganalisis lingkungan dan organisasi sehingga dapat mengembangkan suatu rencana untuk menyongsong masa depan. Meskipun para perencana juga harus mengambil keputusan yang mengandung resiko, pilihan mereka bersifat sistematis dan tersusun, yang didasarkan pada suatu perkiraan yang rasional mengenai peluang dan ancaman yang ada dalam lingkungannya dan yang disesuaikan dengan misi dan kemampuan organisasi.

Perencanaan strategis adalah sebuah proses pemilihan tujuan organisasi, penentuan kebijakan dan program yang diperlukan untuk mencapai sasaran tertentu dalam rangka mencapai tujuan, dan penetapan metode yang dibutuhkan guna menjamin agar kebijakan dan program strategis itu dapat dilaksanakan. Definisi yang komprehensif ini dapat dipadatkan menjadi lebih pendek, perencanaan strategis adalah proses perencanaan jangka panjang yang bersifat formal untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi. Kondisi saat ini, perencanaan strategis menjadi semakin penting bagi satu organisasi pemerintah. Rencana strategis memberikan kerangka kerja bagi kegiatan organisasi untuk berfungsinya secara baik dan semakin lebih tanggap

guna perkembangan dan kemandirian jangka panjang organisasi tersebut. Dalam perencanaan strategis membantu manajer/pimpinan mengembangkan konsep yang jelas, merumuskan rencana program dan kegiatan yang tepat sasaran. Pada perencanaan strategis terdapat kelebihan dan kekurangannya yaitu :

1. Kelebihan perencanaan strategis memberikan pedoman kepada pimpinan OPD untuk menjabarkan tujuan organisasinya secara jelas, lengkap dengan metode untuk mencapainya. Disamping itu, membantu pimpinan mengantisipasi masalah sebelum ia menjadi berlarut-larut. Sedangkan manfaat penting lainnya, membantu pimpinan OPD mengenali peluang yang mengandung risiko dan peluang yang aman dan memilih peluang yang terbaik. Di samping itu, para pimpinan lebih banyak mencari dan mendapatkan informasi yang mereka butuhkan untuk mendapatkan keputusan yang tepat.
2. Kekurangan perencanaan strategis adalah bahaya terciptanya birokrasi besar dan para perencana dapat kehilangan hubungan dengan objek sasaran program.

Selanjutnya untuk menemukan strategi dalam Strategi Intervensi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. peneliti menggunakan analisis ASOCA yaitu kepanjangan dari (*Ability, Strength, Opportunities, Culture and Agility*). Menurut Suradinata (2014: 18) mengatakan analisis ASOCA menambahkan unsur *culture* (budaya) dan *agility* (kecerdasan) sebagai unsur yang penting dalam menemukan strategi pemecahan masalah,

pengambilan keputusan, dan dapat dikembangkan dalam mengikuti perubahan, perkembangan zaman, dan kebutuhan.

Seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan dalam pengambilan suatu keputusan dengan menggunakan analisis-analisis yang tajam dalam berpikir, supaya sebuah keputusan yang diambil bisa dipertanggungjawabkan. Dalam menggunakan teknik analisis ini diperlukan terlebih dahulu mengetahui faktor-faktor yang menjadi bagian dari masing-masing unsur tersebut. Alasan peneliti menggunakan teknik analisis ini yaitu karena terdapat unsur budaya (*culture*) yang dilihat. Hal ini sangat cocok digunakan Strategi Intervensi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, dengan masyarakatnya yang beraneka ragam suku bangsa, adat budaya, dan bahasa yang berbeda-beda. Selanjutnya Suradinata (2014: 20) menjelaskan analisis ASOCA yang cocok dengan negara Indonesia yang majemuk dan memiliki letak yang strategis di dunia dalam sebuah matriks yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Matriks Analisis
ASOCA

FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL	ABILITY (KEMAMPUAN)	STRENGTHS (KEKUATAN)	AGILITY (KECERDASAN)
OPPORTUNITIES (PELUANG)	(A) MENGGUNAKAN KEMAMPUAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG	(C) MENGGUNAKAN KEKUATAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG	(E) MENGGUNAKAN KECERDASAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG
CULTURE (BUDAYA)	(B) MELIHAT KEMAMPUAN UNTUK MENGHADAPI TUNTUTAN LINGKUNGAN BERBUDAYA	(D) MENGGUNAKAN KEKUATAN UNTUK TANGGAP TERHADAP PENGARUH PERUBAHAN BUDAYA	(F) MENGGUNAKAN KECERDASAN UNTUK MENSIASATI PENGARUH PERUBAHAN BUDAYA

Sumber : Suradinata (2014:20)

Berdasarkan tabel 2.1 tersebut menampilkan matrik 11 kotak yang melihat organisasi dari faktor internal organisasi yaitu *ability*, *strengths*, dan *agility* serta melihat dari faktor eksternal yaitu *opportunities* dan *culture*. Enam kotak lainnya merupakan tindakan yang harus dilakukan organisasi ketika faktor internal organisasi diperhadapkan dengan faktor eksternal. Adapun penjelasan dari analisis tersebut, sebagaimana ditulis oleh Suradinata (2014: 18) adalah sebagai berikut:

1. *Ability* (kemampuan)
Kemampuan berasal dari kata “mampu” yang berarti kuasa (bisa, sanggup) melakukan sesuatu, dapat juga orang yang berada atau kaya, mempunyai harta berlebih, kemampuan juga dapat diartikan kesanggupan, kecakapan, kemampuan diri sendiri.

2. *Strength* (kekuatan, ketangguhan)
Ketangguhan berasal dari kata “tangguh” yang berarti sukar dikalahkan, kuat sekali, tabah dan kuat, kukuh. Ketangguhan berarti pula kekuatan, keuletan.
3. *Opportunity* (peluang)
Peluang berarti ruang gerak, baik yang bersifat konkret maupun abstrak dan memberikan kesempatan, kemungkinan untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi usaha untuk mencapai cita-cita tujuan dan program.
4. *Culture* (budaya)
Budaya berarti pikiran, akal budaya, hasil, adat istiadat, dan sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang (beradab, maju) atau sesuatu yang menjadi kebiasaan yang sulit diubah karena kesepakatan dalam lingkungan tertentu yang terus menerus dipelihara. Dengan adanya budaya orang akan maju dan modern dan selalu hidup pada zamannya.
5. *Agility* (kecerdasan)
Kecerdasan berasal dari kata ‘cerdas’ yang berarti sempurna perkembangan akal budi, tajam pikiran, kesempurnaan akal budainya, ketajaman pikiran dan kepandaian. Kemampuan saja tidak cukup, harus dengan kecerdasan dalam mengelola pikir, menganalisis suatu informasi untuk dijadikan bahan putusan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, yang membedakan analisis ASOCA dengan yang lain yaitu pada *Culture* (budaya) dan *Agility* (kecerdasan). Dengan adanya budaya orang akan maju dan modern dan selalu hidup pada zamannya, sedangkan kecerdasan berasal dari kata cerdas’ yang berarti sempurna perkembangan akal budi, tajam pikiran, kesempurnaan akal budinya, ketajaman pikiran dan kepandaian. Kecerdasan harus bisa dalam mengelola pikir, menganalisis suatu informasi untuk dijadikan suatu bahan putusan.

2.1.5. Pengelolaan Sampah

Sampah tidak pernah lepas dari lingkungan sekitar kita, Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaurulangan, atau pembuangan dari material sampah. Sampah biasanya dihasilkan dari kegiatan

manusia dan juga biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, dan keindahan alam. Menurut Murthado dan Said (1997) pengelolaan sampah perkotaan adalah dengan cara membuang sampah sekaligus memanfaatkannya sehingga selain membersihkan lingkungan juga menghasilkan kegunaan baru. Pandangan diatas menjelaskan begitu bermanfaatnya sampah jika pengelolaan sampah dilakukan dengan baik. Mampu menambah nilai-nilai baik kemanfaatan maupun nilai ekonomis.

Senada dengan penjelasan diatas, pengelolaan sampah menurut UU No.18 Tahun 2008 adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Yaitu kegiatan pengelolaan secara massif dan terstruktur secara berkesinambungan agar hasil produksi sampah menjadi baik yang akan mempengaruhi tingkat kualitas lingkungan yang bersih, suasana yang nyaman dan lingkungan bersih serta mampu menjadi manfaat dan berdaya guna serta tepat guna. Pengertian pengelolaan bukan hanya menyangkut aspek teknis, tetapi mencakup juga aspek non teknis, seperti bagaimana mengorganisir, bagaimana membiayai dan bagaimana melibatkan masyarakat penghasil limbah agar ikut berpartisipasi secara aktif atau pasif dalam aktivitas penanganan tersebut.

Suparmoko (2013:312) menggambarkan terkait kegiatan manusia yang selalu menghasilkan sampah, sampah merupakan masalah besar yang di hadapi oleh kota-kota besar di Indonesia. Pandangan ini menjelaskan keadaan empiris yang saat ini terjadi, adalah bagaimana semua aktivitas manusia selalu menghasilkan sampah, sampah merupakan permasalahan yang besar bagi setiap

daerah yang ada di Indonesia. Permasalahan sampah merupakan permasalahan bersama baik itu pemerintah sebagai proses pengambil kebijakan, pihak swasta sebagai pendukung dan penghasil sampah serta masyarakat yang merupakan produsen terbesar produksi sampah. Selain itu berbanding lurus antara jumlah penduduk dengan jumlah produksi sampah, sehingga pandangan suparmoko mengatakan masalah yang sangat kompleks mengenai sampah yaitu masalah besar yang dihadapi oleh daerah kota- kota besar di Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, yang dimaksud dengan penghasil sampah menurut UU No.18 Tahun 2008 yaitu setiap orang atau kelompok orang atau badan hukum yang menghasilkan timbulan sampah. Oleh karena itu, setiap manusia memproduksi sampah baik di kalangan sampah yang dihasilkan dari rumah tangga, maupun yang dihasilkan oleh kelompok orang atau badan hukum, perusahaan dan kantor pemerintah yang menghasilkan timbulan sampah.

Pengelolaan sampah kota merupakan bagian dari pengelolaan kebersihan kota. Pengertian bersih sebenarnya bukan hanya berarti tidak adanya sampah, melainkan juga mengandung pengertian yang mengarah ke tinjauan estetika.

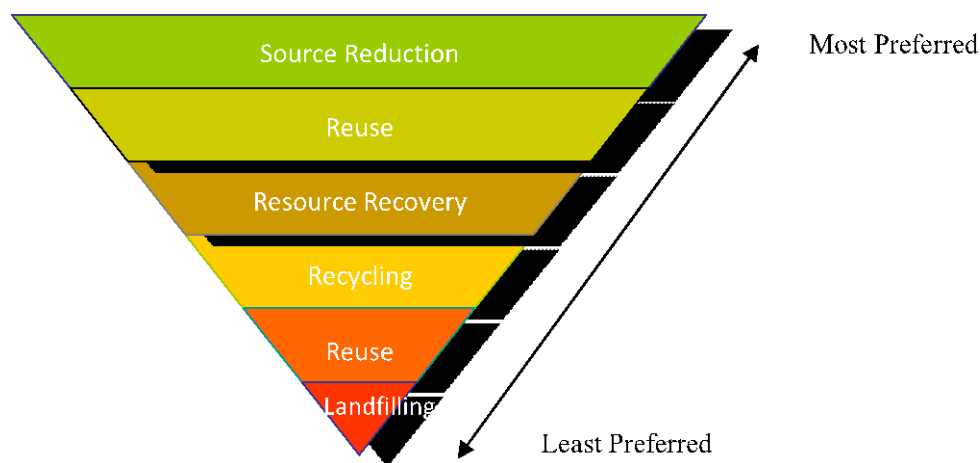
Secara ekonomi akan Mengurai biaya penanganannya. Disini ditunjukan bahwa sampah sebagai sumber daya yang mempunyai manfaat dan nilai guna serta ekonomis setelah diolah. Sampah merupakan sesuatu yang tidak berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya atau pemakai semula. Dari pandangan tersebut sehingga sampah dapat dirumuskan sebagai bahan sisa dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Sampah yang harus dikelola tersebut meliputi sampah yang Dihasilkan dari: 1) rumah tangga, 2) kegiatan komersial: pusat perdagangan, pasar, pertokoan,

hotel, restoran, tempat hiburan, 3) fasilitas sosial: rumah ibadah, asrama, rumah tahanan/penjara, rumah sakit, klinik/pukesmas, 4) fasilitas umum: terminal, pelabuhan, bandara, halte kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar, 5) industri, 6) fasilitas lainnya perkantoran, sekolah, 7) hasil pembersihan saluran terbuka umum, seperti sungai, danau, pantai, Dalam pernyataan diatas bahwa pengelolaan sampah merupakan suatu manajemen yang terdiri dari berbagai tahapan sehingga pengelolaan sampah ini mempunyai proses dan tujuan namun pengelolaan tersebut melihat jenis dan karakter sampah yang ada ataupun dihasilkan.

Menurut pandangan penulis, sampah merupakan residu kegiatan konsumtif manusia yang dari penggunaan konteks isi dan substansi dapat diolah menjadi barang-barang yang berguna, menghasilkan tempat dan bekas barang yang tidak berguna dari barang yang telah dipakai atau digunakan tersebut, hanya bagaimana cara manusia memanfaatkan sebelum menjadikan barang yang tidak berguna tersebut kembali menjadi komponen yang bermanfaat. Oleh karena itu, perlunya pemahaman bagi kita semua untuk menjaga bagaimana produksi sampah mampu kita tekan dengan baik dan mampu kita uraikan dari yang masih bias dimanfaatkan hingga sampah yang tidak lagi mampu dimanfaatkan menjadi sampah tidak produktif.

Prinsip umum hirarki pengolahan sampah memprioritaskan praktek pengelolaan sampah untuk meminimalkan dampak lingkungan dan kesehatan. Hirarki pengolahan sampah menampilkan urutan sistem pengelolaan sampah seperti berikut :

Gambar 2.1
Hirarki Pengelolaan Sampah



Waste Material Utilization: Reuse, Recycle, Energy Recovery

Lebih lanjut terkait terkait gambar sebagaimana tersaji pada gambar 2.1 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Source reduction*, Pengurangan sumber merupakan sistem pengolahan yang bersahabat dengan lingkungan karena menghindari penumpukan sampah. Pengurangan atau meminimalkan jumlah sampah sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir. Pengurangan sumber dapat dilakukan dengan melakukan dalam desain produk, manufaktur, *Environmentally Preferable Purchasing* (EPP), dan penggunaan bahan atau produk untuk mengurangi jumlah produk atau kemasan.
2. *Reuse*, Bahwa limbah dibuang dapat digunakan kembali dalam bentuk aslinya atau produk baru. Misalnya, furnitur, sepeda, kain, sepatu, buku, dll dapat digunakan kembali sebagai produk kedua tangan dengan melakukan perbaikan dan menyumbangkan pada yang membutuhkannya.

3. *Recycling*, Daur ulang yaitu pengurangan sumber dan penggunaan kembali dalam hirarki pengelolaan sampah. Daur ulang (termasuk kompos) yang mana sumber daya yang terkandung dalam sampah dapat digunakan setelah dilakukan pemrosesan sampah tersebut. Disamping itu hasil proses pengolahan sampah dapat menghasilkan produk baru sebagai energi atau sumber yang memberikan manfaat ekonomi serta kurangnya dampak lingkungan yang ditimbulkan.
4. *Resource recovery*, Pemilihan sampah sebagai pembuatan kompos dan anaerobik/biogas yaitu suatu proses yang dilakukan sebelum pembakaran dan penimbunan karena metode ini menghasilkan energi dari residu sampah melalui proses yang menghasilkan energi.
5. *Incineration*, Insinerasi yaitu pengolahan sampah dengan pembakaran dan mengkonversi sampah menjadi abu, gas buang dan panas. Hal ini penting dilakukan untuk menghilangkan bahan berbahaya atau didaur ulang sebelum pembakaran.
6. *Landfilling*, Pengolahan sampah dengan cara penimbunan di tempat pembuangan akhir. Secara historis, pengolahan ini adalah metode tertua dan paling umum digunakan serta masih tetap di banyak negara di seluruh dunia. Penimbunan bisa menyebabkan sejumlah dampak lingkungan dan sosial yang merugikan, seperti udara, air dan polusi tanah, produksi metana oleh membusuknya sampah organik dan penyebaran penyakit.

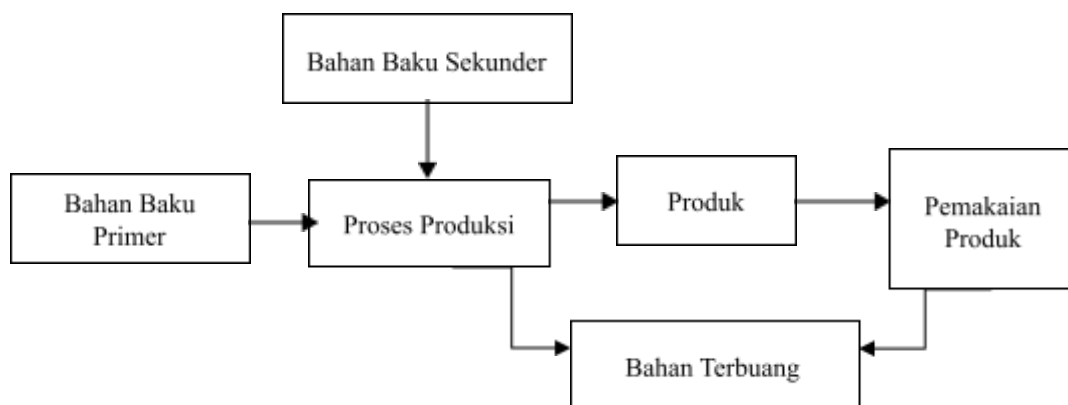
Terdapat keterkaitan antara bahan baku, energi, produk yang dihasilkan dan limbah dari sebuah proses industri, maupun aktivitas manusia sehari-hari.

Bahan

terbuang (limbah) dapat berasal dari proses produksi atau dari pemakaian barang-barang yang dikonsumsi, yang dapat digambarkan sebagai berikut (Gambar 2.1). Dengan mengenal keterkaitan tersebut, maka akan lebih mudah mengenal bagaimana limbah terbentuk dan bagaimana usaha penanggulangannya.

Banyak cara untuk mengidentifikasi limbah dengan tujuan utama untuk mengevaluasi resiko yang mungkin ditimbulkan dan untuk mengevaluasi cara penanganannya.

Gambar 2.2
Limbah Terbentuk



1. Limbah yang berasal dari bahan baku yang tidak mengalami perubahan komposisi baik secara kimia maupun biologis. Mekanisme transformasi yang terjadi hanya bersifat fisis semata seperti pemotongan, penggergajian, dan sebagainya. Limbah kategori ini sangat cocok untuk dimanfaatkan kembali sebagai bahan baku. Sampah kota banyak termasuk dalam kategori ini.
2. Limbah yang terbentuk akibat hasil samping dari sebuah proses kimia, fisika, dan biologis, atau karena kesalahan ataupun ketidak-optimuman proses yang berlangsung. Limbah yang dihasilkan mempunyai sifat yang berbeda dari bahan baku semula. Limbah ini ada yang dapat menjadi bahan baku bagi

industri lain atau sama sekali tidak dapat dimanfaatkan. Usaha modifikasi proses akan mengurangi terbentuknya limbah jenis ini

3. Limbah yang terbentuk akibat penggunaan bahan baku sekunder, misalnya pelarut atau pelumas. Bahan baku sekunder ini tidak ikut dalam reaksi proses pembentukan produk. Limbah ini kadangkala sangat berarti dari sudut kuantitas dan merupakan sumber utama dari industrial waste water. Teknik daur ulang ataupun penghematan penggunaan bahan baku sekunder banyak diterapkan dalam menanggulangnya
4. Limbah yang berasal dari hasil samping proses pengolahan limbah. Pada dasarnya semua pengolah limbah tidak dapat mentransfer limbah menjadi 100% non limbah. Ada produk samping yang harus ditangani lebih lanjut, baik berupa partikulat, gas, dan abu (dari insinerator), lumpur (misalnya dari unit pengolah limbah cair) atau bahkan limbah cair (misalnya dari lindi sebuah lahan urug).
5. Limbah yang berasal dari bahan samping pemasaran produk industri, misalnya kertas, plastik, kayu, logam, drum, kontainer, tabung kosong, dan sebagainya. Limbah jenis ini dapat dimanfaatkan kembali sesuai fungsinya semula atau diolah terlebih dahulu agar menjadi produk baru. Sampah kota banyak terdapat dalam kategori ini.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang ini merupakan bentuk dari pengembangan yang dilakukan terhadap penelitian-penelitian yang telah lebih dahulu ada, penelitian ini memiliki

titik kesamaan yaitu pada segi tema yang diangkat tentang pembentukan suatu kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menjadikan beberapa judul penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan dan referensi dalam proses penyusunan penelitian ini, hasil penelitian terdahulu yang relevan menjadi acuan studi adalah hasil penelitian yang dilaksanakan oleh :

1. Disertasi Horas M. Panjaitan dengan Judul: Tata Kelola Kolaboratif Penanganan Sampah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019, Program Doktor Ilmu Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta.

Secara konseptual berangkat dari fenomena yang berkembang era paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan adanya dinamika pemerintahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, diperlukan suatu proses tata kelola kolaborasi dengan melibatkan sektor *privat*, masyarakat dan *stakeholders* terkait lainnya dalam memecahkan berbagai persoalan di bidang pemerintahan, terutama kolaborasi penanganan masalah sampah. Kami berpendapat, penelitian tentang tata kelola kolaboratif sangat relevan dan aktual mengingat masalah penanganan sampah di perkotaan. Pada prinsipnya kolaborasi ini bersifat menguntungkan semua pihak dalam hal sumber daya, karena memunculkan potensi untuk saling berbagi dan memanfaatkan dengan adanya keterbatasan sumberdaya yang dimiliki, inilah yang disebut *capacity for join action* sebagai salah satu dari elemen *collaborative government*.

Dalam pembahasan dimensi tata kelola kolaboratif, menggunakan teori Anshell dan Gash (2007). Temuan dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai dasar model kelembagaan tata kelola kolaboratif dalam penanganan sampah

modern di daerah, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengayaan terhadap teori manajemen pemerintahan, dan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi tentang pentingnya dimensi tata kelola kolabotaif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kolaborasi yang dilakukan dalam konteks tata kelola kolaboratif mencakup:

1) Tujuan dan sasaran kolaborasi dengan BUMD dan Mitra Usaha dalam penyelesaian permasalahan pembangunan WTE/ITF, 2) Komunikasi yang dibangun dengan *stakeholders* dalam penyamaan pemahaman untuk mengatasi berbagai hambatan dan kendala termasuk Amdal dan partisipasi masyarakat dan NGO serta *stakeholders* lainnya, 3) Memperjelas keterlibatan dan kesetaraan proses pengambilan keputusan bagi aktor terkait, bukan bersifat konsultasi, 3) Membangun komitmen bersama *stakeholders* terkait untuk bekerjasama dengan keteguhan hati untuk melanjutkan apa yang sudah disepakati bersama secara demokratis, 4) Adanya kejelasan siapa yang terlibat dan bertanggungjawab dengan memegang teguh prinsip transparansi dan akuntabilitas, menggunakan desain penelitian kualitatif . Hasil temuan Penelitian:

- a. Tata kelola kolaboratif Pemprov DKI Jakarta dengan badan usaha dalam penanganan sampah untuk pembangkit listrik atau *Intermediate Treatment Facility* merupakan langkah yang tepat dan perlu mendapat apresiasi. Namun dalam proses tata kelola kolaboratif penanganan sampah tersebut masih bersifat konvensional yang ditunjukkan dengan kontrol kepemimpinan yang dominan, adanya hambatan pengembangan pengetahuan (*management knowledge*) dalam organisasi, sehingga tata kelola masih bersifat birokratis (prosedural), kaku dan lamban.

- b. Faktor internal yang dominan mempengaruhi tata kelola kolaboratif antara lain: (1) Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dan *Grand Desain* Penanganan Sampah DKI Jakarta; (2) Adanya kemampuan melakukan *review* dalam seluruh dimensi dan proses kolaborasi secara komprehensif; (3) Kemampuan melakukan komunikasi dan sinergisitas dengan SKPD terkait dan *stakeholders*; (4) Menambah kecerdasan melalui pendidikan dan pelatihan; (5) Kecerdasan pemahaman untuk kolaborasi melalui pengembangan pengetahuan (*management knowledge*). Sedangkan faktor eksternal yang dominan mempengaruhi antara lain: 1) kewenangan yang sama bagi aktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan; 2) Menerapkan inovasi teknologi penanganan sampah yang tepat guna; 3) Budaya yang semakin transparan.

Namun demikian, berdasarkan analisis ASOCA, secara empiris yang masih mengalami problematika dan kurang mendukung tata kelola kolaborasi adalah faktor budaya organisasi yang kurang melibatkan LSM Pemerhati lingkungan, media dan perguruan tinggi, dan desain kelembagaan yang belum efektif melibatkan aktor atau *stakeholders* terkait, sehingga kurang mampu memperjelas kewenangan para aktor atau *stakeholders* terkait dalam pengambilan keputusan.

- c. Upaya untuk menerapkan model desain kelembagaan tata kelola kolaboratif dalam penanganan sampah modern atau waste to energy di Provinsi DKI Jakarta terangkum dalam Model “L-MAURITS” yang merupakan dimensi-dimensi meliputi: *Leadership* (kepemimpinan), *Modern* (paradigma baru), *Authority* (kewenangan), *Understanding* (pemahaman), *Review* (evaluasi atau

perbaikan), *Innovation process* (proses inovasi), *Transparency* (keterbukaan), dan *Sustainable development* (pembangunan berkelanjutan), yang merupakan model kelembagaan yang dirancang untuk memenuhi tuntutan perkembangan global dengan mengadopsi penerapan di negara lain dan menyesuaikan dinamika, kompleksitas dan permasalahan yang sedang dan akan dihadapi pemerintah daerah di masa mendatang guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Persamaan atau perbedaan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Horas

M. Panjaitan dengan penelitian yang penulis laksanakan adalah berikut:

- a. Horas M. Panjaitan dan penulis sama-sama mengangkat fenomena Persampahan namun berbeda subyek, obyek dan locus penelitiannya. Subyek, obyek dan locus penelitian Horas M. Panjaitan adalah para pejabat birokrasi, tokoh adat dan tokoh masyarakat DKI Jakarta, sedangkan subyek, obyek dan lokus penelitian penulis adalah para pejabat struktural Kabupaten Bekasi dan masyarakat Kabupaten Bekasi.
- b. Horas M. Panjaitan dan penulis sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan tidak sama dalam menggunakan teori yang dijadikan landasan penyusunan konsep penelitian. Horas M. Panjaitan menggunakan menggunakan teori Anshell dan Gash (2007); penulis menggunakan teori ASOCA (Suradinata, 2014: 18).
- c. Horas M. Panjaitan dan penulis sama-sama menjadikan konsep baru sebagai hasil akhir penelitian. Dengan perbedaan subyek. Obyek dan locus penelitian, dengan menggunakan landasan teoritik yang tidak sama; maka dengan

sendirinya konsep baru yang dihasilkan penulis akan berbeda dengan konsep baru Horas M. Panjaitan.

Dengan persamaan dan perbedaan yang disebutkan, dalam pandangan penulis, hasil penelitian Horas M. Panjaitan relevan untuk dijadikan acuan studi, terutama dalam hal menghasilkan suatu konsep baru dari pembahasan hasil penelitian. Selain itu, Horas M. Panjaitan dalam menerapkan model menggunakan teori Anshell dan Gash (2007) Suatu hasil penelitian yang layak diapresiasi.

2. Jurnal Disertasi Syamsul Auliya Rachman Model Implementasi Kebijakan Publik Pengelolaan Sampah *Refused Derived Fuel* (RDF) di Kabupaten Cilacap. Program Doktor Ilmu Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta Tahun 2021.

Sebagai daerah industri dan jumlah penduduk yang banyak tentunya menimbulkan berbagai macam permasalahan yaitu sampah, dimana semakin banyak jumlah penduduk maka semakin banyak jumlah sampah yang dihasilkan. Kabupaten Cilacap membuat inovasi pengelolaan sampah dengan teknologi *Refused Derived Fuel* (RDF), yang merubah sampah menjadi bahan bakar alternatif pengganti batu bara. Nilai proyek RDF yang cukup besar ternyata membuat Kabupaten Cilacap melakukan berbagai upaya untuk mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah RDF yang merupakan *pilot project* untuk ditiru oleh daerah lain.

Dalam penulisan ini penulis berupaya menganalisisnya dengan desain deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penulisan ditentukan dengan purposive sampling agar informasi yang di dapat sesuai dengan tujuan penulisan. Landasan teori yang digunakan adalah dengan pendekatan teori Van Metter dan

Van Horn karena lebih tepat sesuai dengan kondisi implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Hasil kesimpulan:

- a. Pemerintah Kabupaten Cilacap adalah sebuah organisasi birokrasi yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengatasi permasalahan pada sektor publik seperti halnya masalah sampah karena masalah sampah menyangkut orang banyak;
- b. Pemerintah Kabupaten Cilacap memilih membuat kebijakan publik dalam penanganan masalah sampah, dengan membuat kebijakan pengelolaan sampah dengan teknologi *Refused Derieved Fuel* (RDF) dengan alasan untuk menghemat anggaran dibandingkan dengan membuat TPA baru.
- c. Kemampuan sumberdaya keuangan dan sumber daya manusia menjadi faktor penting terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah RDF di Kabupaten Cilacap. Kedua faktor tersebut akan sangat mempengaruhi cepat atau tidaknya terealisasinya kebijakan pengelolaan sampah RDF. Keterbatasan sumberdaya keuangan membuat kebijakan pengelolaan sampah RDF di Kabupaten Cilacap melibatkan berbagai pihak dari mulai pemerintah asing, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang ternyata menjadikan proses implementasi kebijakan berjalan tidak sesuai dengan target perencanaan karena banyak aturan dan regulasi yang dipedomani, karena komunikasi masing- masing badan pelaksana memiliki pemahaman yang berbeda terhadap aturan dan regulasi.
- d. Implementasi kebijakan pengelolaan sampah RDF di Kabupaten Cilacap pada akhirnya terjalinnya kerjasama antara pemerintah daerah dengan badan usaha untuk secara bersama mengelola RDF, sehingga pilihan yang diambil oleh

Kabupaten Cilacap adalah kerjasama operasional dengan PT. Solusi Bangun Indonesia saling memberikan kontribusi sesuai dengan kesepakatan.

- e. Ada manfaat yang sangat besar yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap yaitu manfaat yang tidak langsung yaitu sampah akan cepat terolah sehingga mengurangi penumpukan di TPS, tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk operasional untuk membangun TPA baru dengan sisten open dumping selama kurang lebih 15 tahun depan.

Persamaan atau perbedaan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Syamsul Auliya Rachman dengan penelitian yang penulis laksanakan adalah berikut:

- a. Syamsul Auliya Rachman dan penulis sama-sama mengangkat fenomena implementasi kebijakan publik namun berbeda subyek, obyek dan locus penelitiannya. Subyek, obyek dan locus penelitian Syamsul Auliya Rachman adalah para pejabat birokrasi, tokoh adat dan tokoh masyarakat Cilacap Subyek, obyek dan locus penelitian penulis adalah para pejabat struktural Kabupaten Bekasi dan masyarakat Kota Jambi.
- b. Syamsul Auliya Rachman dan penulis sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan tidak sama dalam menggunakan teori yang dijadikan landasan penyusunan konsep penelitian. Syamsul Auliya Rachman menggunakan model implementasi kebijakan publik Von Meter Von Horn; penulis menggunakan ASOCA (Suradinata, 2014: 18).
- c. Syamsul Auliya Rachman dan penulis sama-sama menjadikan konsep baru sebagai hasil akhir penelitian. Dengan perbedaan subyek. Obyek dan lokus penelitian, dengan menggunakan landasan teoritik yang tidak sama; maka

dengan sendirinya konsep baru yang dihasilkan penulis akan berbeda dengan konsep baru Syamsul Auliya Rachman.

Dengan persamaan dan perbedaan yang disebutkan, dalam pandangan penulis, hasil penelitian Syamsul Auliya Rachman relevan untuk dijadikan acuan studi, terutama dalam hal menghasilkan suatu konsep baru dari pembahasan hasil penelitian. Selain itu, Syamsul Auliya Rachman dalam menerapkan model implementasi kebijakan publik Von Meter dan Von Horn suatu hasil penelitian yang layak diapresiasi.

2.3 Kerangka Pemikiran

Esensi dari adanya otonomi daerah dan desentralisasi adalah adanya harapan kepada daerah-daerah untuk mampu berkompetisi dalam mengatur dan mengurus segala kebutuhan masyarakatnya, sehingga permasalahan-permasalahan tersebut langsung dapat disentuh dan ditemukan jalan keluarnya (*problem solving*). Kaitannya dengan pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui peraturan bupati tersebut telah mengamanatkan agar permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi dapat diselesaikan dengan baik secara efektif dan optimal.

Namun pada kenyataannya, masih banyak sekali ditemukan perilaku masyarakat yang masih lemah kesadarannya terkait dalam pengelolaan sampah ini. Hal demikian terjadi, karena masih kurangnya sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat tentang kepedulian kebersihan dan kelestarian lingkungan oleh Pemerintah. Sehingga berdampak kepada kurang proaktifnya masyarakat Kabupaten Bekasi menjaga lingkungan yang bersih, terjadi beberapa daerah

kumuh, banjir dan pencemaran lingkungan serta volume sampah yang ada di sungai-sungai di wilayah Kabupaten Bekasi.

Dasar Hukum Pengelolaan Sampah Landasan Yuridis Pusat: Pengaturan Atau Ketentuan Hukum Pengelolaan Sampah:

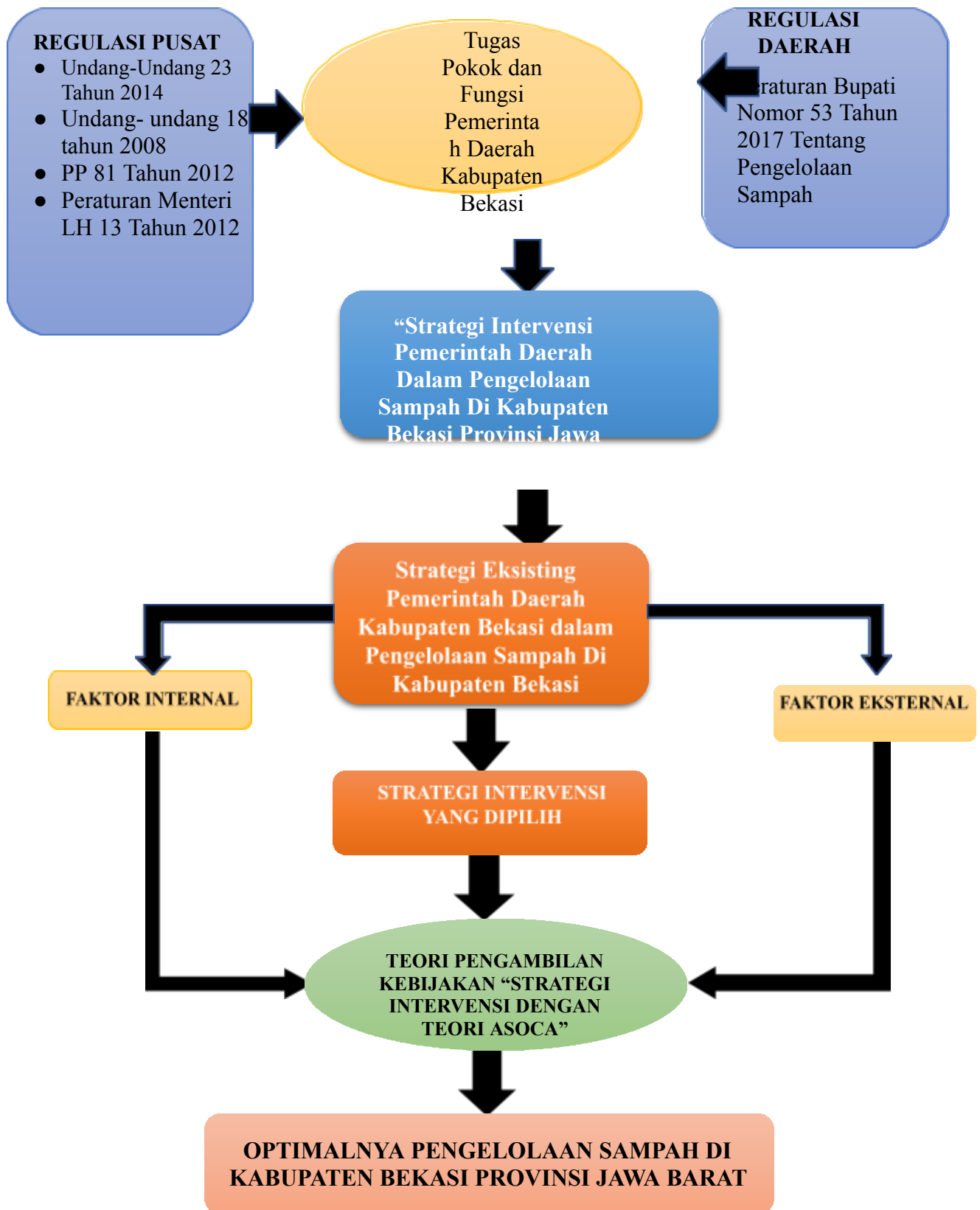
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan.
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* melalui Bank Sampah.
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Sampah.

Bahwa otonomi daerah merupakan kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom berupa kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat

untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat mempercepat perwujudan kesejahteraan tersebut, sedangkan desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia pelayanan di daerah dan pemberdayaan masyarakat atau adanya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah. Sementara upaya peningkatan daya saing diharapkan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan keistimewaan atau kekhususan serta potensi daerah dan keanekaragaman yang dimiliki oleh daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masalah pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi bermuara pada kurang bauran strategi pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga mengakibatkan lingkungan menjadi kotor, timbulnya wabah penyakit, pemukiman kumuh, tercemarnya sungai dan udara. Berdasarkan hal tersebut, maka strategi intervensi pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat sebagai proses pencapaian tujuan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi, harapan peneliti dengan penelitian ini terbangun strategi intervensi pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat yang efektif, dengan ini dibangun kerangka pemikiran dengan gambar berikut:



Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain penelitian

Permasalahan yang akan dikaji memerlukan cara penyelesaiannya, hal ini dilakukan untuk memenuhi kaidah penelitian ilmiah. Menurut Kerlinger (2006:17) menyatakan bahwa, “Penelitian ilmiah adalah penyelidikan secara sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis, tentang fenomena-fenomena alami, dengan dipandu oleh teori dan hipotesis-hipotesis tentang hubungan yang dikira terdapat antara fenomena-fenomena itu.” Selanjutnya menurut Mayer dan Greenwood (1984 : 80) bahwa, “.....teknik penelitian merupakan manipulasi spesifik dan mental yang dipergunakan oleh para peneliti untuk mengumpulkan atau memproses data yang ditentukan oleh rencana penyelidikan.”

Hasil maksimal dapat memperoleh, maka diperlukan desain penelitian yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta sesuai pula dengan objek yang akan diteliti. Kirk dan Miller (1986), mendefinisikan “metode kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya”. Sedangkan menurut Kerlinger (2006:484) menyatakan bahwa, “Desain Penelitian mempunyai dua maksud atau kegunaan mendasar : (1) menyediakan jawab terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian, dan (2) mengontrol atau mengendalikan varian”. Selanjutnya dijelaskan bahwa, “Desain membantu peneliti mendapatkan jawab untuk pertanyaan penelitian dengan dan juga membantu peneliti mengontrol varian-

varian eksperimental, varian ekstra dan varian galat pada suatu masalah penelitian tertentu yang sedang dikaji.”

Miles and Huberman (1994) menjelaskan bahwa “metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, dan/atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah”.

Menurut Bodgan dan Taylor dalam Basrowi (2008: 1) menyatakan bahwa:

Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati”. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. “Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi dan implementasi model secara kualitatif.

Berdasarkan teori di atas maka penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Strategi Intervensi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat adalah penelitian Kualitatif.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif.

Menurut Whitney (1960: 160) metode deskriptif adalah

Pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau adanya.

Penelitian berdasarkan tingkat eksplanasinya menurut Kriyantono (2006) bisa dibagi menjadi empat tipe yaitu penelitian jenis eksploratif, deskriptif, eksplanatif, dan evaluatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini secara khusus adalah tipe penelitian kualitatif deskriptif. Kriyantono (2006) menjelaskan, jenis penelitian ini bertujuan untuk membuat deskripsi secara

sistematis, dan akurat tentang fakta-fakta objek tertentu. Tipe penelitian kualitatif digunakan karena pada penelitian ini ingin mencari dan mendapatkan informasi yang mendalam mengenai strategi permasalahan yang diteliti.

3.2. Kerangka Konsep Penelitian

Kerangka konsep adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep yang satu dengan konsep lainnya dari masalah yang akan diteliti. Suatu kerangka konseptual memaparkan, entah dalam bentuk grafik atau naratif, dimensi-dimensi kajian yang utama, yaitu faktor-faktor kunci, atau variabel-variabel, dan hubungan- hubungan antara dimensi tersebut yang telah diperkirakan sebelumnya. Kerangka konseptual menurut Nawawi (2003:63) “terwujud dalam berbagai bentuk dan ukuran. Kerangka konseptual dapat bersifat elementer atau rumit berlandaskan pada teori atau pikiran sehat, deskriptif, atau hubungan sebab-akibat”.

Dalam penelitian ini, konsep strategi intervensi disusun menggunakan metoda analisis ASOCA yang langkah awalnya yang mesti dilakukan adalah dengan mengetahui faktor-faktor yang menjadi bagian dari masing-masing unsur ASOCA. analisis ini selanjutnya diidentifikasi dari masing-masing faktor lingkungan baik internal maupun eksternal, selanjutnya diklasifikasi berdasarkan unsur-unsur ASOCA dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi

Adapun gejala atau fenomena strategi intervensi dapat diukur dengan dimensi atau indikator pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Operasionalisasi Konsep Strategi Intervensi

Judul	Dimensi	Fokus / Sub Fokus	Indikator / Sub Indikator
Strategi Intervensi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bekasi	1. Lingkungan Internal : a) Efektivitas penggunaan Anggaran b) Kapasitas SDM Aparatur c) Kapabilitas Pendapatan	1.1. <i>Ability</i> (Kemampuan) a. Alokasi Anggaran yang Besar	Strategi AbO
		1.2. <i>Strengths</i>	Strategi SO

Provinsi Jawa Barat	Daerah d) Kebijakan Daerah	(Kekuatan) a. Kompetensi Kepala Daerah yang baik	
		1.3. <i>Agility</i> (Kecerdasan) a. Kolaborasi dan Kerjasama dengan Akademisi	Strategi AgO
	2. Lingkungan Eksternal : a) Kebutuhan / Aspirasi Masyarakat b) Isu Aktual Kabupaten Bekasi c) Kondisi Georafis Kabupaten Bekasi	2.1 <i>Opportunities</i> (Peluang) a. Pemberdayaan Masyarakat	Strategi AbC
		2.2 <i>Culture</i> (Budaya) a. Budaya Gotong Royong	Strategi SC
			Strategi AgC

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, yang membedakan analisis ASOCA dengan yang lain yaitu pada *Culture* (budaya) dan *Agility* (kecerdasan). Dengan adanya budaya orang akan maju dan modern dan selalu hidup pada zamannya, sedangkan kecerdasan berasal dari kata cerdas' yang berarti sempurna perkembangan akal budi, tajam pikiran, kesempurnaan akal budinya, ketajaman pikiran dan kepandaian. Kecerdasan harus bisa dalam mengelola pikiran menganalisis suatu informasi untuk dijadikan suatu bahan putusan.

3.3. Data Yang Diperlukan

Menurut Kriyantono (2006) metode pengumpulan data adalah “teknik atau cara-cara yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data penelitian ini akan dilakukan melalui beberapa teknik dan sumber. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dibagi menjadi dari dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder”.

Menurut Lofland (dalam Moleong, 2009:112) bahwa :

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data utama tersebut dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tape, pengambilan foto, atau film. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya.

Menurut Mayer dan Greenwood (1984:358-359) menyatakan bahwa: “Data adalah observasi-observasi yang dicatat, mengenai pengacu-pengacu. Oleh karena itu data adalah cara dengan mana konsep-konsep diukur. Pengacu adalah suatu aspek dari realitas.” Selanjutnya Mayer dan Greenwood (1984:361) berpendapat : “Data berbeda-beda menurut sumbernya. Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh tangan pertama oleh ahli analisis; data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk suatu maksud yang lain tetapi digunakan oleh ahli analisis dalam suatu desain riset yang baru.

Berdasarkan pandangan tersebut maka sumber data tersebut dapat diklasifikasikan menurut jenis datanya yaitu :

1. Data Primer

Data primer menurut Sarwono (2006) adalah “data yang berasal dari sumber pertama. Data ini tidak terkompilasi ataupun dalam bentuk *file-file*. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sarana mendapatkan informasi ataupun data”.

Data primer dalam penelitian ini dihimpun secara langsung berdasarkan hasil observasi langsung ahli analisis dan dari informan melalui wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah informan yang berkompeten dan terkait dengan Strategi Intervensi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.

2. Data Sekunder

Menurut Rianto (2004 :57) Data sekunder, yaitu “data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dimana sumber data dapat berupa dokumen–dokumen

resmi, karya ilmiah, jurnal–jurnal penelitian ilmiah, artikel ilmiah, surat kabar, majalah maupun sumber tertulis lain yang ada hubungan dengan obyek penelitian”.

Data sekunder dalam penelitian ini dihimpun secara langsung berdasarkan dokumen–dokumen resmi, karya ilmiah, jurnal–jurnal penelitian ilmiah, artikel ilmiah, surat kabar, majalah maupun sumber tertulis lain terkait dengan Strategi Intervensi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.

3.4. Informan dan Cara Menentukannya

Informan dalam penelitian ini diperoleh melalui *key person*. Seperti yang diungkapkan Bungin (2007 : 77) bahwa :

Memperoleh infoman penelitian melalui *key person* digunakan apabila peneliti sudah memahami informasi awal tentang objek penelitian maupun informan penelitian, sehingga ia membutuhkan *key person* untuk memulai wawancara atau observasi *key person* ini adalah tokoh formal atau tokoh informal.

Informan ditentukan dengan *key person* karena informan yang dipilih dipandang memahami hal yang diteliti sebagaimana pendapat Bungin (2007 : 107-108) bahwa :

Ukuran besaran individu *key person* atau informan, yang mungkin yang mungkin atau tidak mungkin ditujukan sudah ditetapkan sebelum pengumpulan data, tergantung pada sumber daya dan waktu yang tersedia, serta tujuan penelitian. Dengan kata lain besaran *key person* yang digunakan sebagai informan disesuaikan dengan struktur sosial saat pengumpulan data dilakukan. Kunci dasar penggunaan prosedur ini adalah penguasaan informasi dari informan dan secara logika bahwa tokoh-tokoh kunci didalam proses sosial selalu langsung menguasai informasi yang terjadi di proses sosial itu.

Penentuan informan atau narasumber untuk menjadi sumber data hasil penelitian ini ditentukan melalui teknik *purposive sampling*. Kriyantono (2006)

menjelaskan bahwa pada “*purposive sampling* ini peneliti memilih sampel dari orang-orang yang mencakup kriteria-kriteria tertentu yang sesuai berdasarkan tujuan penelitian, sedangkan orang-orang yang tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh peneliti maka tidak akan dijadikan sebagai sampel”.

Menurut Soehartono (2002:63) Menyatakan bahwa : “Dengan *purposive sampling* peneliti akan mengambil siapa saja sebagai sampel, dengan pertimbangan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian (pengambilan sampel berdasarkan tujuan).”

Berdasarkan pendapat para ahli yang disebutkan diatas maka dapat dikatakan bahwa *purposive sampling* adalah pemilihan sampel dari berbagai informan yang ditentukan berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian dengan mengesampingkan istilah sampel dalam populasi, karena sampel yang dipilih adalah informan yang dianggap mengetahui persoalan yang menjadi obyek kajian penelitian, sehingga dalam penelitian ini peneliti menggunakan *purposive sampling* dalam penentuan sampel/informan dan tidak menutup kemungkinan menggunakan *Snowball sampling* yang nantinya disesuaikan dengan kondisi lapangan pada saat akan melaksanakan penelitian.

Informan yang dipilih adalah informan yang dianggap berkompeten dengan obyek yang diteliti Strategi Intervensi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, maka informan yang dipilih adalah informan yang memiliki pemahaman terhadap objek yang diteliti, meliputi:

Tabel 3.2.
Informan Penelitian

No	Kelompok Informan	Jumlah (orang)	Kode
I.	Pengambil Kebijakan		
	1. Kepala Daerah	1	I1
	2. DPRD	1	I2
II.	Pelaksana		
	1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup	1	I3
	2. Kepala Bidang	1	I4
	3. Camat	1	I5
	4. Lurah	1	I6
III.	Masyarakat		
	1. Pengelola Sampah	5	I7
	2. Masyarakat	4	I8
Total		15	

Sumber : Diolah oleh peneliti

3.5. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

3.5.1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Bungin (2007:143) adalah :

Pengumpulan data pada penelitian kualitatif membutuhkan teknik-teknik kualitatif pula. pada umumnya dalam penelitian kualitatif, peneliti dapat memilih beberapa teknik pengumpulan data antara lain : (1) observasi partisipasi; (2) wawancara mendalam; (3) *life history*; (4) analisis dokumen; (5) catatan harian peneliti (rekaman pengalaman dan kesan peneliti pada saat pengumpulan data); dan (6) analisis isi media.

Sedangkan Satori dan Komariah (2010:103) mengemukakan pengumpulan data tidak lain adalah “suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian.” Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah adalah prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara:

1. Wawancara (*Interview*)

Salah satu sumber informasi kualitatif deskriptif yang sangat penting adalah wawancara. Menurut Ardianto (2011) Wawancara adalah “sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara”.

Sedangkan menurut Berger dalam Kriyantono (2006) wawancara adalah “percakapan antara periset yaitu seseorang yang berharap mendapatkan informasi, dengan informan yaitu seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu objek”.

Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Dalam penelitian ini, metode wawancara yang digunakan ialah wawancara Semi-Terstruktur (*semistructured interview*).

Dari penjelasan di atas maka dalam pengumpulan data, Penulis menggunakan wawancara bebas dan terpimpin, dimana penulis menggunakan pedoman wawancara sebagai petunjuk mengenai hal-hal yang akan ditanyakan. Penulis dapat mengembangkan pertanyaan tersebut hingga permasalahan penelitian bisa terjawab secara jelas dan terperinci sesuai dengan tujuan penelitian.

2. Telaah dokumen

Telaah dokumen merupakan salah satu teknik penunjang dalam pengumpul data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang dapat mendukung serta melengkapi data penelitian. Menurut Sukmadinata

(2006:221) “studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen”. Peneliti memanfaatkan telaah dokumen untuk mengumpulkan data yang relevan. Alasan digunakannya telaah dokumen sebagai pengumpulan data adalah karena dokumen merupakan sumber yang stabil, kaya, berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian, relatif murah dan mudah diperoleh, dan hasil pengkajian akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan.

3. Observasi

Menurut Creswell (2012:267) menyatakan bahwa “observasi merupakan observasi yang didalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian.”

Kemudian Tohirin (2012:62) mengatakan bahwa ada beberapa alasan pengamatan dijadikan sebagai cara utama pengumpulan data, yaitu :

- a. Didasarkan atas pengamatan langsung;
- b. Memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi sebenarnya;
- c. Bisa menghindari kekeliruan dan bias karena kurang mampumengingat data hasil wawancara;
- d. Memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit;
- e. Dalam kondisi tertentu dimana teknik lain tidak memungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat.

Kemudian menurut Narbuko dan Achmadi (2010:73) terdapat instrumen/alat-alat dalam melakukan observasi yaitu :

1. *Anecdotal Record*, atau disebut juga daftar riwayat kelakuan adalah catatan-catatan yang dibuat oleh peneliti mengenai kelakuan-kelakuan luar biasa yang dianggap penting oleh peneliti.
2. Catatan Berkala, dalam catatan ini peneliti tidak mencatat macam-macam kejadian khusus melainkan hanya pada waktu-waktu tertentu saja.

3. *Check List*, yaitu suatu daftar yang berisi nama-nama subjek dan factor- faktor yang hendak diselidiki, yang bermaksud mensistematisasikan catatan observasi.
4. *Rating Scale*, adalah mencatat gejala menurut tingkat-tingkatnya.
5. *Mechanical Devices*, yaitu observasi yang menggunakan alat-alat mekanik sebab lebih praktis dan efektif.

3.5.2. Instrumen Penelitian

Mayer dan Greenwood (1984:399) berpendapat bahwa:

Suatu instrumen dapat didefinisikan sebagai suatu alat yang digunakan oleh ahli analisis untuk mensistematisasikan pengumpulan data. Dalam riset sosial suatu instrumen terdiri dari seperangkat instruksi-instruksi tertulis mengenai variabel-variabel apa yang harus diobservasi dan bagaimana cara mengobservasinya. Instrumen itu juga memberikan suatu format untuk mencatat observasi-observasi itu.

Mayer dan Greenwood (1984:405) selanjutnya menyatakan bahwa:

“Instrumen-instrumen yang tak terstruktur, seperti buku harian, buku harian, pedoman-pedoman wawancara dan pertanyaan- pertanyaan terbuka, secara khas digunakan guna memungkinkan ahli analisis menemukan variabel-variabel, indikator-indikator atau hubungan-hubungan yang kehilangan antaranya”.

Moleong (2009:9) menyatakan bahwa “dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Hal ini dilakukan karena, jika menggunakan alat bukan manusia dan mempersiapkan dirinya terlebih dahulu sebagai yang lazim digunakan dalam penelitian klasik, maka sangat tidak mungkin untuk mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan- kenyataan yang ada dilapangan. Selain itu hanya manusia sebagai alat sajalah yang berhubungan dengan informan atau obyek lainnya, dan hanya manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataan dilapangan”.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dalam penelitian ini yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri, dimana peneliti secara langsung berada di lokasi penelitian untuk melakukan wawancara, mengumpulkan data sekunder dengan panduan pedoman wawancara.

3.6. Teknik Analisis Data

Manurut Patton dalam Moleong (2009), teknik analisis data adalah “proses kategori urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar, ia membedakannya dengan penafsiran yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian”. Sedangkan menurut Bogdan dan Tylor dalam Moleong (2009), “analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis seperti yang di sarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis tersebut, jika dikaji definisi pertama lebih menitik beratkan pada pengorganisasian data sedangkan definisi tersebut dapat pengorganisasian data sedangkan definisi yang kedua lebih menekankan maksud dan tujuan analisis data, dan dari kedua definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan, analisis data, adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema”.

Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.

Setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, langkah berikutnya ialah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan rangkuman yang inti, proses dengan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan.

Analisis data dilakukan dalam suatu proses, proses berarti pelaksanaannya sudah mulai dilakukan sejak pengumpulan data dan dilakukan secara intensif, yakni sesudah meninggalkan lapangan, pekerjaan menganalisis data memerlukan usaha pemusatan perhatian dan pengarahannya tenaga fisik dan pikiran dari peneliti, dan selain menganalisis data peneliti juga perlu mendalami kepustakaan guna mengkonfirmasikan atau menjustifikasikan teori baru yang barangkali ditemukan.

Data yang didapatkan dalam penelitian kemudian akan diproses dengan menganalisa kembali data tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan tiga tahapan untuk menganalisis data dengan teknik analisis data interaktif yaitu menggunakan analisis data model Miles dan Huberman (2010):

1. **Reduksi Data (*Data Reduction*).** Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
2. **Penyajian Data (*Data Display*).** Dalam penelitian kualitatif, penyajian dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data diharapkan akan mempermudah peneliti untuk merencanakan pekerjaan selanjutnya. penyajian data ini dilakukan setelah data di reduksi terlebih dahulu.
3. ***Conclusion Drawing/Verification*.** Langkah ketiga dalam menganalisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan dan verifikasi data. Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Alasan penggunaan analisis data ini karena data yang telah didapatkan dari beberapa teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan studi dokumentasi maka data-data yang sudah terkumpul tersebut dipilih kembali sesuai dengan pembahasan pada penelitian ini. Data yang telah melalui proses pemilihan tersebut kemudian dikumpulkan dan disusun menjadi satu kesatuan kelompok. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar memudahkan dalam menarik sebuah kesimpulan dari penelitian ini. Selain itu juga agar alur pembahasan pada penelitian ini dapat lebih jelas dan terarah dan tetap pada fokus penelitian.

Berkaitan dengan tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui strategi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bekasi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah Kabupaten Bekasi, maka digunakanlah analisis ASOCA, dimana analisa tersebut merupakan identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi.

Analisis strategi tidak hanya menggunakan analisis SWOT, menurut Ermaya (2013: 18) dapat menggunakan analisis ASOCA yaitu kepanjangan dari: *ability* (kemampuan), *strength* (kekuatan), *opportunities* (peluang), *culture* (budaya) dan *agility* (kecerdasan). Analisis ASOCA menambahkan unsur *culture* (budaya) dan *agility* (kecerdasan) sebagai unsur yang penting dalam menemukan strategi pemecahan masalah, pengambilan putusan dan dapat dikembangkan dalam mengikuti perubahan, perkembangan zaman dan kebutuhan. Sinergitas elemen- elemen ASOCA sangat penting dikelompokkan ke dalam lingkungan strategis

internal dan eksternal yang dapat dibuat dalam bentuk matriks analisis ASOCA. Matriks analisis ini cocok dengan Indonesia yang majemuk dan memiliki letak strategis di dunia.

Gambar 3.1
Matrik ASOCA

FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL	ABILITY (KEMAMPUAN)	STRENGTHS (KEKUATAN)	AGILITY (KECERDASAN)
OPPORTUNITIES (PELUANG)	(A) MENGUNAKAN KEMAMPUAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG	(C) MENGUNAKAN KEKUATAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG	(E) MENGUNAKAN KECERDASAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG
CULTURE (BUDAYA)	(B) MELIHAT KEMAMPUAN UNTUK MENGHADAPI TUNTUTAN LINGKUNGAN BERBUDAYA	(D) MENGUNAKAN KEKUATAN UNTUK TANGGAP TERHADAP PENGARUH PERUBAHAN BUDAYA	(F) MENGUNAKAN KECERDASAN UNTUK MENSIASATI PENGARUH PERUBAHAN BUDAYA

Sumber : (Ermaya, 2013:20)

Gambar tersebut menampilkan matriks sebelas kotak, yang melihat organisasi dari faktor internal organisasi yaitu *ability*, *strengths*, dan *agility* serta melihat faktor eksternal yaitu *opportunities* dan *culture*. Enam kotak lainnya merupakan tindakan yang harus dilakukan organisasi ketika faktor internal organisasi diperhadapkan dengan faktor eksternal. (Ermaya, 2013:19-20).

Berdasarkan analisa ASOCA yang dapat mengidentifikasi upaya atau isu-isu strategis dalam pengelolaan bank sampah maka langkah berikutnya adalah mengevaluasi isu-isu strategis yang terpilih tersebut dengan menggunakan Litmus

Test. Adapun *Litmus Test* itu merupakan pertanyaan yang harus dijawab dengan isu strategis dan terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang mempunyai skor penilaian rata-rata antara 1 (satu) sampai 3 (tiga), dengan asumsi semakin tinggi total skor suatu isu berarti semakin strategis isu tersebut dan sebaliknya semakin rendah total skor maka isu tersebut tidak strategis. Daftar pertanyaan *litmus test* tersebut dapat tergambar pada Tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Daftar Pertanyaan dan skor Litmus Test

Pertanyaan	Skor – 1	Skor – 2	Skor – 3
1	2	3	4
Bilamana/kapan isu strategis tersebut akan menjadi tantangan/peluang bagi organisasi?	Sekarang	Tahun depan	Dua tahun atau lebih dari sekarang
Seberapa luas suatu isu berdampak terhadap organisasi	Unit atau divisi tunggal	Beberapa divisi	Seluruh unit
Seberapa besar resiko/peluang keuangan bagi organisasi	Kecil (10% dari anggaran)	Sedang (10-25% dari anggaran)	Besar (lebih dari 25% dari anggaran)
Apakah strategi yang diperlukan mensyaratkan a. Pengembangan tujuan dan program pelayanan yg baru? b. Perubahan yang nyata dalam sumber pembiayaan? c. Pengaturan Pemerintah secara signifikan d. Penambahan atau modifikasi fasilitas utama? e. Penambahan staf yang nyata?	Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak	- - - - -	Ya Ya Ya Ya Ya
Seberapa mudahkah pendekatan yang dapat dilakukan untuk pemecahannya	Siap dilaksanakan	Perlu Parameter yang sedikit detail	Sangat luas

1	2	3	4
Tingkat manajemen terendah manakah yang dapat memutuskan cara pemecahan isu tersebut?	Supervisor	Kepala bagian/kasie	direktur
Gangguan apakah yang mungkin terjadi jika tidak menggiraukan isu tersebut?	Kesulitan inefesiensi	Hambatan pelayanan, pemborosan	Hambatan pelayanan jangka panjang, kerugian besar
Seberapa banyak organisasi/departemen lain dipengaruhi oleh isu tersebut dan harus dilibatkan dalam pemecahan?	Tidak ada	1 sampai 3	4 atau lebih
Seberapa sensitivitas isu tersebut terhadap komunitas sosial, politik, politik atau nilai budaya	Lunak/tidak	Agak sensitif, agak berpengaruh	Sangat sensitif

Sumber : Bryson (2008)

Pembagian skor berdasarkan tabel di atas bertujuan untuk menilai tingkatan kestrategisan dari isu-isu yang telah diperoleh. dimana semakin tinggi total skor suatu isu, akan semakin strategis isu tersebut, sebaliknya semakin rendah total skor suatu isu maka isu tersebut tidak strategis. Adapun isu-isu tersebut berdasarkan skor yang diperoleh. Pengelompokan skor sebagai berikut :

1. 0,01 – 1,00 kelompok isu tidak strategis / operasional
2. 1,01 – 2,00 kelompok isu strategis
3. 2,01 – 3,00 kelompok isu sangat strategis

Berdasarkan uraian isu strategis dan analisis ASOCA di atas maka diperoleh beberapa isu strategis yang kemudian akan dipilih dan ditetapkan untuk dievaluasi dengan tujuan memperoleh isu yang benar-benar strategis. Untuk lebih memudahkan penyusunan skala prioritas mengenai isu strategis, maka dibuat tabel susunan prioritas seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4.
Susunan Proiritas Langkah-langkah Strategi Intervensi Pemerintah
Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa
Barat

LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS	SKOR	TINGKAT PRIORITAS*
1. Menggunakan kemampuan untuk memanfaatkan peluang		Pertama
2. Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang		Kedua
3. Menggunakan kecerdasan untuk memanfaatkan peluang		Ketiga
4. Melihat kemampuan untuk menghadapi tuntutan lingkungan berbudaya		Keempat
5. Menggunakan kekuatan untuk tanggap terhadap pengaruh perubahan budaya		Kelima
6. Menggunakan kecerdasan untuk mensiasati pengaruh perubahan budaya		Keenam

Keterangan :

*= Relatif, sesuai dengan nilai skor.

Tahap akhir dari proses perumusan manajemen strategis adalah dengan merumuskan rencana-rencana strategis, alternatif-alternatif kebijakan yang dipandang dapat menjawab isu-isu strategis yang telah diidentifikasi dan dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pendekatan yang digunakan untuk merencanakan langkah- langkah strategis ini adalah menggunakan *the five step proses* yakni 5 (lima) langkah yang direkomendasikan oleh Bryson (2008:196), meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Menginventarisir alternatif-alternatif kebijakan yang tersedia untuk mengarahkan dan menjawab isu-isu strategis yang telah ditetapkan;
- b. Mencari hambatan-hambatan yang mungkin akan dihadapi dalam mewujudkan alternatif kebijakan tersebut;
- c. Merumuskan usulan-usulan program dan tindakan utama yang harus diambil untuk mewujudkan alternatif-alternatif kebijakan sekaligus menghilangkan hambatannya;
- d. Merumuskan tindakan utama yang harus dilakukan dalam satu atau dua tahun kedepan untuk mengimplementasikan usulan-usulan kebijakan utama tersebut;

- e. Merumuskan langkah-langkah khusus yang harus dilakukan dalam enam bulan kedepan untuk mengimplementasikan usulan-usulan kebijakan serta menetapkan siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya.

Menurut Wiersma (2010) Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

Sedangkan menurut Kriyantono (2006) Triangulasi yaitu:

menganalisis jawaban subjek dengan meneliti kebenarannya dengan data empiris (sumber data lainnya) yang tersedia. Disini jawaban subjek di *cross-check* dengan dokumen yang ada”. Terdapat beberapa macam model triangulasi, yaitu sebagai berikut :

1. **Triangulasi Sumber.** Triangulasi sumber ini membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda. Misalnya, membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, atau membandingkan apa yang dikatakan oleh masyarakat umum dengan yang dikatakan secara pribadi.
2. **Triangulasi Waktu.** Perubahan suatu proses dan perilaku manusia, karena perilaku manusia dapat berubah setiap waktu. Karena itu periset perlu mengadakan observasi tidak hanya satu kali.
3. **Triangulasi Teori.** Triangulasi ini memanfaatkan dua atau lebih teori sebagai perbandingan untuk keperluan rancangan riset, pengumpulan data, dan analisis data secara lebih lengkap agar hasilnya komprehensif.
4. **Triangulasi Periset.** Menggunakan lebih dari satu periset dalam mengadakan observasi atau wawancara. Karena masing-masing periset mempunyai gaya, sikap, dan persepsi yang berbeda dalam mengamati fenomena maka hasil pengamatannya bisa berbeda meski fenomenanya sama.
5. **Triangulasi Metode.** Triangulasi metode merupakan usaha pengecekan keabsahan data dan temuan riset, maka triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk memperoleh hal yang sama. (Kriyantono, 2006)

Teknik keabsahan data yang dipilih untuk penelitian ini adalah menggunakan teknik triangulasi sumber. Hal ini dikarenakan peneliti ingin mengajukan bermacam-macam variasi pertanyaan, dan mengecek dengan berbagai sumber lain agar data yang didapat lebih kredibel. Kemudian peneliti juga ingin menggabungkan beberapa sumber hasil yang telah didapatkan, yaitu wawancara

[illegible]

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran umum lokasi penelitian merupakan gambaran umum mengenai wilayah yang digunakan sebagai lokasi penelitian. Data deskripsi wilayah dalam penelitian ini sebagian besar diambil dari data monografi Kabupaten Bekasi tahun 2017 - 2022 dan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi tahun 2012.

1. Letak, Batas dan Wilayah Kabupaten Bekasi

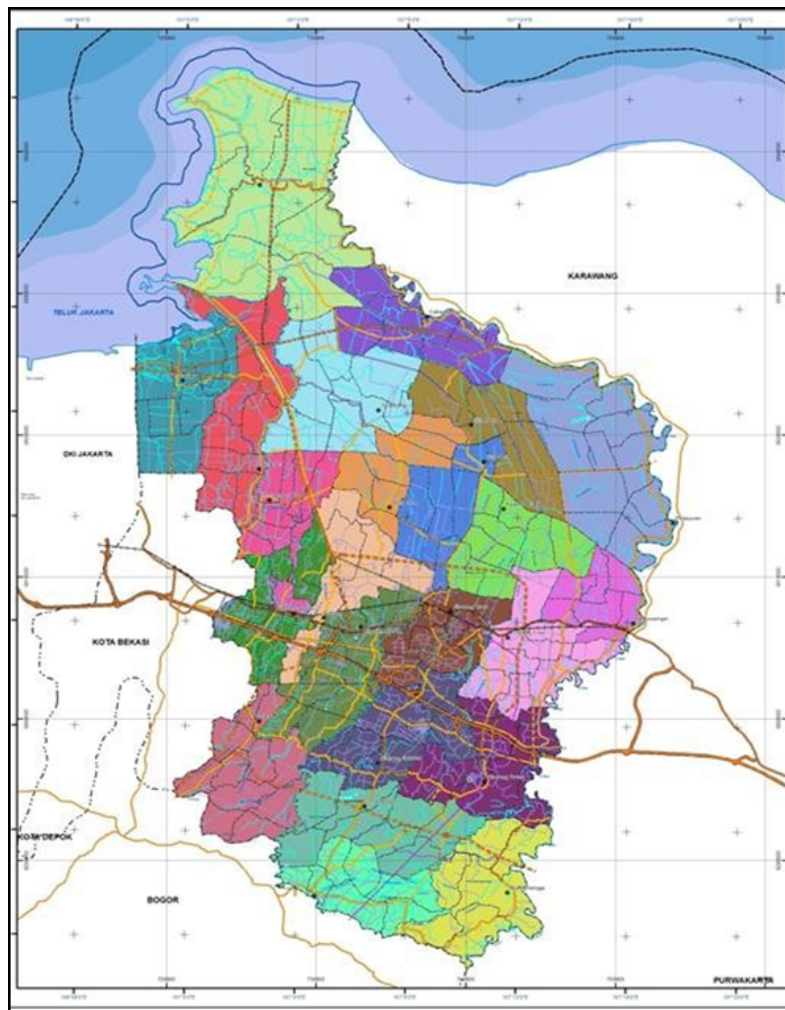
Kabupaten Bekasi mempunyai letak yang strategis karena dilalui oleh jalur regional yang menjadi perlintasan antara ibu kota propinsi dan ibu kota. Secara geografis Kabupaten Bekasi terletak antara 60 10' 53"-60 30' 6" Lintang Selatan dan 1060 48' 28"-1070 27' 29" Bujur Timur. Posisi tersebut menempatkan Kabupaten Bekasi berada di sebelah barat wilayah Propinsi Jawa Barat yang memanjang dari utara ke selatan. Wilayah Kabupaten Bekasi mempunyai luas 127.388 Ha

Secara administratif Kabupaten Bekasi mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor
- Sebelah Barat : DKI Jakarta dan Kota Bekasi
- Sebelah Timur : Kabupaten Karawang

Jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi sebanyak 23 kecamatan yang terdiri dari 180 desa dan 7 kelurahan. Jumlah desa/kelurahan di setiap kecamatan berkisar antara 6 sampai 13. Kecamatan dengan jumlah desa yang paling sedikit yaitu kecamatan Cikarang Pusat, Bojongmangu dan Muaragembong, sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Pebayuran. Kecamatan terluas adalah Muaragembong (14.009 Ha) atau 11,00 % dari luas kabupaten.

Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Bekasi



Sumber: Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bekasi
Tahun 2011-2031

Wilayah Kabupaten Bekasi mempunyai bentuk permukaan tanah yang berbeda antara wilayah sebelah selatan dan wilayah sebelah utara. Morphologi/bentuk muka tanah di wilayah selatan di dimensi diantara sisi daerah rendahnya terbentuk jalur rendah tempat mengalirnya air permukaan yang kita sebut kali atau sungai. Daerah dengan kondisi tanah yang lebih tinggi dapat berbentuk datar untuk daerah permukiman atau perumahan.

Ketinggian wilayah yang berada di sebelah selatan berdasarkan data peta yang diperoleh dimulai dari ketinggian ± 128 m dari muka laut rata-rata. Adapun kawasan yang terletak disebalah selatan ini meliputi Kecamatan Setu dan

Kecamatan Serang. Sebagian besar Kabupaten Bekasi berada pada kemiringan 0-25%.

Sedangkan untuk ketinggian wilayah utara sudah lebih datar, mulai dari utara jalan tol sampai pantai mempunyai ketinggian ± 20 m sampai 0 dari permukaan laut rata-rata. Adapun kawasan yang terletak disebelah utara ini meliputi Kecamatan Cikarang, Cibitung, Lemah Abang dan Kecamatan Kedungwaringin.

Berdasarkan data diatas secara umum tingkat kemiringan lahan (topografi) di Kabupaten Bekasi masih memungkinkan untuk pembangunan berbagai jenis kegiatan. Keadaan topografi antara bagian utara dan selatan Kabupaten Bekasi menciptakan peruntukan dan fungsi wilayah sebagai pengembangan potensi industri, pertanian dan pendukungnya diwilayah utara, sedangkan pengembangan industri manufaktur, perdagangan dan pariwisata dibagian selatan.

2. Demografi Penduduk Kabupaten Bekasi

Jumlah penduduk Kabupaten Bekasi tahun 2021 berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk Interim BPS Kabupaten Bekasi mencapai 3.157.962 jiwa penduduk dengan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 2.479 jiwa per km². Wilayah yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Tambun Selatan (9.990 jiwa km²), sedangkan yang paling rendah kepadatannya adalah Kecamatan Muaragembong (290 jiwa per km²).

Keberadaan penduduk menurut kecamatan tidak menyebar secara merata. Penduduk paling banyak berdomisili di Kecamatan Tambun Selatan yaitu 13,63% dari total penduduk Kabupaten Bekasi, sedangkan paling sedikit di Kecamatan Bojongmangu 0,89%. Penduduk yang berumur 15 tahun ke atas adalah mereka yang digolongkan sebagai penduduk usia kerja. Pada tahun 2021 kelompok usia ini berjumlah 2.965.716 orang. Dari penduduk usia kerja tahun 2021, yang termasuk angkatan kerja berjumlah 1.953.408 orang yang terdiri dari 1.756.261 orang bekerja dan 197.147 orang pengangguran terbuka.

Rasio jenis kelamin sebesar 104, yang terdiri dari 1.782.205 laki-laki dan 1.717.818 perempuan. Penduduk menurut umur menunjukkan bahwa penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencapai 2.422.579 orang atau 69,22%. Sedangkan penduduk yang belum produktif (<15 tahun) 983.091 orang atau 28,09 % dan yang

tidak produktif lagi (65 tahun ke atas) 94.353 orang atau 2,70 %. Sehingga rasio beban ketergantungan sebesar 44,45 yang berarti bahwa setiap satu orang penduduk usia produktif menanggung sebanyak 44 orang usia tidak produktif.

Menurut lapangan pekerjaan utama, angkatan kerja yang bekerja pada sektor industri pengolahan merupakan yang terbanyak diantara sektor yang lain yaitu 545.908 orang atau 37,07 persen dari total pekerja.

Jumlah penduduk akibat laju kelahiran dan terutama pertumbuhan penduduk yang tinggi akibat migrasi berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan masyarakat. Diantara kebutuhan tersebut adalah kebutuhan akan fasilitas untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Adapun fasilitas-fasilitas tersebut antara lain, perumahan, permukiman, pusat – pusat perbelanjaan, pusat pendidikan, tempat rekreasi, sarana kesehatan, dan lain-lain. Untuk memenuhi kebutuhan fasilitas tersebut dilakukan pembangunan, dalam melakukan pembangunan terutama yang bersifat fisik tentu saja akan memerlukan wadah atau ruang (lahan) sebagai tempat melakukan pembangunan, sedangkan jumlah luas lahan yang tersedia terbatas.

Lahan perkotaan menjadi prioritas utama bagi sebagian besar masyarakat untuk menunjang kegiatan dan kelangsungan hidupnya. Perkotaan dengan segala fasilitasnya dirasa akan dapat memberikan keuntungan dan kemudahan sehingga menarik orang untuk dapat menempati dan menguasai lahan perkotaan. Kebutuhan akan lahan ini juga didorong oleh pertumbuhan penduduk kota yang terdiri dari penduduk alami dan migrasi dari luar daerah yang terus bertambah. Permasalahan akan timbul jika lahan perkotaan yang semakin sempit bahkan tidak mampu lagi menampung semua kegiatan yang ada. Keadaan itu akan memicu perubahan penggunaan lahan di daerah pinggiran kota dengan berbagai pertimbangan tertentu.

3. Pola Penggunaan Lahan

Perkembangan pemukiman, perluasan kawasan bisnis perkantoran dan kawasan industri memperluas lahan terbangun dan mengurangi lahan yang tidak terbangun. Perluasan lahan terbangun mengurangi lahan budidaya pertanian, sawah, dan perkebunan yang beralih fungsi menjadi pemukiman, kawasan bisnis dan kawasan industri. Perluasan lahan pertanian bergeser dan merubah kawasan lindung.

Penggunaan lahan di Kabupaten Bekasi terjadi perubahan penggunaan lahan. Penggunaan lahan yang bertambah luasannya adalah pada Kawasan Suaka Alam, hutan mangrove sekunder, Pelestarian Alam dan Cagar Alam Budaya, pemukiman, semak belukar, tambak, tanah terbuka, dan bangunan industri, perdagangan dan perkantoran. Penggunaan lahan yang berkurang adalah hutan, kebun campuran, pertanian lahan kering, dan sawah. Penggunaan lahan yang perambahannya paling besar adalah pemukiman sebesar 4,23%, dan penggunaan lahan yang pengurangannya terbesar adalah 4,33%, dan hutan 5%.

Alih fungsi lahan sawah dan lahan pertanian lainnya seperti kebun campuran dan pertanian lahan kering menjadi lahan yang paling tertekan, luas lahan sawah terus berkurang beralih menjadi permukiman, perdagangan, perkantoran, industri atau bangunan lainnya. Penekanan fungsi lahan sawah menjadi lahan terbangun, kecenderungannya terus meningkat. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pemanfaatan lahan marginal. Menurut Dinas pertanian (2021) tercatat sawah tambahan 146,91 hektar, sangat jauh bila dibandingkan dengan pengurangan lahan sawah. Pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan, kamandirian dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya menjadi sangat penting dan strategis.

Penekanan fungsi lahan terbuka dan beralih menjadi kawasan terbangun semakin besar dengan adanya kawasan strategis nasional berupa kawasan industri di Kabupaten Bekasi seiring dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kawasan Industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

Berikut ini perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Bekasi tahun 2017 ke 2021.

Tabel 4.1 Perubahan Tutupan Lahan Kabupaten Bekasi 2017 ke 2021

No	Tutupan Lahan	2017		2021	
		Luas (Ha)	Luas (%)	Luas (Ha)	Luas (%)
1	Badan Air	1,510.39	1.19	886,56	0.70
2	Hutan	6,295.64	4.94	268,60	0.21

3	Hutan Kota, Jalur Hijau Dan Taman Kota	80.07	0.06	20	0.02
4	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Alam Budaya	-	-	45	0.04
5	Hutan Mangrove Sekunder	227.27	0.18	985,84	0.77
6	Pemukiman	31,109.00	24.42	36,470.80	28.63
7	Kebun Campuran	5,704.27	4.48	5,096.79	4.00
8	Pertanian Lahan Kering	4,487.94	3.52	3,831.30	3.01
9	RTH	12.01	0.01	6.91	0.01
10	Sawah	59,544.78	46.74	54,029.40	42.41
11	Semak Belukar	1,249.49	0.98	3,389.73	2.66
12	Tambak	6,347.68	4.98	8,909.03	6.99
13	Tanah Terbuka	1,193.06	0.94	1,869.59	1.47
14	Bangunan Industri, perdagangan dan Perkantoran	9,626.40	7.56	11,296.79	8.87
Jumlah		127,388.00	100.00	127,388.00	100.00

Sumber : Laporan DIKPLHD Kabupaten Bekasi, 2021

Berdasarkan tabel 4.1, luas penggunaan lahan terbesar adalah sawah sebesar 42,41%, diikuti pemukiman 28,65%, Bangunan Industri, Perdagangan Dan Perkantoran 8,87% dan lahan pertanian kebun campuran dengan pertanian lahan kering 7,01%.

4. Persampahan di Kabupaten Bekasi

A. Timbulan Sampah

Dengan jumlah penduduk Kabupaten Bekasi tahun 2021 (Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2022) sebesar 3.157.962 jiwa dengan potensi timbulan sampah (standar timbulan hasil survey sebesar 1,1 kg/org/hari) sebesar 3.546.580 Kg/org/hari atau 3.546,58 ton/hari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2 Timbulan dan Pelayanan Sampah Kabupaten Bekasi Tahun 2021

No	Item	Tahun 2021	Satuan
1	Jumlah Penduduk	3.157.962	Jiwa
2	Potensi Timbulan Sampah	3.546.580	Kg/org/hari
		3.546,58	ton/hari
		1.294.501,70	ton/tahun
3	Jumlah Sampah Yang Masuk	686,71	ton/hari

	TPA Burangkeng		
		250.649	ton/tahun
4	Pelayanan	19,36%	Persen

Berdasarkan perhitungan tersebut diatas didapatkan bahwa TPA Burangkeng hanya sanggup menangani atau menampung sebesar 19,36 % sampah, sedangkan untuk sisanya yang masih belum tertangani adalah sebesar 80,64 %.

B. Sarana dan Prasarana Persampahan

a. TPA Burangkeng

TPA Burangkeng berdiri tahun 1996, dengan Luas awal TPA sebesar 11.6 Ha. Dimana TPA Burangkeng terdiri dari 4 Zona A, B, C, dan D, dengan luas masing-masing adalah sebagai berikut:

- Zona A dengan luas 2,24 Ha
- Zona B dan C dengan luas 5,04 Ha
- Zona D dengan luas 3,92 Ha

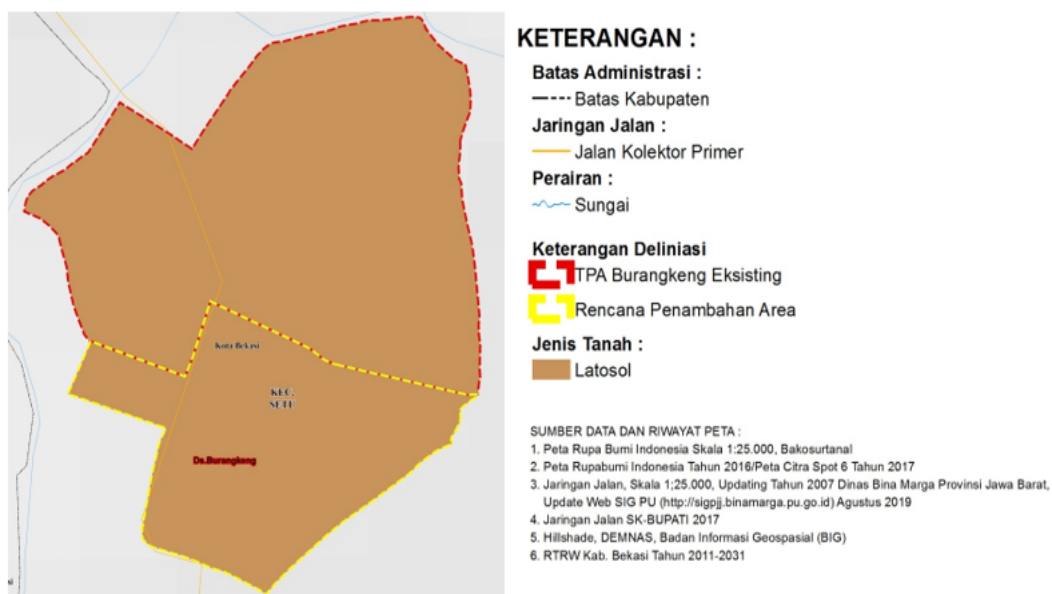
Dengan kondisi eksisting TPA, berkurangnya luas TPA dari 11,6 Ha karena adanya proyek Toll Cibitung – Cimanggis sebesar 4000 m²; 7000 m² untuk Japek 2 sehingga luas TPA menjadi 11,2 Ha. System pengelolaan yang diterapkan TPA Burangkeng masih menggunakan System Open Dumping dan Controlled Landfill. Adapun ketinggian tumpukan sampah yang awalnya 20 – 30 m. Kondisi jenis tanah di area TPA Burangkeng didominasi oleh tanah latosol. Latosol umumnya berwarna merah, kekuningan, atau kecokelatan, serta mempunyai tekstur liat. Konsistensinya gembur dengan struktur berupa remah. Struktur tanah latosol ini cocok untuk pertanian dan infiltrasi air ke dalam tanah juga cukup tinggi sehingga apabila area tanah latosol dijadikan tempat untuk TPA maka perlu diperhatikan pencemaran air lindi dari TPA dengan membangun kolam atau instalasi pengolahan air lindi karena dapat dengan mudah mencemarkan air tanah dan tanah itu sendiri.

Gambar 4.2 Kondisi TPA Burangkeng



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, 2022

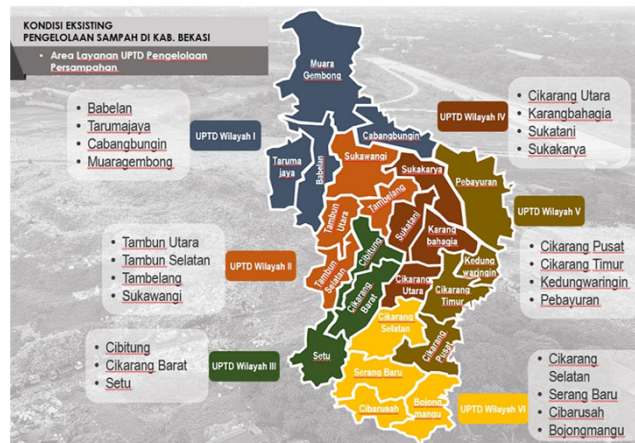
Gambar 4.3 Kondisi Jenis Tanah TPA Burangkeng



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, 2022

Sedangkan Penangan sampah di Kabupaten Bekasi dilakukan oleh masing-masing UPTD yang area kerjanya terdiri beberapa kecamatan. Untuk mengelola timbunan sampah pemerintah Kabupaten Bekasi memfasilitasi masing-masing UPTD dengan TPS, sarana angkut sampah dan personil. Sarana angkut sampah yang tersedia seperti dump truck, arm roll, pick up, patroli, baktor, dan tangki air. Sedangkan personil yang disiapkan untuk menangani sampah diantaranya pengawas, pesapon, driver, kru dan petugas kali.

Gambar 4.4 Area Pelayanan UPTD



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, 2022

Tabel 4.3 Pengangkutan Sampah Terlayani/Hari

No	UPTD	KK	RIT Swata	RIT DOM	TO T RIT	Rit x M3	M3/Ton	Kg	Kg/Jiw a
1	UPTD 1	7.700	16	15	31	88	29	29.146	20.402
2	UPTD 2	8.524	21	18	39	108	36	35.561	24.893
3	UPTD 3	11.994	75	20	95	117	39	38.650	27.055
4	UPTD 4	6.035	0	14	14	84	28	27.641	19.349
5	UPTD 5	5.950	123	19	141	111	37	36.590	25.613
6	UPTD 6	8.657	0	17	17	101	33	33.185	23.229
Total		48.860	235	101	336	608	201	200.772	140.540

Sumber : Laporan DIKPLHD Kabupaten Bekasi, 2021

Tabel 4.4 Pengangkutan Sampah Belum Terlayani

No	UPTD	KK	RIT Swata	RIT DOM
1	UPTD 1	97.003		
2	UPTD 2	148.027		
3	UPTD 3	123.532		
4	UPTD 4	89.605		
5	UPTD 5	63.853	20	
6	UPTD 6	101.016		
Total		623.037	20	0

Sumber : Laporan DIKPLHD Kabupaten Bekasi, 2021

Tabel 4.5 Sarana dan Prasarana Persampahan UPTD

No	Jenis Kendaraan	Jumlah Unit							Total	Total Kapasitas (M3)
		UPTD 1	UPTD 2	UPTD 3	UPTD 4	UPTD 5	UPTD 6	TPA		
1	Dump Truck	11	14	16	12	12	14	-	79	480
2	Arm Roll	8	8	8	6	7	7	-	44	174
3	Pick Up	1	2	3	2	4	3	2	17	51
4	Patroli	1	1	1	1	1	1	-	6	18
5	Baktor	11	12	9	15	18	13	1	79	78
6	Tangki Air	-	-	1	-	-	-	1	2	-
7	Exavator	-	-	-	-	-	-	12	12	-
8	Buldozer	-	-	-	-	-	-	6	6	-
9	Backhoe Loader	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Total		32	37	37	36	42	38	23	225	801

Sumber : Laporan DIKPLHD Kabupaten Bekasi, 2021

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan hasil wawancara dengan informan, hasil observasi dan data sekunder sebagai sumber datanya. Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepala Daerah (Penjabat Bupati Bekasi), Sekretaris Daerah, Pejabat-pejabat struktural dan fungsional pada Perangkat Daerah yang bersifat strategis, serta melibatkan unsur akademisi, insan media serta sampling beberapa anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang memiliki peran strategis dalam Pengelolaan Sampah daerah di Kabupaten Bekasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 15 (lima belas) orang

yang digunakan sebagai sumber data primernya.

a. Informan Satu

Informan Satu adalah Dr. H. Dani Ramdan, MT, saat ini beliau menjabat sebagai Penjabat Bupati Bekasi, beliau berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang juga memegang jabatan Struktural Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat.

Beliau dilantik sebagai Penjabat (PJ) Bupati Bekasi pada tanggal 23 Mei Tahun 2022 menggantikan Akhmad Marjuki yang berakhir masa jabatannya di tanggal 22 Mei 2022, Beliau dilantik berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.32-1178 tahun 2022 tanggal 12 Mei 2022 tentang pengangkatan Penjabat Bupati Bekasi.

b. Informan Dua

Informan kedua yaitu H. M. BN Holik Qodratullah, SE, M.Si beliau merupakan politisi Partai GERINDRA yang menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bekasi periode Tahun 2019-2024 menggantikan Aria Dwi Nugraha melalui pengucapan sumpah dan janji jabatan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi Tahun 2020 lalu.

c. Informan Ketiga

Informan ketiga yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi, H. Entah Ismanto, SH, MM, Beliau dilantik sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi menggantikan posisi Drs. Dedy Supriadi MM yang telah dilantik menjadi Sekretaris Daerah

d. Informan Keempat

Informan keempat yaitu Syafri Donny Sirait, AP, SH, M.Si, beliau saat ini

menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi

e. Informan Kelima

Informan kelima yaitu Mansur Sulaeman, S. AP, MM, beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi

f. Informan Keenam

Informan Keenam yaitu Dr. H. Munawar Fuad Noeh, M.Ag, beliau merupakan Anggota Tim Pengelolaan Sampah Daerah (TP2D) Kabupaten Bekasi

g. Informan Ketujuh

Informan ketujuh yaitu Drs. Djoko Prawiro, MM beliau merupakan ASN Kabupaten Bekasi yang saat ini menjabat sebagai Camat Setu

h. Informan Kedelapan

Informan kedelapan yaitu Lurah Kunang, beliau merupakan Kepala Desa Burangkeng Kecamatan Setu

i. Informan Kesembilan

Informan kesembilan yaitu Fadly Marissatrio, SE, beliau merupakan ASN Kabupaten Bekasi yang saat ini menjabat sebagai Fungsional Perencana di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Bappeda Kabupaten Bekasi.

j. Informan Kesepuluh

Informan kesepuluh yaitu Zulfiah, SE, MM beliau merupakan ASN Kabupaten Bekasi yang saat ini menjabat sebagai Fungsional Perencana dan Sub Koordinator Pembangunan Manusia pada Bappeda Kabupaten Bekasi.

k. Informan Kesebelas

Informan kesebelas yaitu R. Sopyan Rahayu, S.IP, M.Si, beliau merupakan ASN Kabupaten Bekasi yang saat ini menjabat sebagai Kepala UPTD Pengelolaan Persampahan Wilayah III (Cibitung, Cikarang Barat dan Setu) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi.

Dalam upaya menjawab rumusan masalah di dalam penelitian ini, peneliti menyusun hasil penelitian secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah dalam rangka mendapatkan hasil penelitian yang optimal.

Berdasarkan rumusan masalah penelitian bagaimana Strategi Eksisting (Strategi yang saat ini dilaksanakan) oleh Pemerintah Daerah dalam upaya Pengelolaan Sampah daerah di Kabupaten Bekasi, peneliti menggunakan pendekatan Evaluasi Semu dalam teori evaluasi kebijakan (William N Dunn, Analisis Kebijakan Publik, 2000).

Pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi saat ini masih terbilang kurang, hal ini disebabkan Kabupaten Bekasi hanya memiliki 1 (satu) TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yaitu TPA Burangkeng yang terletak di Kecamatan Setu, Kapasitas TPA Burangkeng juga sangatlah overload saat ini, dikarenakan penambahan volume sampah yang datang setiap harinya oleh sampah rumah tangga maupun industry.

4.2.1. Strategi Eksisting yang saat ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Bekasi

Melalui penelitian yang dilaksanakan, telah didapatkan data untuk menggambarkan kondisi dan strategi eksisting (yang telah dilakukan) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, pertama yang harus diketahui adalah bagaimana sasaran daerah di Kabupaten Bekasi dan bagaimana usaha pencapaiannya.

Adapun strategi yang saat ini dilaksakan Pemerintah Daerah dalam upaya



mencapai Sasaran Daerah di Kabupaten Bekasi dapat dikembangkan melalui analisa sebagai berikut :

Pembangunan daerah di Kabupaten Bekasi sebenarnya sudah cukup baik dan berkembang pesat, terutama dalam bidang perekonomian dan infrastruktur wilayah, hal ini ditandai dengan sudah terbangunnya infrastruktur yang mendukung konektivitas antar wilayah, seperti jalan tol, jembatan, jalan penghubung antar kawasan industri, jalan penghubung antar kecamatan dan flyover. Namun di tiap kecamatan tidak di dapati adanya TPST.

Hal ini seperti yang dijelaskan oleh informan ketujuh, Fuad Hasan, S.STP yang menjabat sebagai Subkoordinator Infrastruktur di Bappeda sebagai berikut :

“Kabupaten Bekasi yang memiliki luas wilayah sebesar 1.273,88 km², mulai maju dalam pembangunan infrastruktur wilayah, sudah ada Jalan Tol Gabus (Cibitung – Marunda) yang mempermudah pengangkutan logistik dari tol cikampek ke pelabuhan Tanjung Priok melalui Marunda. Pembangunan TPST di tiap kecamatan baru menjadi prioritas pembangunan di Tahun 2024 besok, semoga dengan terbangunnya TPST di tiap kecamatan akan mengurangi beban TPA Burangkeng”

Pembangunan terus dilakukan di Kabupaten Bekasi mengikuti kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui metode *bottom-up* lewat forum Musrenbang Desa – Kecamatan – Kabupaten – Provinsi hingga Nasional. Keuntungan lain yang dimiliki oleh Kabupaten Bekasi adalah memiliki Kawasan Industri terbesar se-Asia Tenggara yang tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Bekasi, namun mengingat alat transportasi pembawa sampah yang digunakan adalah dumptruck dan jumlahnya terbatas, maka pengambilan sampah di masyarakat juga kadang terhambat.

Gambaran umum pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi minim, hal ini

sesuai dengann pernyataan Informan Kedelapan, Ibu Zulfiah yang merupakan Subkoordinator Pembangunan Manusia pada Bappeda.

Beliau mengatakan *“Menurut saya Kabupaten Bekasi mengalami kemajuan pesat dalam infrastruktur dan industry, namun saya mengatakan pengelolaan sampah masih buruk, dikarenakan sampah-sampah yang diangkut dari rumah-rumah warga kadang truk pengangkutnya tidak datang setiap minggu, sehingga terjadi penumpukan, kalua sudah begini warga yang tidak mau terganggu akhirnya membuang sampah di sungai / kali”*.

Zulfiah juga menjelaskan *“dengan membuang sampah di sungai, maka Kesehatan warga sekitar akan terganggu, karena masih banyak warga yang tinggal di bantaran sungai khususnya CBL”*

Dari kedua informan tadi, didapatkan bahwa kenyataannya pembangunan di Kabupaten Bekasi sudah cukup maju dan pesat, namun pengelolaan sampah masih kurang.

Selain itu didapat bahwa strategi eksisting (yang dilaksanakan) pemerintah daerah Kabupaten Bekasi saat ini dalam upaya pengelolaan sampah adalah :

1. Mengandalkan TPA Burangkeng
2. Mengandalkan dumptruck yang terbatas
3. Belum adanya aturan dan sanksi tegas bagi masyarakat buang sampah sembarangan

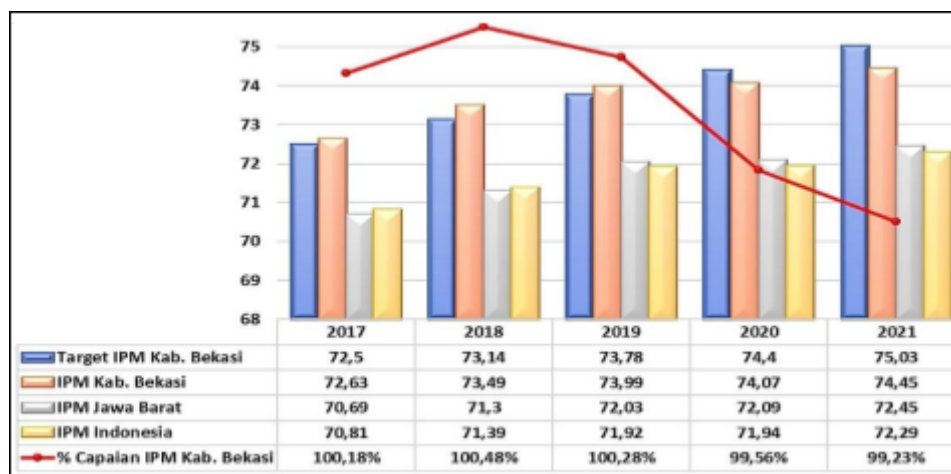
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Bekasi selama tahun 2017-2021 menunjukkan angka yang terus meningkat, yaitu dari 72,63 di tahun 2017 menjadi sebesar 74,45 di tahun 2021. Dibandingkan dengan IPM Jawa Barat dan Indonesia, nilai IPM Kabupaten Bekasi selama kurun waktu tersebut juga berada di atas Jawa Barat dan Indonesia. Meskipun

perekonomian daerah melambat di tahun 2020 akibat Covid-19, namun pembangunan manusia di Kabupaten Bekasi masih tetap berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat melalui nilai IPM Kabupaten Bekasi yang tetap meningkat ke angka 74,07 di tahun 2020, dari sebelumnya sebesar 73,99 di tahun 2019. Meski secara capaian terhadap target menurun akibat Covid-19, nilai IPM Kabupaten Bekasi masih tetap berada di atas nilai IPM Jawa Barat dan nasional selama tahun 2020 dan 2021, dimana nilai IPM Jawa Barat pada tahun tersebut adalah sebesar 72,09 dan 72,45, serta Indonesia sebesar 71,94 dan 72,29.

Hal ini tersaji dalam grafik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bekasi, IPM Provinsi Jawa Barat dan IPM Nasional sebagai berikut :

Gambar 4.3
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kab. Bekasi Jawa Barat, dan Indonesia Tahun 2017-2021



Sumber: RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 dan BPS, diolah

Dari seluruh komponen IPM, komponen yang mengalami penurunan di tahun 2020 adalah pengeluaran per kapita masyarakat, yang menurun dari Rp. 11.610.000,-/ orang / tahun menjadi Rp.11.241.000,-/orang/tahun dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi daerah akibat Covid-19, sementara yang

lainnya tetap mengalami peningkatan meski di tengah kondisi Covid-19. Dengan semakin membaiknya ekonomi daerah di tahun 2021, seluruh komponen IPM kembali meningkat, termasuk pengeluaran per kapita masyarakat yang naik sebesar Rp.100.000/orang/tahun.

Gambar 4.4



Komponen IPM Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2021

Sumber: <https://jabar.bps.go.id>

Sementara itu, bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022, RLS merupakan satu- satunya komponen IPM yang tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan meski nilainya terus mengalami peningkatan. Sedangkan pada HLS, capaiannya mengalami penurunan sejak tahun 2019 meski secara nilai juga terus mengalami kenaikan. Tidak mampu tercapainya kedua komponen IPM tersebut disebabkan oleh masih adanya siswa yang putus sekolah akibat kemiskinan maupun faktor lainnya. Sementara posisi Kabupaten Bekasi yang dekat dengan DKI Jakarta dan kabupaten/kota besar lainnya seperti Kota Bekasi, Kabupaten Bogor dan Karawang telah membantu Kabupaten Bekasi dalam memenuhi pelayanan

pendidikan dan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat. Kawasan industri yang besar juga telah membantu perekonomian masyarakat melalui pembukaan lapangan kerja dan usaha sehingga target indikator makro yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik meski belum seluruhnya optimal.

Tabel 4.5

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) - Tahun					
	TARGET RPJMD	9,01	9,2	9,39	9,58	9,78
	REALISASI	8,82	8,84	8,84	9,12	9,3
	% CAPAIAN	97,89	96,09	94,14	95,20	95,09
2.	Harapan Lama Sekolah (HLS) - Tahun					
	TARGET RPJMD	12,52	12,8	13,09	13,93	13,65
	REALISASI	12,63	13,05	13,08	13,09	13,1
	% CAPAIAN	100,88	101,95	99,92	93,97	95,97
3.	Angka Harapan Hidup (AHH) - Tahun					
	TARGET RPJMD	73,29	73,34	73,39	73,54	73,49
	REALISASI	73,30	73,43	73,56	73,68	73,81
	% CAPAIAN	100,01	100,12	100,23	100,19	100,44
4.	Pengeluaran per Kapita per Tahun (dalam ribu rupiah)					
	TARGET RPJMD	10.532,76	10.790	10.719	10.812,0 ₉	10.905
	REALISASI	10.790,00	11.155	11.610	11.241	11.341
	% CAPAIAN	102,44	103,38	108,31	103,97	104,00

**Target dan Realisasi Komponen IPM Kabupaten
Bekasi Tahun 2017-2022**

Sumber: RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 dan BPS, diolah

Strategi lainnya yang saat ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

Bekasi adalah melalui optimalisasi Tanggungjawab Lingkungan Sosial Perusahaan (TJSPL) atau CSR (*Corporate Social Responsibility*), CSR.

Kabupaten Bekasi merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang berbatasan dengan ibukota, fungsinya dalam menopang daerah Ibukota juga didukung dengan keberadaan banyak perusahaan yang mendirikan pusat produksi dan distribusinya di Kawasan Industri yang ada di Kabupaten Bekasi, hal ini berdampak pada pertumbuhan penduduk yang bertambah tiap tahunnya, banyaknya pendatang dari berbagai daerah untuk mencari lapangan pekerjaan di Industri dan sektor lain, hal ini yang membuat semakin tinggi angka pengangguran tiap tahunnya. Akan tetapi di sisi lain, dengan banyaknya perusahaan di Kawasan Industri yang menjalankan usahanya di Kabupaten Bekasi menjadikan Kabupaten Bekasi sebagai daerah yang memiliki potensi ekonomi besar di Indonesia.

Berdasarkan metode observasi yang peneliti lakukan, pembangunan di Kabupaten Bekasi sebenarnya bisa berkembang pesat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, namun ada beberapa faktor yang menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan sampah, diantaranya :

- a. Sanksi dan Ketegasan Kepala Daerah terhadap penegakan Perda Lingkungan
- b. Integritas Kepala Perangkat Daerah bidang lingkungan hidup beserta jajarannya dalam melaksanakan program kegiatan pengelolaan persampahan



- c. Perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran dalam pengelolaan sampah
- d. Keterlibatan unsur-unsur pentahelix dalam membangun daerah (Kabupaten Bekasi)
- e. Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan yang ketat

Berdasarkan penjelasan dari Informan Satu PJ Bupati Kabupaten Bekasi, Dr. H. Dani Ramdan, MT, mengatakan :

“Era Kepemimpinan saya yang masuk pada tengah tahun anggaran 2022 belum dapat berjalan optimal, dan hanya menggunakan anggaran yang tersedia. Ditinjau dari strategi intervensi yang diterapkan dalam tahun berjalan, pemerintah Kabupaten Bekasi lebih berfokus pada penguatan implementasi dan pengendalian. Dalam hal ini, implementasi tersebut dijalankan ragam agenda kegiatan, salah satunya adalah Rapat Pimpinan (Rapim) mingguan yang dilaksanakan setiap hari Selasa. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menciptakan sistem kendali atas kinerja dari seluruh pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bekasi, baik dari sisi struktural maupun fungsional. Hal tersebut terkait dengan penyampaian progres mingguan target sasaran yang meliputi target input (penyerapan anggaran) dan output (hasil penggunaan anggaran), apakah sudah dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.”

Melalui kegiatan Rapim mingguan, Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat mengidentifikasi bersama terkait aspek-aspek yang telah berjalan sesuai dengan rencana (on the track), ataupun aspek yang mengalami kendala maupun hambatan dalam pelaksanaannya. Sehingga dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat memberikan atensi khusus dan strategi penguatan yang langsung fokus kepada titik hambatan tersebut, dengan memfokuskan pada strategi penggunaan anggaran dan juga kinerja dari pelaksanaannya sebagai sebuah langkah percepatan.

Melalui data yang diperoleh lewat beberapa link media sosial Pemerintah Daerah, Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi yang di dalam penelitian ini merupakan Informan Kedua menegaskan bahwa situasi pemerintahan yang di pimpin oleh Bapak Pj Bupati Bekasi dimulai pada tengah tahun, sehingga menciptakan kondisi

dimana roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan hanya mampu menggunakan anggaran kas yang tersedia di tahun berjalan. Namun demikian, pada tahun berjalan tersebut terdapat momen perubahan anggaran, hal ini menjadi peluang bagi Bapak PJ Bupati Bekasi untuk berfokus pada strategi penajaman anggaran pada aspek-aspek tertentu yang sekiranya dapat lebih dioptimalkan, seperti masalah perbaikan infrastruktur jalan, hingga masalah sosial ekonomi yaitu pengangguran dan kemiskinan.

Lanjutnya Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, BN Kholik M.Si melalui beberapa berita online di akun media sosial Prokopim Kabupaten Bekasi mengatakan :

“Salah satu contoh pengelolaan sampah yang bisa berhasil adalah melalui penegakan peraturan daerah, kepala daerah harus tegas menindak para pelanggar pembuang sampah sembarangan sehingga menimbulkan efek jera”.

4.2.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Persampahan

Kabupaten Bekasi merupakan daerah di Provinsi Jawa Barat yang sebenarnya memiliki banyak potensi di segala bidang, diantaranya Potensi Perekonomian dan Potensi SDM (Sumber Daya Manusia), potensi-potensi tersebut harus dimanfaatkan sebagai peluang dan kekuatan bagi Kepala Daerah yang memimpin Kabupaten Bekasi. Kecakapan dalam berkolaborasi dengan sektor swasta dalam melibatkan perusahaan-perusahaan di dalam pembangunan dampaknya tentu akan memberi manfaat yang luas bagi kesejahteraan di Kabupaten Bekasi. Hal tersebut sudah dilakukan dalam berbagai program TJSLP (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan) / CSR (*Coorporate Social Responsibility*) yang telah banyak membantu Kabupaten Bekasi dalam upaya-upaya peningkatan kesejahteraan di masyarakat.

Seperti yang dikemukakan oleh Informan Pertama (PJ Bupati Bekasi) dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Senin Tanggal 20 Februari 2023 sebagai berikut :

“Salah satu peluang yang juga menjadi kekuatan daerah Kabupaten Bekasi adalah

kehadiran industri-industri. Sebagaimana diketahui, Kabupaten Bekasi merupakan daerah industri yang melibatkan banyak pelaku bisnis. Dalam kaca mata pemerintahan, hal ini membawa peluang yang cukup menguntungkan dari ragam aspek. Ditinjau dari sisi pemasukan daerah, adanya industri juga mendatangkan sumber dana pajak yang dapat dimanfaatkan oleh daerah. Sementara dari sisi ekonomi bagi masyarakat, kehadiran industri baik dari saluran CSR maupun yang lain dapat menyerap tenaga kerja dan juga memberikan pembekalan kompetensi dan juga kemandirian bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah menilai bahwa hubungan baik dengan ragam industri ini menjadi salah satu peluang yang perlu tetap terjaga”.

TJSLP atau CSR sudah berjalan cukup baik namun belum optimal pelaksanaannya di Kabupaten Bekasi, dari data yang didapat, terdapat 7.339 perusahaan yang menjalankan usaha nya di Kabupaten Bekasi, diantaranya ada 48 perusahaan yang aktif berpartisipasi dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada masyarakat dan memberikan laporannya kepada Pemerintah Daerah sebagai Tim Fasilitasi TJSLP, namun hal ini dirasa belum optimal, karena jumlah partisipan dari TJSLP tersebut terbilang masih sangat sedikit dan yang dilakukan oleh perusahaan hanya sebatas bantuan-bantuan sosial saja, padahal perusahaan dapat juga dilibatkan dalam kegiatan pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sarana prasarana kemasyarakatan lainnya seperti, taman, sekolah, rehabilitasi pasar dan sebagainya. Fenomena ini sangat disayangkan karena Kabupaten Bekasi merupakan daerah yang memiliki Kawasan Industri terbesar di Asia Tenggara, namun jumlah perusahaan yang berperan serta dalam CSR sangat sedikit.

Hal ini didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh Informan Keempat yaitu Ketua DPRD Kabupaten Bekasi BN Holik Qodratullah, SE, M.Si. beliau mengatakan :

“Selain dari sisi kultur organisasi, hal lain yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Bekasi juga terkait aspek optimalisasi Pelaksanaan CSR di Kabupaten Bekasi, Setiap tahunnya Pemerintah Daerah melaksanakan yang namanya Musrenbang dari Tingkat Desa – Kecamatan –

Kabupaten hingga ke Tingkat Nasional, jika ditelaah semua usulan pembangunan yang diajukan terbilan penting, dan perlu di akomodir, tapi semua itu mentok ke keterbatasan APBD kita (Kabupaten Bekasi) yang saat ini hanya berkisar 6 Trilyun Rupiah lebih, jika dijumlahkan seluruh usulan tersebut besaran biayanya dibutuhkan 40 Trilyun Rupiah, maka jika hanya bergantung pada APBD saja, Pembangunan kita akan terus kurang, harus dicari solusi dan pendanaan yang bersifat inovatif melibatkan sektor swasta (Industri), ini bisa dilakukan melalui CSR.”

Optimalisasi pelaksanaan CSR dan penajaman pelaksanaan anggaran dapat disimpulkan sebagai salah satu strategi yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya Pengelolaan Sampah Daerah. Berdasarkan pandangan dari PJ Bupati Bekasi, pengalokasian anggaran yang ada sebelumnya masih belum dapat dikatakan sepenuhnya tepat sasaran. Dalam artian, masih ada program kegiatan yang seharusnya mendapatkan fokus alokasi anggaran jika ditinjau dari sisi urgensinya, justru belum bisa mendapatkan anggaran sebagaimana kebutuhan. Sebaliknya, masih terdapat kegiatan-kegiatan yang dirasa tidak terlalu urgen dari sisi substansi justru mendapatkan anggaran dana yang terlampau besar. Sehingga dapat ditinjau berdasarkan dari penjelasan PJ Bupati Kabupaten Bekasi tersebut, permasalahan anggaran lebih merujuk pada belum tercapainya pemrioritasan yang optimal dari sisi kebutuhan dan urgensi dari program kegiatan yang ada.

Tantangan lain yang juga cukup krusial juga berasal dari faktor eksternal, yaitu masyarakat itu sendiri. Sebagaimana pernyataan dari PJ Bupati Bekasi, beliau mengatakan

“Situasi di Kabupaten Bekasi memperlihatkan kecenderungan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan. Untuk menjawab tantangan ini, saya melakukan upaya pemulihan kepercayaan masyarakat melalui transparansi kegiatan dan juga anggaran yang telah ataupun yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini dilakukan agar masyarakat memiliki informasi terkait progres kinerja dari pemerintah dan masyarakat dapat melakukan penilaian dan perlahan menaikkan kepercayaan mereka terhadap pemerintah”.

Proses transparansi berjalan dengan memanfaatkan saluran-saluran media yang dimiliki oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi, seperti sosial media ataupun situs website, serta bersinergi dengan dinas-dinas terkait di tingkat kecamatan, kelurahan dan juga desa. Upaya ini dilaksanakan agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses informasi hingga ke tingkat yang lebih kecil. Transparansi tidak hanya berfokus pada keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai, namun juga progres yang sedang berjalan. Sehingga, sekalipun target-target belum tercapai, pemerintah Kabupaten Bekasi tetap mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pengendalian dan pemantauan atas kinerja yang dilaksanakan. Strategi ini dipandang cukup dapat membawa perubahan. PJ Bupati Kabupaten Bekasi menyampaikan bahwa saat ini masyarakat perlahan mulai memberi atensi yang lebih untuk terlibat dalam segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Berbicara terkait ragam faktor peluang yang dimiliki oleh Kabupaten Bekasi dalam mewujudkan pemerintahan yang dapat dikatakan tepat dan sesuai target tujuan, sejatinya Kabupaten Bekasi memiliki beberapa peluang yang menjadi poin positif dan mendukung. Pertama, ditinjau dari sisi anggaran, kapasitas fiskal, Kabupaten Bekasi merupakan daerah yang cukup bagus jika disandingkan dengan daerah-daerah lain. Sehingga dapat dikatakan, kondisi fiskal yang cukup stabil dapat memperluas ruang gerak pemerintah dalam melakukan optimalisasi anggaran bagi program-program yang akan dijalankan. Namun demikian, hal ini perlu diselaraskan dengan komitmen daerah terkait pemrioritasan anggaran dan optimalisasinya.

Faktor peluang kedua adalah dari segi Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh PJ Bupati Bekasi

“SDM di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bekasi dapat dinilai cukup bagus dan mendukung untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Hanya saja hal ini

perlu mendapatkan motivasi dan didorong dengan target yang terukur. Kapasitas SDM yang cukup berpeluang dapat dilihat dari adanya peningkatan akselerasi pemenuhan target pemerintah yang telah diselenggarakan melalui Rapim.”

Ketiga, peluang juga terkait dengan SDM dari masyarakat Kabupaten Bekasi sendiri yang dirasa kritis dan proaktif. Karakter Masyarakat Kabupaten Bekasi dapat digambarkan sebagai masyarakat yang cukup vokal dalam menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Hal ini justru dipandang sebagai hal positif oleh PJ Bupati Bekasi. Dengan adanya gerakan warga yang vokal semacam ini, terjalin sebuah komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Sekalipun beliau mengakui bahwa menghadapi dan menanggapi protes dan aspirasi masyarakat bukan pekerjaan yang mudah, hal ini lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan menghadapi kelompok masyarakat yang pasif. Sehingga dengan kata lain, adanya sikap kritis warga dan komitmen daerah dalam menciptakan ruang-ruang komunikasi dapat menjadi peluang yang baik untuk menjalankan pemerintahan.

Penjelasan dari informan PJ Bupati Bekasi terkait kondisi riil dan segala peluang dan hambatannya terkait pembangunan di wilayah Kabupaten Bekasi juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh Informan Ke-Delapan yaitu Bapak Epi Nurdin, SH selaku Kepala Bagian Bidang Hukum di Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bekasi Bapak Epi Nurdin, SH dilaksanakan pada tanggal 22 Februari tahun 2023).

“Bidang Hukum juga menjadi salah satu hal yang turut berperan dalam menciptakan substansi produk-produk hukum yang menunjang segenap Pemerintahan Kabupaten Bekasi dalam menjalankan pemerintahan yang tepat dan sesuai dengan target dan tujuan. Salah satu contohnya adalah Penyusunan Peraturan Daerah tentang pengelolaan lingkungan hidup, menurut saya harus ada

revisi terkait sanksi yang membuat efek jera di masyarakat”

Kondisi hambatan dan peluang dalam Pengelolaan Sampah daerah di Kabupaten Bekasi dalam Pengelolaan Sampah Daerah juga berkaitan erat dengan pencapaian target Indikator Makro terutama Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bekasi, hal ini selaras dengan pernyataan Informan Kelima, Dr. Iis Sandra Yanti, S.STP, M.IP selaku Kepala Bagian Administrasi Organisasi Setda Kabupaten Bekasi,

“Pengelolaan persampahan seharusnya bisa teratasi jika Dinas Lingkungan Hidup Menyusun program kegiatannya sesuai dengan IKU yang dimiliki, tujuan pencapaian IKU adalah agar seirama dengan pelaksanaan anggaran yang diberikan sehingga tidak kemana-mana, jika kekurangan truk sampah seharusnya bisa mengganggu truk sampah karena ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak”

Hambatan dari pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak mengacu ke pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah masih lemahnya fungsi pengendalian dan pengawasan yang dilaksanakan oleh TAPD, TAPD dalam melaksanakan verifikasi DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) seharusnya lebih tajam mengacu ke pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bekasi. Misal Indikator Tingkat Kemiskinan yang diampu oleh Dinas Sosial, TAPD harus lebih jeli menelaah setiap rincian belanja pada DPA Dinas tersebut, berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, terkadang sering terjadi Rincian Belanja yang tidak memberi dampak langsung kepada pencapaian IKU Daerah, misal masih terdapat rincian anggaran yang seharusnya ditujukan kepada Pengentasan Kemiskinan malah berisi Perjalanan Dinas Luar Daerah seperti *Study* Banding, Workshop atau Pengiriman Peserta Bimbingan Teknis. Hal seperti ini akan menambah beban pada APBD Kabupaten Bekasi, namun target capaian IKU tetap tidak akan tercapai, sehingga pembangunan juga terhambat.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Sampah juga dikemukakan oleh Informan Ketujuh Dwy Sigit Andrian, S.STP, M.Si yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bekasi, dalam wawancara yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Maret, mengatakan

“Kabupaten Bekasi memiliki potensi tinggi dalam pencapaian kesejahteraan di masyarakat, melalui APBD yang sebesar 6 Trilyun lebih, seharusnya dapat memberikan dampak multiplier pembangunan yang cukup signifikan jika anggaran yang dilaksanakan Perangkat Daerah tepat sasaran, saat ini pembangunan masih belum optimal dan pelayanan publik yang kurang merata, Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sampah seharusnya sudah mulai bisa di aplikasikan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Swasta, Magot adalah salah satunya dan dapat dimulai di tingkat desa dalam pengelolaan sampahnya

Dari wawancara dan pernyataan tersebut, dapat ditemukan faktor penghambat dalam pencapaian Pengelolaan Sampah daerah, antara lain belum meratanya pembangunan infrastruktur dan belum jalannya teknologi tepat guna yang bisa di aplikasikan oleh Pemerintah Daerah, beberapa upaya dalam mengatasi hambatan tersebut diantaranya melalui pemanfaatan teknologi tepat guna di mulai dari tingkat desa dalam pengelolaan sampah.

4.2.3. Strategi Intervensi yang dipilih dalam Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Bekasi

A. Analisa Hasil Penelitian

Analisa yang dipakai dalam pembahasan penelitian ini adalah menggunakan Analisa ASOCA untuk mendapatkan Strategi Intervensi yang tepat dalam Pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi. Analisa ASOCA adalah identifikasi sebagai faktor sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika



yang dapat memaksimalkan kemampuan, kekuatan, peluang, budaya atau kebiasaan dan kecerdasan atau ketajaman berpikir (*agility*) secara keseluruhan dapat meminimalisir ancaman dan memenangkan persaingan dalam dunia bisnis. Dalam mengambil keputusan, organisasi harus mempertimbangkan faktor internal yang meliputi kemampuan, kekuatan, dan kelemahan serta faktor eksternal yang meliputi peluang, budaya, dan kecerdasan atau ketajaman pemikiran konsumen. Analisis ASOCA digunakan jika penentu strategi perusahaan mampu memaksimalkan peran faktor kemampuan, kekuatan dan manfaat peluang dan kecerdasan konsumen sekaligus waktu berperan sebagai alat untuk meminimalkan kelemahan yang terdapat dalam tubuh organisasi dan menekan ancaman yang timbul dan harus ditangani dengan tepat. Analisis ASOCA juga dapat digunakan untuk membantu analisis strategi dan referensi logis dalam diskusi sistematis tentang situasi perusahaan dan alternatif situasi perusahaan, serta alternatif utama yang mungkin dipertimbangkan perusahaan (Misrofingah, 2020: 126-127).

Menurut Ermaya (2013: 18), ASOCA merupakan singkatan dari: *Ability* (Kemampuan), *Strength* (Kekuatan), *Opportunities* (Peluang), *Culture* (Budaya) dan *Agility* (Kecerdasan). Analisis ASOCA menambahkan unsur *Culture* (Budaya) dan *Agility* (Kecerdasan) sebagai unsur yang penting dalam menemukan strategi pemecahan masalah, pengambilan putusan dan dapat dikembangkan dalam mengikuti perubahan, perkembangan zaman dan kebutuhan. Sinergitas elemen-elemen ASOCA sangat penting dikelompokkan ke dalam lingkungan strategis internal dan eksternal yang dapat dibuat dalam bentuk matriks analisis ASOCA. Matriks analisis ini cocok dengan Indonesia yang majemuk dan memiliki letak strategis di dunia. Merujuk pada pembagian faktor dalam penjelasan analisis ASOCA, hal tersebut dibagi menjadi dua hal yaitu faktor

internal dan eksternal. Adapun faktor-faktor internal dalam analisis ASOCA adalah *Ability*, *Strengths* dan *Agility*. Sementara untuk faktor eksternal meliputi *opportunities* dan *cultures*. Melalui penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Kabupaten Bekasi, didapatkan Lima Faktor Internal dan Lima Faktor Eksternal yang mempengaruhi Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bekasi, kemudian disusun sebagai sebuah matriks yang dikenal sebagai Matriks Sebelas Kotak. Dari data-data yang telah didapatkan dari penelitian, peneliti akan kembangkan faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi bahan analisa sebagai berikut :

A.1. Faktor Internal :

1. Potensi anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi

Potensi Fiskal merupakan gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin. (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 54 / PMK.07/2014) tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah

Berdasarkan data yang diperoleh melalui penelitian ini, APBD Kabupaten Bekasi yang dapat diperuntukan Belanja Barang Jasa untuk kebutuhan Pembangunan (Dua koma Enam Trilyun Rupiah Lebih). Kekuatan APBD Kabupaten Bekasi yang cukup besar ini, merupakan dampak dari kondisi geografis Kabupaten Bekasi yang merupakan daerah penyangga ibukota Provinsi DKI Jakarta serta Peran Kabupaten Bekasi sebagai Daerah yang memiliki Kawasan Industri terbesar di Asia Tenggara.

2. Kebijakan Pj Bupati Bekasi

Kebijakan dapat diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam beberapa wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan, di dapatkan bahwa sebagian besar masyarakat dan ASN, puas dengan beberapa Kebijakan yang telah diturunkan oleh Pj Bupati Bekasi Dr. H. Dani Ramdan, MT, melalui kebijakannya, Kabupaten Bekasi beberapa kali telah mendapatkan penghargaan dari tingkat Provinsi maupun Nasional, Kualitas Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga meningkat, hal ini ditandai dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat, baik dalam bidang infrastruktur, sosial, lingkungan hidup dan pemulihan ekonomi.

3. SDM dan Sarana Prasana Pengelola Persampahan

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan elemen terdepan bagi instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup yang berperan sebagai garda terdepan dalam mengambil sampah-sampah yang tersebar di masyarakat.

Kondisi saat ini, jumlah SDM pengelola sampah di Kabupaten Bekasi masih kurang, dibandingkan dengan jumlah desa yang tersebar di Kabupaten Bekasi.

Begitu juga halnya dengan sarana prasaran yang dimiliki, jumlah Dump Truck Sampah dan Baktor Sampah yang tersedia masih kurang memadai dan belum bisa mengcover semua area wilayah desa di Kabupaten Bekasi.

4. Efektivitas Penggunaan Anggaran

Anggaran merupakan rencana kegiatan yang di persentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang

paling sederhana, anggaran merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Bahwa efektif tidaknya penggunaan anggaran yang bersumber dari rakyat itu adalah ketika anggaran itu dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan pada perencanaan sebelumnya atau dengan kata lain dibelanjakan sesuai dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dalam memastikan efektivitas penggunaan anggaran dan memantau kinerja perangkat daerah tiap bulannya, Pj Bupati Bekasi bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, selalu rutin mengadakan Rapat Pimpinan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah. Rapat ini dilaksanakan dalam rangka memastikan adanya kemajuan dalam penyerapan APBD yang terintegrasi dengan Kinerja Perangkat Daerah.

Efektivitas Penggunaan Anggaran juga dibutuhkan agar memastikan penggunaan anggaran digunakan tepat sasaran, mengarah kepada pencapaian target-target yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RKPD, RPJMD dan RPJPD.

5. Kondisi dan Letak Geografis Kabupaten Bekasi

Kabupaten Bekasi yang merupakan salah satu daerah di wilayah administratif Provinsi Jawa Barat posisi geografisnya berada tepat di sebelah timur Jakarta, Kabupaten Bekasi berbatasan dengan Kota Bekasi dan Provinsi DKI Jakarta di barat, Laut Jawa di barat dan utara, Kabupaten Karawang di timur, serta Kabupaten Bogor di selatan. Sebagai penyangga Ibukota DKI Jakarta, pastinya Kabupaten Bekasi dipengaruhi oleh imbas

bonus demografi dimana sebagian besar merupakan pendatang yang berasal dari daerah untuk bekerja di Ibukota dan tinggal menetap maupun hanya singgah untuk Bekasi bekerja di Kabupaten Bekasi pada waktu tertentu.

A.2. Faktor Eksternal

1. Sosial Kultur Masyarakat

Kultur sosial adalah iklim atau budaya yang lahir dari proses interaksi seseorang dengan orang lain. Atau bergaulnya seseorang dengan orang lain, dalam lingkup kecil maupun besar, dengan anggota keluarga, dengan teman kerja, teman belajar, dengan sesama aktivis, maupun dalam lingkup lebih luas yaitu masyarakat.

Kabupaten Bekasi terdiri atas masyarakat yang Heterogen, hal ini tentunya menjadikan banyaknya kultur budaya yang bervariasi pula, dengan banyaknya pendatang yang datang ke Kabupaten Bekasi untuk mencari pekerjaan, tentunya akan menambah bonus demografi yang signifikan dari tahun ke tahun bagi Kabupaten Bekasi, begitu pun dengan iklim sosial politik yang terjadi, kini masyarakat Kabupaten Bekasi yang majemuk bersikap semakin kritis terhadap kinerja Pemerintah Daerah, hal ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bekasi.

2. Kontribusi Perusahaan / Sektor Swasta sebagai bagian dari Kawasan Industri yang ada di Kabupaten Bekasi

Melalui data sekunder yang didapat dari Tim Fasilitasi TJSLP Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bekasi memiliki 10 Kawasan Industri besar yang tersebar di wilayah Kabupaten Bekasi, dan di dalamnya terdapat 7.339 perusahaan yang menjalankan usahanya di Kabupaten Bekasi, namun baru sekitar 48 perusahaan yang aktif dan ikut berpartisipasi dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada masyarakat serta memberikan laporannya kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi TJSLP,

tentunya ini perlu dilakukan pendalaman lagi karena perbandingan antara jumlah partisipan TJSLP dan jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi tersebut terbilang masih sangat sedikit dan yang dilakukan oleh perusahaan hanya sebatas bantuan-bantuan sosial saja, padahal perusahaan dapat juga dilibatkan dalam kegiatan pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sarana prasarana kemasyarakatan lainnya seperti, taman, sekolah, rehabilitasi pasar dan sebagainya. Fenomena ini sangat disayangkan karena Kabupaten Bekasi merupakan daerah yang memiliki Kawasan Industri terbesar di Asia Tenggara, namun jumlah perusahaan yang berperan serta dalam CSR sangat sedikit.

3. Ketaatan masyarakat dengan hukum

Masyarakat akan taat pada hukum Ketika pemerintah menindak tegas para pelanggarnya, begitu juga dengan Perda Sampah / Lingkungan Hidup, harus ada sanksi tegas dan penerapannya yang kuat oleh dinas instansi terkait. Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup berperan dominan dan harus mengerahkan sumberdaya nya secara maksimal melalui monitoring dan evaluasi

4. Peran serta dunia pendidikan / Civitas Akademik dalam pembangunan

Perguruan tinggi memiliki peranan strategis dalam memajukan suatu daerah baik para civitas akademisi maupun mahasiswanya yang mana mencakup empat aspek peranan utama yakni sebagai educator, catalysator, facilitator dan developer demi mengatasi berbagai permasalahan-permasalahan di daerah yang cukup kompleks sesuai dengan karakteristik tiap daerah itu sendiri.

Dalam mewujudkan kolaborasi Penta Helix, dimana Penta Helix merupakan sebuah konsep kolaborasi kerjasama sinergitas Pemerintah, Universitas, Industri, Masyarakat dan Media yang bersinergi dimana posisinya Pemerintah sebagai pembuat kebijakan,

Universitas sebagai pusat pengembangan penelitian, dan industri sebagai penyedia kebutuhan layanan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama, Masyarakat sebagai modal utama dalam penyediaan SDM dan pelaksana program pengelolaan sampah di level RT-RW dan Media berperan sebagai Media Publikasi atas hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.

Perguruan Tinggi juga memiliki peran penting dalam mendukung program peningkatan Sumber Daya Manusia yang menjadi salah satu fokus utama dari program prioritas Pemerintah Kabupaten Bekasi. Terdapat kurang lebih 10 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kabupaten Bekasi, dan keseluruhannya telah memberikan kontribusi secara baik melalui pendidikan. Namun, masih disayangkan karena Kabupaten Bekasi tidak memiliki Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang dapat menjadi Ikon Kebanggaan dalam bidang Pendidikan di Kabupaten Bekasi.

5. Sarana Prasarana Infrastruktur

Infrastruktur atau sarana prasarana adalah seluruh struktur dan juga fasilitas dasar, baik itu fisik maupun sosial seperti bangunan, pasokan listrik, irigasi, jalan, jembatan dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk operasional aktivitas masyarakat maupun perusahaan.[butuh rujukan] Infrastruktur fisik dan sosial dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik.

Infrastruktur di Kabupaten Bekasi terbilang sudah cukup baik, hal ini didukung melalui data konektivitas antar wilayah di Kabupaten Bekasi dimana dari total luas wilayah Kabupaten Bekasi sebesar 1.273,88 km² memiliki tingkat konektivitas antar wilayah sebesar 97% , Kabupaten Bekasi pun mulai membangun lebih banyak lagi jalan antar

wilayah, dimana sudah ada Jalan Tol Gabus (Cibitung – Marunda) yang mempermudah pengangkutan logistik dari tol cikampek ke pelabuhan Tanjung Priok melalui Marunda. Tentunya hal ini akan meningkatkan juga perekonomian masyarakat di sekitar pintu keluar tol tersebut jika bisa memanfaatkan peluang yang ada. Selain itu di beberapa tahun ke belakang sudah dibangun juga Flyover dan Underpass untuk mengatasi kemacetan, jalan penghubung antar desa dan kecamatan setiap tahun juga dibangun. Namun terdapat kelemahan dalam infrastruktur di kabupaten Bekasi, yaitu tingginya mobilitas kendaraan / alat berat yang melalui jalan-jalan di Bekasi, baik itu melalui jalan utama Kabupaten dan juga Jalan penghubung antar wilayah perbatasan (Jalan Negara Jalur Pantura), sehingga banyak terjadi kerusakan jalan di akibatkan dari batas maksimal beban yang sering dilanggar oleh para pengemudi kendaraan atau alat berat tersebut saat melalui jalur Kabupaten Bekasi, sehingga sering terjadi kemacetan di Kabupaten Bekasi.

A.3. Matriks Operasionalisasi Konsep Strategi Intervensi

Judul	Dimensi	Fokus / Sub Fokus	Indikator / Sub Indikator
Strategi Intervensi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bekasi	1. Lingkungan Internal : Faktor-Faktor : a) Besar Alokasi Anggaran yang kuat b) Ketegasan Kepala Daerah c) Kapasitas SDM aparatur d) Efektivitas Penggunaan Anggaran e) Kondisi Geografis Kabupaten Bekasi	1.1. <i>Ability</i> (Kemampuan) a. Alokasi Anggaran yang Besar	Strategi AbO Menggunakan Kapasitas Fiskal dalam mengoptimalkan kinerja dalam rangka Pengelolaan Sampah
		1.2. <i>Strengths</i> (Kekuatan) a. Kompetensi Kepala Daerah yang baik	Strategi SO Menggunakan Kecakapan Kepala Daerah dalam rangka Pengelolaan Sampah
		1.3. <i>Agility</i> (Kecerdasan) a. Kolaborasi dan Kerjasama dengan Akademisi	Strategi AgO Menggunakan potensi Kapasitas SDM Aparatur dalam rangka Pengelolaan Sampah

Keterangan :

1. Strategi

AbO =

	2. Lingkungan Eksternal : Faktor-Faktor : a) Sosial Kultur Masyarakat b) Peran Serta Perusahaan / Sektor Swasta c) Ketaatan masyarakat d) Kolaborasi Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi e) Infrastruktur Prasarana Wilayah	2.1 <i>Opportunities</i> (Peluang) a. Pemberdayaan Masyarakat b. Swasta c. Media d. Akademisi	Strategi AbC Mengoptimalkan Kapasitas Fiskal yang dimiliki untuk mengelola kerjasama dengan para stakeholder melalui model Pentahelix
		2.2 <i>Culture</i> (Budaya) a. Budaya Gotong Royong	Strategi SC Mengoptimalkan Kecakapan Komunikasi Kepala Daerah untuk mempersatukan dan mengoptimalkan kolaborasi antar Stakeholder di Kabupaten Bekasi
			Strategi AgC Memadukan perkembangan teknologi dalam menyebarkan informasi Pengelolaan Sampah

Menggunakan kemampuan untuk memanfaatkan peluang

2. Strategi SO = Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
3. Strategi AgO = Menggunakan kecerdasan untuk memanfaatkan peluang
4. Strategi AbC = Melihat kemampuan untuk menghadapi tuntutan lingkungan perubahan budaya
5. Strategi SC = Menggunakan kekuatan untuk tanggap terhadap pengaruh perubahan budaya
6. Strategi AgC = Menggunakan kecerdasan untuk mensiasati pengaruh perubahan budaya

Berdasarkan hasil Analisa ASOCA, maka dapat diidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi yang di uraikan sebagai berikut :

1. Faktor Pendukung Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bekasi :
 - a. Kemampuan Piskal
 - b. Kecakapan Kepala daerah
 - c. Banyaknya peran Perusahaan swasta dalam TJS LP bisa diarahkan untuk Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bekasi
 - d. Kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam kajian pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi
2. Faktor Penghambat Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bekasi :
 - a. Kurangnya kesadaran Masyarakat terhadap sampah

Dengan memperhatikan faktor pendukung dan faktor penghambat untuk dapat meningkatkan pengelolaan sampah yang lebih baik di Kabupaten Bekasi, maka diperlukan strategi intervensi sebagai berikut :

- a. Melakukan sosialisasi secara rutin kepada pihak-pihak yang terkait pada pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan, serta para pelaku usaha tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi terkait Pengelolaan Sampah
- b. Melakukan penambahan petugas lapangan yang kompeten di masing-masing desa/kelurahan
- c. Melakukan penambahan sarana dan prasarana pengolahan sampah
- d. Memberikan kegiatan pelatihan untuk Kelompok Swadaya Masyarakat agar lebih kreatif dalam mengolah sampah menjadi barang tepat guna



FAKTOR EKSTERNAL	FAKTOR INTERNAL	ABILITY	STRENGTHS	AGILITY (KECERDASAN)
		(KEMAMPUAN)	(KEKUATAN)	
OPPORTUNITIES (PELUANG)		(AbO) Besarnya Alokasi Anggaran Kabupaten Bekasi yang besar dapat digunakan untuk memanfaatkan potensi pemberdayaan / peningkatan kemampuan atau keahlian masyarakat dalam pengelolaan persampahan.	(SO) Dengan Ketegasan Kepala Daerah yang handal dan bertangan dingin, dapat digunakan untuk mengarahkan Perangkat Daerah di Kabupaten Bekasi yang terlibat langsung dalam pengelolaan sampah	(AgO) Kabupaten Bekasi yang memiliki potensi banyaknya Perguruan Tinggi Swasta dapat memaksimalkan kerjasama-kerjasama dalam pengelolaan sampah melalui teknologi tepat guna
	CULTURE (BUDAYA)	(AbC) Dengan Anggaran yang tinggi, Pemerintah Daerah bisa melaksanakan program kegiatan yang bersifat tepat sasaran kepada Masyarakat, pembelian dumptruk sampah, baktor sampah di tiap desa, perluasan TPA dan Pembangunan TPSS	(SC) Dengan kecakapan yang dimiliki Kepala Daerah, Pj Bupati Bekasi dapat meminimalisir perbedaan-perbedaan pendapat yang sering terjadi di Masyarakat, terkait pengelolaan persampahan, Bupati bisa tegas memerintahkan Perangkat Daerah Lingkungan Hidup	(AgC) Penerapan Model Pentahelix yang mulai diterapkan di Kabupaten Bekasi akan memberikan dampak signifikan terhadap Pengelolaan Sampah di kabupaten Bekasi, melalui Inovasi dan Teknologi yang diciptakan melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi, Permodalan dari sektor

	di Wilayah kecamatan	untuk benar-benar memanfaatkan alokasi anggarnya tepat sasaran	Swasta, Penerapan oleh Masyarakat di Lingkungan masing-masing, kemudian pihak media yang bertugas untuk menyebarluaskan informasi tersebut akan memberi dampak luas bagi kemajuan pembangunan di Kabupaten Bekasi. Pemanfaatan inovasi dan teknologi melalui pengelolaan sampah dapat dijadikan modal utama
--	-------------------------	---	---

Adapun, strategi intervensi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bekasi setelah dilakukan analisa melalui Teori Analisa Pengambilan Kebijakan ASOCA diatas adalah sebagai berikut :

1. AbO (Ability Opportunity)

Alokasi Anggaran Kabupaten Bekasi yang besar, dapat digunakan untuk menambah sumberdaya, infastruktur pengelolaan sampah Strateginya adalah sebagai berikut :

- a) Pengalokasian anggaran yang diberikan untuk penambahan / pelebaran TPA Burangkeng
- b) Pengalokasian anggaran untuk memperbanyak dumptruk sampah dan baktor sampah yang beroperasi di tiap wilayah kecamatan dan desa
- c) Dengan anggaran yang ada membuat suatu sistem informasi persampahan agar para operasional di desa kecamatan bisa terpantau.
- d) Memperbanyak alokasi anggaran untuk pelatihan swakelola pengelolaan persampahan di masyarakat melalui teknologi tepat guna.

2. Strength Opportunity (SO)

Strength Opportunity Dengan kecakapan Kepala Daerah yang handal dan bertangan dingin, dapat digunakan untuk mengarahkan Perangkat Daerah yang mengurus sampah dan lingkungan hidup untuk benar benar memanfaatkan anggaran yang dimiliki.

Strategi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- a) Kepala Daerah dapat menugaskan Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk mulai membuat suatu Master Plan Persampahan
- b) Kepala Daerah menugaskan Satpol PP untuk menindak tegas pelanggar lingkungan hidup dengan sanksi yang tegas menimbulkan efek jera di masyarakat

- c) Kepala Daerah memerintahkan Bagian Hukum untuk mereview Kembali Perda Lingkungan Hidup khususnya tentang sanksi terhadap pelanggaran dalam pengelolaan persampahan.

2. Agility Opportunity (AgO)

Kabupaten Bekasi yang memiliki potensi Perguruan Tinggi Swasta sebanyak 22 PTS. Hal tersebut dapat memaksimalkan kerjasama dalam bidang ilmiah, berkolaborasi dengan SDM Aparatur yang handal, untuk merumuskan berbagai Inovasi teknologi Tepat Guna Pengelolaan Sampah dan menyebarkannya di seluruh desa yang ada di Kabupaten Bekasi.

Strategi yang dapat dilakukan yaitu :

- a) Mengoptimalkan kerjasama dengan lembaga-lembaga Perguruan Tinggi untuk menjangkau Teknologi Tepat Guna Pengolahan Sampah menjadi Bahan Bakar Minyak atau Sumber Daya lain yang sudah dihasilkan, untuk kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Perangkat Daerah terkait (Badan Litbang) dalam hal memperbaiki kualitas dan membantu pendanaan fasilitasi HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) hingga memfasilitasi pendanaan dari Perusahaan melalui TJSLP atau CSR dalam hal permodalan untuk diperbanyak dan disebar di seluruh desa di Kabupaten Bekasi.
- b) Memperbanyak MoU dan kesepakatan kerjasama dalam hal peningkatan kualitas pengelolaan persampahan di lingkungan kampus, dengan mendirikan bank sampah dan pengelolaan sampah di wilayah sekitar kampus, sehingga membantu masyarakat sekitar untuk mengurangi volume sampah spesifikasi tertentu (misal botol plastik, plastik belanja, sedotan plastik dan lainnya)

- c) Bersama-sama pihak Akademisi untuk merumuskan konsep baru bank sampah atau pengelolaan sampah berbasis keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah desa dan kecamatan se kabupaten Bekasi.

4. Ability Culture (AbC)

Dengan Alokasi anggaran yang besar, Pemerintah Daerah bisa melaksanakan program kegiatan yang bersifat tepat sasaran kepada masyarakat, dalam hal ini pemerintah daerah bisa merangkul masyarakat untuk persamaan persepsi dalam mengelola lingkungan hidup dan persampahan di wilayah desa sampai dengan kecamatan.

Strateginya adalah melalui :

- a) Pembelian sarana prasana pengelola persampahan yang di hibahkan kepada masyarakat
- b) Peningkatan anggaran monitoring evaluasi penegakan perda Lingkungan Hidup
- c) Pembebasan lahan di wilayah Utara dan Selatan sebagai tempat baru yang ditunjuk sebagai Tempat Pembuangan Akhir
- d) Menyusun Grand Desain Pengelolaan Persampahan
- e) Membeli Peralatan Pengelolaan Sampah dengan teknologi yang mutakhir

5. Strength Culture (SC)

Dengan kecakapan yang dimiliki Kepala Daerah, Pj Bupati Bekasi dapat meminimalisir pelanggaran Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Persampahan.

Dengan kemampuan SDM Aparatur yang baik dan mumpuni, melalui Perangkat Daerah bisa melaksanakan program kegiatan yang bersifat tegas menindak masyarakat maupun perusahaan yang melanggar Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Bekasi

Strateginya adalah melalui :

- 
- a) Pembentukan forum-forum masyarakat peduli lingkungan bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup
 - b) Bersama forum masyarakat membentuk Satgas Penindak Pelanggaran Peraturan Daerah Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan Hidup
 - c) Melibatkan Forum Kemasyarakatan Menyusun Peraturan Daerah baru yang lebih tegas dan menimbulkan efek jera di Masyarakat dengan menyesuaikan kondisi kultur budaya masyarakat Kabupaten Bekasi

6. Agility Culture (AgC)

Penerapan Model Pentahelix yang mulai diterapkan di Kabupaten Bekasi akan memberikan dampak signifikan terhadap Pengelolaan Sampah di kabupaten Bekasi, melalui Inovasi dan Teknologi yang diciptakan melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi, Permodalan dari sektor Swasta, Penerapan oleh Masyarakat di Lingkungan masing-masing, kemudian pihak media yang bertugas untuk menyebarkan informasi tersebut akan memberi dampak luas bagi kemajuan pembangunan di Kabupaten Bekasi.

Pemanfaatan inovasi dan teknologi melalui pengembangan sistem informasi persampahan yang terintegrasi akan dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat dengan kemudahan-kemudahan dalam mendapatkan peningkatan kualitas peningkatan pengelolaan persampahan

Strateginya adalah melalui :

- a) Optimalisasi model Pentahelix dalam Pembangunan melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pembangunan melalui kolaborasi Pentahelix di Kabupaten Bekasi
- b) Membangun inovasi Sistem Informasi Persampahan yang terintegrasi dari Pemerintah Daerah hingga ke Pemerintah Desa yang menggambarkan volume

sampah harian terangkut, tidak terangkut, lokasi pembuangan sampah akhir, TPS dan TPST di wilayah desa hingga kecamatan

- c) Memperkuat jaringan internet dengan mengintegrasikan dengan cctv di lokasi lokasi yang rawan masyarakat membuang sampah sembarangan.

BAB V

KESIMPULAN DAN HASIL

Berdasarkan hasil penelitian ini ada beberapa hal yang dapat disimpulkan untuk menjawab tujuan penelitian yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Tingkat dan daerah layanan yang dilakukan masih terbatas pada sebagian kegiatan komersil yakni sekitar 107 sumber sampah yang disekitar kawasan jalan utama, sementara sumber sampah dari sebagian kegiatan komersil lainnya dan rumah tangga belum terlayani sama sekali. Hal ini perlu perhatian pemerintah daerah melalui peningkatan alokasi anggaran untuk peningkatan kualitas sarana pengelolaan persampahan seperti penyediaan lahan TPST di wilayah desa – kecamatan, pembangunan TPST dan sarana prasarana persampahan melalui system informasi yang terintegrasi dan teknologi pengelolaan sampah yang dapat mereduksi volume sampah.
2. Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini masih kurang, Pemerintah Daerah harus Menyusun Master Plan Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Bekasi yang akurat dan bisa di implementasikan sejalan dengan RPJPD Kabupaten Bekasi 20 Tahun ke depan
3. Permasalahan utama yang dihadapi dalam pengelolaan sampah adalah masalah kultur budaya masyarakat yang suka buang sampah sembarangan, maka perlu adanya Revisi dalam Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Persampahan yang berisi sanksi tegas bagi masyarakat atau perusahaan yang melanggar aturan buang sampah

sembarangan, dilengkapi dengan sarana prasarana teknologi dan internet yang terintegrasi (cctv di tiap titik rawan buang sampah sembarangan)

4. Untuk mengatasi permasalahan yang ada ditetapkan tiga skala prioritas kebijakan yakni prioritas utama adalah penataan kelembagaan dan hukum, prioritas kedua adalah pembenahan terhadap aspek teknis operasional pengelolaan sampah dan prioritas ketiga adalah peningkatan peran serta masyarakat. Model perencanaan yang dilakukan selama ini adalah model sinoptik komprehensif dan inkremental, dimana perencana bersifat teknis birokratis dan pragmatik sehingga tidak dapat menumbuhkan kemandirian masyarakat sehingga model perencanaan yang lebih tepat adalah model perencanaan transaktif dimana perencana lebih berperan sebagai fasilitator, mediator dan pendidik sehingga dengan ini diharapkan dapat menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam mengelola sampah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustinus Sri Wahyudi, 1996. *Manajemen Strategi*, Jakarta: Binarupa Aksara.
- Ardianto, Elvinaro. 2011. *Metodologi Penelitian untuk Public Relations. Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media.
- Bambang Suwerda, 2012, *Bank Sampah: Kajian Teori dan Penerapannya*, Edisi I, Yogyakarta: Pustaka Rihama.
- Basrowi, Suwandi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan, 2007. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- , 2011. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: PT Prenada Media Grup.
- C.F Strong, 1960. *Modern Political Constituion*, London: Sidgwick & Jackson Ltd.
- Chemaa G. Shabbir, Jhon R. Nellis, & Dennis A. Rondinelli, 1983. *Background Papers for The World Development Report*.
- Coralie Bryant & Louise G. White, 1982. *Managing Development In The Third World*. Colorado : Westview.
- Creswell, John W. 2009. *Research Design : Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publication Inc,
- E. Utrecht, 1963, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakart: PT. Ikhtiar.
- Fandi Tjiptono, 2000. *Strategi Pemasaran*, Cet. Ke-II, Yogyakarta: Andi.

H.A Brasz, 1975. *Inleiding tot de Bestuurswetenschap, Vuga Boekerij*.

Josef Riwu Kaho, 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Kirk, Jerome, dan Marck L. Miller, 1986. *Reliability and Validity Qualitative Research, Qualitative Research Methods. Series 1, A Sage University Paper*.

Koswara E. Kertapraja, 2015. *Pemerintahan Daerah:Konfigurasi Politik Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dulu, Kini dan Nanti*. Inner bekerjasama dengan Universitas Satyagama. Jakarta.

Kriyantono, Rahmat, 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group.

Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.

Mayer, Robert R & Ernest Greenwood, 1984. *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*, Jakarta: Rajawali.

Miles, M.B dan Huberman. 1994. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjeptjep Rohidi, Jakarta: UI Press.

Moleong, Lexy J, 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muchlis Hamdi, 2002. *Bunga Rampai Pemerintahan*. Jakarta: Yarsif
Watampone. Murthado dan Said, 1997. *Penanganan Pemanfaatan Limbah Padat*. Jakarta : Sarana Perkasan.

Narbuko dan Achmadi. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi

Aksara. Pandji Anoraga, 2009. *Manajemen Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta.

Philip Kotler, 1997. *Marketing Management*, Jakarta: Pren Hallindo.

Rianto, Adi. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial & Hukum*. Jakarta : Granit.

Rishwanda Imawan, 2005. *Pelayanan Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka

Pelajar.

Robert M. Maciver, 1947. *The Web of Government*. New York: The Mac Milan Company Ltd.

Rudy Badrudin, 2012. *Ekonomi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM

YKPN. Satori. Djam'an dan Aan Komariah. 2010. *Metode Penelitian*

Kualitatif. Bandung:

Alfabeta.

Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*.

Yogyakarta

: Graha Ilmu.

Sadu Wasistiono dan Fernandes Simangunsong, 2014, Metodologi Ilmu Pemerintahan: Edisi Revisi yang Diperluas. Jatinangor: IPDN Press.
 Siti Aminah, 2014. Kuasa Negara pada Ranah Politik Lokal .Jakarta: Kencana.
 Smith, Brian C, 1985. Decentralization: The Territorial Dimension of the State. London: Allen & Unwin. London.

Setyo Soedrajat, 1994. Manajemen Pemasaran Jasa Bank, Jakarta:Ikral Mandiri Abadi.

Sinichi Ichimura & Roy Bahl, 2009. Decentralization policies in Asian development. USA : world scientific publishing Co. Pte. Ltd.

Soehartono, Irawan. 2002. Metode Penelitian Sosial, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
 Sukmadinata. 2006. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : Rosdakarya.

Suparmoko dkk, 2013. Valuasi Ekonomi Sumberdaya alam dan Lingkungan.

Jogikarta: BPFE.

Syamsuddin Haris, 2007. Desentralisasi dan otonomi daerah. Jakarta : LIPPI pres.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang- undang nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* melalui Bank Sampah.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Sampah.

Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah

C. Jurnal

Horas M. Panjaitan dengan Judul: *Tata Kelola Kolaboratif Penanganan Sampah di Provinsi DKI Jakarta* Tahun 2019, Program Doktor Ilmu Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2019.

Machfud Sidik. Studi Empiris Desentralisasi Fiskal: Prinsip, Pelaksanaan di Berbagai Negara, serta Evaluasi Pelaksanaan Penyerahan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumentasi Sebagai Konsekuensi Kebijakan Pemerintah. Sidang Pleno X ISEI. Batam. 2001. Hal: 4

Lina Rahayu Suardi, Budhi Gunawan, Mahfud Arifin, Johan Iskandar. A Review of Solid Waste Management in Waste Bank Activity Problems, International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology, 2018

S. Godwin Barnabas, G.D.Sivakumar, G. Satish pandian, K. Arun Vasantha Geethan, S. Prasanna Kumar, P.Prithvi Rajeevan, and P. Dheepan Kumar, Solid waste management across the World-a review, 2017

Syamsul Auliya Rachman *Model Implementasi Kebijakan Publik Pengelolaan Sampah Refused Derived Fuel (RDF) di Kabupaten Cilacap*. Program Doktor Ilmu Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta Tahun 2021

Yunita Ismail, Community Empowerment In Household Waste Management, Journal Of Community Engagement, 2019 hal 24-29

D. Internet

Arif Wijoyo Nugroho. Judul : “Fenomena Sosial Penanganan Masalah Sampah”.
<http://nokturnal0210.blogspot.com/2014/10/fenomena-sosial-penanganan-masalah.html>, diunduh pada Juni 2022.

CNN Indonesia. Judul : “Indonesia Penyumbang Sampah Plastik Terbesar Ke-dua Dunia”. <http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160222182308-277-112685/indonesia-penyumbang-sampah-plastik-terbesar-ke-dua-dunia/>,
 diunduh pada 4 Februari 2017 pukul 11.58 WIB

PEDOMAN WAWANCARA

Dalam usulan penelitian ini, peneliti membuat daftar wawancara secara garis besar berupa pernyataan yang akan dikembangkan secara lebih mendalam pada saat wawancara dilakukan terhadap informan sehingga diharapkan perolehan informasi yang lengkap, aktual dan akurat.

Adapun pedoman wawancara ini bertujuan memenuhi kebutuhan data untuk mengetahui Strategi Intervensi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat di dasarkan pada Teori ASOCA menurut Ermaya (2013:19-20).

No	Daftar Pertanyaan	Keterangan
1	Bagaimana strategi eksisting atau strategi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi saat ini dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi?	
2	Hal apa saja yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam rangka meningkatkan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi?	
3	Strategi apa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi?	
4	Strategi apa yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi?	
5	Faktor apa saja yang menjadi pendorong bagi ketercapaian target RPJMD di Tahun 2021 ?	
6	Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi?	
7	Sejauh mana efektivitas perencanaan dan penganggaran dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi?	
8	Apakah proporsi belanja terhadap pembangunan pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi sudah sesuai dengan kebutuhan?	

9	Bagaimana efektivitas kinerja perangkat daerah dalam dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi?	
10	Bagaimana kendali pimpinan / bupati / Kepala dinas/badan dalam memastikan ketercapaian target dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi?	
11	Apakah pembangunan yang di anggarakan sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat?	
12	Bagaimana cara mensinkronkan antara kebutuhan di masyarakat dengan penganggaran program dan kegiatan pembangunan pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi?	
13	Apakah pendapatan daerah di bidang pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi sudah optimal digali potensinya?	
14	Adakah inovasi-inovasi baru dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi?	
15	Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam merespon isu/permasalahan aktual yang sedang terjadi di bidang pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi?	
16	Inovasi apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya percepatan pembangunan pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi?	
17	Bagaimana peran Kepala Perangkat Daerah dalam memastikan ketercapaian target pembangunan pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi?	

PEDOMAN OBSERVASI

Dalam pengamatan (Observasi) yang dilakukan mengamati upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi.

No	Indikator Observasi	Keterangan
1	Strategi Eksisting (Yang dilaksanakan Pemerintah Daerah saat ini)	Mengobservasi strategi eksisting pemerintah daerah saat ini dalam rangka peningkatan pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi
2	Tingkat Penyerapan Anggaran	Mengobservasi seberapa besar penyerapan anggaran rangka peningkatan pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi
3	Koordinasi antar organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan Pengelolaan Sampah	Mengobservasi tingkat efektifitas koordinasi antar Perangkat Daerah
4	Efektivitas Kepemimpinan	Mengobservasi efektivitas kepemimpinan seorang kepala daerah dalam rangka peningkatan pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi
5	Kerjasama lintas sektor (optimalisasi pentahelix)	Mengobservasi sejauh mana pelaksanaan kerjasama lintas sektor di Kabupaten Bekasi dalam rangka peningkatan pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi
6	Responsivitas terhadap saran dan keluhan masyarakat	Mengobservasi respon pemerintah daerah dalam menerima saran dan keluhan dari masyarakat terkait rangka peningkatan pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi
7	Kekuatan SDM	Sejauh mana efektivitas penempatan SDM di Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan percepatan peningkatan pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi



SEKOLAH TINGGI ILMU PEMERINTAHAN ABDI NEGARA

Prodi Ilmu Pemerintahan: SK BAN-PT No. 2537 / SK / BAN-PT / Akred / S / IX / 2018, Terakreditasi Peringkat "B".
Prodi Ilmu Politik : SK BAN-PT No. 2534 / SK / BAN-PT / Ak-PPJ / S / IV / 2022, Terakreditasi Peringkat "B".

Kampus :

Jl. Lenteng Agung No. 37 A, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12610 Telp/Fax. : (021) 786 7996, 788 906 72, 788 906 73
Website : www.stipan.ac.id E-mail : admin@stipan.ac.id



Jakarta, 14 September 2022

No : 712/STIPAN-A/IX/2022

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Bapak / Ibu Kepala Kesbampol Kabupaten Bekasi

Di

Kabupaten Bekasi

Dengan Hormat

Dalam Rangka Penyusunan Tesis Sebagai Salah Satu Syarat Kelulusan Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (PPs, M.IP STIPAN) di Jakarta.

No	Nama	NPM	Judul	Pembimbing Ke 1	Pembimbing Ke 2
1	A. Munzir Muharram	20651010224	Strategi Intervensi Kepala Dinas Pendidikan Dalam Upaya Meningkatkan Motivasi Kerja Pegawai Di Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat	Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS	Dr. Drs. Rosidi, M.Si
2	Dedy Widjaya	20651010225	Strategi Intervensi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat	Dr. Sumarsono, MDM	Dr. Drs. Rosodi, M.Si
3	Evi Silvia	20651010226	Implementasi pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat	Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS	Dr. Drs. Rajanner P. Simarmata, M.Si
4	Iwan Syahroni	20651010228	Peran Dinas Pendidikan Dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (Pip) Jenjang Smp Di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat	Prof. Dr. Drs. I Nyoman Sumaryadi, BA, M.Si	Dr. Drs. Rajanner P. Simarmata, M.Si
5	Nurkholis	20651010229	Pengukuran Kinerja Pegawai Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat	Prof. Dr. Drs. I Nyoman Sumaryadi, BA, M.Si	Dr. Drs. Sofyan Safari Hamam, M.Si
6	Santi Sripujianti	20651010231	Implementasi Kebijakan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 440 Tahun 82020 Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Kabupaten Bekasi	Dr. Sumarsono, MDM	Dr. Drs. Sofyan Safari Hamam, M.Si

7	Muhammad Ali Amran	20651010237	Implementasi Kebijakan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Urusan Pemerintahan Bidang Umkm Dikecamatan Setu Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat	Dr. Sumarsono, MDM	Dr. Rosidi, M.Si
8	Fadly Marissatrio	20651010241	Strategi Intervensi Pemerintah Daerah Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat	Dr. Sumarsono, MDM	Dr. Drs. Rajanner P. Simarmata, M.Si

Dengan ini kami mohon agar Mahasiswa tersebut diberikan Izin untuk melakukan penelitian berupa Wawancara,8 Dokumentasi, Dan Data-Data Kuantitatif Maupun Kualitatif Pada Instansi dilingkungan yang Bapak / Ibu Pimpin.

Sehubungan hal tersebut diatas mohon berkenan untuk memberikan jawaban secara tertulis atas permohonan kami tersebut.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan
Abdi Negara
An. Ketua
Wakil Ketua



Dr. Sofyan Safari Hamim, M.Si